

**IMPLIKASI KEBERADAAN PPI TERHADAP PERTUMBUHAN
KAWASAN EKONOMI PERIKANAN
(STUDI KASUS: PPI KARANGSONG KECAMATAN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

OMAT
L4D 006 063



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IMPLIKASI KEBERADAAN PPI TERHADAP PERTUMBUHAN
KAWASAN EKONOMI PERIKANAN
(STUDI KASUS: PPI KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

OMAT
L4D 006 063



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IMPLIKASI KEBERADAAN PPI TERHADAP PERTUMBUHAN KAWASAN
EKONOMI PERIKANAN
(STUDI KASUS: PPI KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT)**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

O M A T
L4D 006 063

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 24 Maret 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Maret 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Samsul Ma'rif, SP, MT

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan dalam memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Maret 2008

O M A T
NIM L4D006063



*Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
 dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
 yang memberatkan punggungmu,
 Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
 sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
 Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan
 sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
 dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
 (Q.5 Alam Nasyrah: 1-8)*

Kupersembahkan Tesis ini, untuk:
 Peneduh hatiku tercinta, Suharti, SE dan anakku sayang Fawwaz Fadhil
 Kedua orang tuaku Hj. Saridah dan H. Rasna
 Kedua Mertuaku Hj. Asmi Kasmirah dan Drs. K.H Masyhuri Rusdi (alm)
 Terima kasih ku ucapkan dari lubuk hati yang terdalam
 Atas do'a dan dukungannya yang tulus dan ikhlas

Abstrak

Keberadaan PPI Karangsong sebagai sarana yang menampung kegiatan perikanan membentuk hubungan keterkaitan yang berlangsung pada kegiatan hulu dan hilir. Hubungan keterkaitan dalam kegiatan perikanan membentuk interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Adanya hubungan interaksi tersebut berimplikasi pada pertumbuhan kawasan sekitarnya.

Permasalahan dalam produktivitas kegiatan perikanan terhadap tingkat kesejahteraan terjadi pada nelayan pencari ikan dan buruh nelayan. Mengingat pelaku usaha yang mendominasi dalam kegiatan perikanan adalah nelayan (nelayan buruh), sementara stratifikasi nelayan Karangsong bukanlah suatu entitas tunggal, melainkan terdiri dari beberapa kelompok yang dapat dibedakan oleh kondisi kemampuan permodalan, selain itu terjadi ketimpangan dalam sistem bagi hasil pendapatan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi keberadaan PPI sebagai sarana kegiatan perikanan terhadap pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu dan merumuskan strategi pengembangan kawasan ekonomi perikanan.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa kegiatan perikanan yang berlangsung pada kegiatan hulu dan hilir telah menciptakan nilai pendapatan diantaranya nilai pendapatan yang diperoleh pemerintah (1,6 %) sebagai penyedia sarana PPI Karangsong dan pihak pengelola PPI Karangsong yakni KPL Mina Sumitra, yang meliputi nilai pendapatan dari alokasi penyelenggaraan (1,65 %) dan operasional TPI (0,80 %), kemudian nilai pendapatan yang diperoleh bakul ikan memperoleh keuntungan marjinal dari hasil memasarkan ikan untuk wilayah lokal (11,23 %) dan pemasaran di luar Wilayah Indramayu (14,41 %).

Kegiatan perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong saat ini telah menstimulir pertumbuhan kawasan ekonomi melalui rantai nilai kegiatan perikanan yaitu tumbuhnya kewirausahaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang didasari oleh adanya pemanfaatan sumber daya pesisir kelautan (alam, manusia, kelembagaan dan modal), yang dapat menciptakan aktivitas pada pelaku usaha dalam keterkaitan kegiatan perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dalam permasalahan perolehan nilai pendapatan bagi nelayan pencari ikan (Buruh nelayan) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan adalah melakukan hubungan kerjasama antara pihak perbankan dengan koperasi (*linkage program*) untuk memberikan permodalan bagi nelayan (nelayan pencari ikan), hal ini diharapkan dapat merubah variasi pembagian pendapatan, terkait dalam sistem bagi hasil nelayan Karangsong yang terjadi antara nelayan dan juragan.

Kata kunci: Keberadaan PPI, kegiatan perikanan, pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan.

Abstract

Make the existence of PPI Karangsang is medium which accommodates fishery activities to make a relationship between direct relevance of upriver and downstream activities. The relevance relationship in fishery activities then forms social, economical and physical interaction relationship implicates on areas development in the surroundings.

The problems of fishery activities productivity to prosperity level occurs among fisherman and fisherman labour. Considering the businessmen who dominate fishery activities are fisherman (fisherman labour), whereas the stratification of fisherman in Karangsang is not the only one entity, but it consists of many groups which can be distinguished by the condition of finance ability, besides it occurs an imbalance in the system of earning share.

Purpose of research are to know the existence implication of PPI as the fishery activities medium to the fishery economics area development that goes on in PPI Karangsang of Indramayu Subdistrict and to formulate the strategy of fishery economics area development.

Technique analysis of the research uses qualitative and quantitative method with descriptive approach. The result of research shows that fishery activities which going on in upriver and downstream activities have created earning value that are earning value obtained by the government (1,6 %) as the facilities provider of PPI Karangsang and KPL Mina Sumitra as the organizer of PPI Karangsang which includes earning value from the implementation allocation (1,65 %) and TPI operational (0,8 %), then earning value from the obtained by fishmongers getting the marginal profit from the result of marketing their fish of local area (11,23 %) and marketing in the surrounding of Indramayu (14,41 %).

Today the fishery activities which going on in PPI Karangsang have stimulated economics area development through the sequences of fishery activities value that is entrepreneurship growing and providing vocation for local people based on the utility of resources in the seaboard (nature, human, institution and finance) which are able to create an activity of businessmen related to the fishery activities therefore it can encourage quality improvement and people prosperity.

Recommendation related to the problems of earning value achievement for fisherman (fisherman labour) concerning to encourage the prosperity improvement is to conduct cooperation relationship among banks and cooperative (linkage program) to give the finance for fisherman (fisherman labour), hopefully that it is able to change the variation of earning share related to the system of fisherman in Karangsang which occurs between the fisherman and the owner of enterprise.

Keywords: The existence of PPI, fishery activities, fishery economics area development.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat memulai dan menyelesaikan Tesis berjudul **Implikasi Keberadaan PPI Terhadap Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Perikanan (Studi Kasus: PPI Karangsong Kecamatan Indramayu Provinsi Jawa Barat)**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Bupati Indramayu, H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin yang telah memberikan izin tugas belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA, selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota juga sebagai Pembimbing Utama atas segala saran, pendapat, bimbingan serta waktunya selama penyusunan Tesis ini yang telah mendidik dan memberikan ilmu bagi penulis;
3. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT, selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, pendapat, bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA, selaku Kepala PUSBIKTEK BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum;
5. Bapak Ir. Djoko Sugiono, M.Eng.Sc, selaku Kepala Balai BPKPWTK Semarang beserta seluruh jajarannya;
6. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan arahan bagi perbaikan Tesis ini;
7. Bapak Dr.rer.net Imam Buchori, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan arahan bagi perbaikan Tesis ini;
8. Ibu Ir. Retno Wijayanti, MT selaku koordinator program kerjasama Departmen PU dan UNDIP beserta seluruh jajarannya;
9. Bapak Drs. Syahri Thohir, SH., MH selaku Kepala Bapeda Kabupaten Indramayu (periode tahun 2006);
10. Bapak Drs H. Apriyanto selaku Kepala Bapeda Kabupaten Indramayu (periode tahun 2007);
11. Bapak Ir. Abdur Rosyid Hakim selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
12. Bapak Ir. Mohamad Sam'un selaku Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Indramayu yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi untuk keperluan penelitian ini;

13. Bapak Ir. Agus Mulyono selaku Kepala Seksi Pengembangan Dunia Usaha pada Bappeda Kabupaten Indramayu atas waktu dan diskusi serta informasi untuk keperluan penelitian ini;
14. Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra selaku Pengelola PPI Karangsong yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi untuk keperluan penelitian ini;
15. Masyarakat nelayan dan bakul ikan serta pengolah ikan di PPI Karangsong, terima kasih atas kesempatan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan informasi untuk keperluan penelitian ini;
16. Rekan-rekan karyasiswa dari seluruh Indonesia angkatan VI (Achmad Yani, Alkodra Huzain, Allein F.S Talumewo, Arif Budiman, Astuti Rahayu, Doddy Indradi, Febrianes, I Nyoman Siki Ngurah, Indra Suhada, Pariyani, Paula Isabel Baun, Rizki Permatasari, Safrin Haerudin, Usman Tunreng, Yohanes Reinhold Rumbewas) Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang;
17. Ibunda, Hj. Saridah dan Ayahnda H. Rasna serta saudara-saudaraku (Sugiono, Suwarta, Eny Winarni, ST) yang selalu memberikan dukungan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini;
18. Mertua, Hj. Asmi Kasmirah dan Drs. K.H. Masyhuri Rusdi (alm) yang selalu memberikan motivasi dan do'a semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya;
19. Penulis sampaikan terima kasih kepada peneduh hatiku tersayang dan tercinta; Suharti, SE dan anakku sayang; Fawwaz Fadhil yang telah sabar menunggu di rumah serta selalu memberikan dorongan moril dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak tersebut, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya. Akhir kata, dalam mengakhiri penulisan ini dengan segala kerendahan hati semoga bermanfaat.

Semarang, Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi.....	8
1.3.1. Tujuan.....	8
1.3.2. Sasaran.....	8
1.4. Manfaat Studi.....	8
1.5. Ruang Lingkup.....	9
1.5.1. Ruang Lingkup Materi.....	9
1.5.2. Ruang Lingkup Spasial.....	10
1.6. Kerangka Pikir.....	11
1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi.....	16
1.7.1. Pendekatan Studi.....	16
1.7.2. Data Penelitian.....	18
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7.3.1. Angket (Kuesioner).....	20
1.7.3.2. Wawancara.....	22
1.7.4. Populasi dan Sampel.....	23
1.7.5. Teknik Analisis Data.....	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	28
 BAB II PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI PERIKANAN	 30
2.1. Pertumbuhan Kawasan.....	30
2.1.1. Definisi Pertumbuhan.....	31
2.1.2. Definisi Kawasan.....	34
2.1.3. Kawasan Industri Perikanan.....	36
2.2. Pengembangan Ekonom Lokal.....	39
2.2.1. Analisis Keterkaitan dan Dampak Pengganda.....	41

2.2.2.	Wilayah Pasar.....	44
2.2.3.	Interaksi Keruangan.....	46
2.3.	Rantai Nilai (<i>Value Chain</i>).....	47
2.4.	Klasifikasi Sumber Daya Perikanan.....	51
2.5.	Perkembangan Daerah Pantai Pesisir.....	53
2.5.1.	Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelengan Ikan.....	55
2.5.2.	Karakteristik Masyarakat Pesisir.....	58
2.5.3.	Kegiatan Masyarakat Nelayan	60
2.5.3.1.	Kelompok Masyarakat Nelayan.....	60
2.5.3.2.	Modal Usaha-usaha Nelayan.....	61
2.5.3.3.	Biaya dan Pendapatan Nelayan.....	62
2.5.3.4.	Sistem Pengawetan dan Pengolahan Ikan.....	63
2.5.3.5.	Pola Bagi Hasil Tangkapan.....	65
2.6.	Sintesis Kajian Teori.....	66
BAB III	TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN GAMBARAN KEGIATAN PERIKANAN DI KAWASAN PPI KARANGSONG.....	70
3.1.	Tinjauan Kebijakan Pengembangan Perikanan.....	70
3.1.1.	Tata Ruang Regional.....	72
3.1.2.	Tata Ruang Kota Indramayu.....	72
3.2.	Struktur Tata Ruang Kawasan PPI Karangsang.....	73
3.3.	Kondisi Fisik Kawasan PPI Karangsang.....	76
3.4.	Kondisi Kelautan.....	82
3.5.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	84
3.5.1.	Mata Pencaharian Penduduk.....	85
3.5.2.	Aspek Perekonomian.....	87
3.6.	Kegiatan Produksi dan Operasional Pendaratan Ikan	88
3.6.1.	Kegiatan Perikanan Tangkap.....	88
3.6.2.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap..	91
3.6.3.	Fasilitas dan Operasional PPI Karangsang.....	95
3.6.4.	Potensi dan Kendala Kegiatan Perikanan.....	97
BAB IV	ANALISIS KEGIATAN USAHA PERIKANAN DI KAWASAN PPI KARANGSONG	99
4.1.	Kegiatan Usaha Perikanan di Kawasan PPI Karangsang.....	99
4.1.1.	Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan.....	100
4.1.1.1.	Nelayan.....	100
4.1.1.2.	Pembuat Perahu/Kapal Motor Nelayan..	103
4.1.1.3.	Bakul Ikan.....	103
4.1.1.4.	Koperasi.....	104
4.1.1.5.	Perdagangan Umum.....	105
4.1.1.6.	Pengolah Ikan.....	106

4.1.1.7.	Pembeli Perantara dan Pembeli Akhir....	107
4.1.1.8.	Pemerintah.....	107
4.1.2.	Jenis Kegiatan Usaha Perikanan.....	108
4.1.2.1.	Tahapan Pra-Produksi Kegiatan Perikanan.....	110
4.1.2.2.	Tahapan Produksi Kegiatan Perikanan..	116
4.1.2.3.	Tahapan Pasca Produksi Kegiatan Perikanan.....	120
4.2.	Analisis Keterkaitan Rantai Nilai Kegiatan Perikanan.....	124
4.2.1.	Rantai Nilai Pada Tahap Pra Produksi Kegiatan Perikanan.....	124
4.2.1.1.	Pendapatan Pembuat Sarana Alat Tangkap (Perahu/Kapal Motor).....	126
4.2.1.2.	Pendapatan Penyedia Kebutuhan Logistik.....	127
4.2.2.	Rantai Nilai Pada Tahap Produksi Kegiatan Perikanan.....	127
4.2.2.1.	Pendapatan Pengelola Pelelangan Ikan (Koperasi dan Pemerintah).....	128
4.2.2.2.	Pendapatan Nelayan Karangsong.....	130
4.2.2.3.	Perbandingan Pendapatan Antar Status Nelayan.....	143
4.2.3.	Rantai Nilai Pada Tahap Pasca Produksi Kegiatan Perikanan.....	148
4.3.	Keterkaitan dan Dampak Pengganda Kegiatan Usaha Perikanan.....	150
4.3.1.	Keterkaitan dan Dampak Pengganda pada Tahap Pra Produksi.....	151
4.3.2.	Keterkaitan dan Dampak Pengganda pada Tahap Produksi.....	152
4.3.3.	Keterkaitan dan Dampak Pengganda pada Tahap Pasca Produksi.....	153
4.3.4.	Hubungan Keterkaitan Kegiatan Perikanan.....	154
4.4.	Implikasi Keruangan Kegiatan Perikanan.....	157
4.4.1.	Implikasi Keruangan pada Kegiatan Hulu.....	159
4.4.2.	Implikasi Keruangan pada Kegiatan Hilir.....	164
4.5.	Sintesis Temuan Penelitian.....	172
4.5.1.	Keberadaan PPI Karangsong sebagai Fungsi Ekonomi dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	174
4.5.2.	Kegiatan Perikanan Memiliki Keterkaitan Rantai Nilai dan Dampak Pengganda.....	175
4.5.3.	Kegiatan Perikanan sebagai Pembentuk Struktur Ruang Kawasan PPI Karangsong.....	177

4.5.4.	Kegiatan Perikanan sebagai Pembentuk Arah Kelembagaan.....	178
4.5.5.	Kegiatan Perikanan sebagai Pembentuk Jaringan Pemasaran.....	179
4.5.6.	Keberadaan PPI Karangsong Menstimulir Per- tumbuhan Kawasan Ekonomi Perikanan dalam Sistem Bisnis Perikanan.....	179
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	185
5.1.	Kesimpulan.....	185
5.2.	Rekomendasi.....	187
	DAFTAR PUSTAKA.....	190
	LAMPIRAN.....	196

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Data Penelitian.....	21
Tabel I.2	: Jenis Armada Kapal Motor Nelayan Karangsong.....	25
Tabel II.1	: Variabel Penelitian.....	69
Tabel III.1	: Penggunaan Lahan Kawasan PPI Karangsong.....	73
Tabel III.2	: Kedalaman Laut dan Jarak Pantai.....	83
Tabel III.3	: Karakteristik Tinggi Air Muka.....	83
Tabel III.4	: Prosentase Frekuensi Kejadian Angin.....	84
Tabel III.5	: Jumlah Nelayan di Kabupaten Indramayu.....	85
Tabel III.6	: Jumlah Nelayan Menurut Status dan Pedagang di Kecamatan Indramayu.....	86
Tabel III.7	: PDRB Kecamatan Indramayu Atas Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2005 (Dalam Jutaan Rupiah).....	88
Tabel III.8	: Pola, Jadwal Tangkap dan Berlabuh di PPI Karangsong....	90
Tabel III.9	: Jumlah Armada, Jadwal Tangkapan dan Labuh Kapal Nelayan di Kabupaten Indramayu.....	90
Tabel III.10	: Produksi, Nilai Produksi dan Perkembangan Hasil Ikan Laut Kabupaten Indramayu.....	91
Tabel III.11	: Produksi, Nilai Produksi dan Perkembangan Ikan yang didaratkan di PPI Karangsong.....	92
Tabel III.12	: Produksi Komoditas Ekspor Tangkapan Nelayan Kab- upaten Indramayu.....	93
Tabel III.13	: Jenis Ikan Hasil Tangkapan Laut Yang Didaratkan di PPI Karangsong.....	94
Tabel III.14	: Kondisi Fasilitas PPI Karangsong.....	97
Tabel IV.1	: Jumlah Bakul Ikan yang Beroperasi di PPI Karangsong Tahun 2007.....	104
Tabel IV.2	: Jumlah dan Nilai Produksi Industri Olahan Ikan.....	123
Tabel IV.3	: Rata-Rata Biaya Kebutuhan Logistik Pelayaran Menurut Jenis Kapal Motor Yang Beroperasi di PPI Karangsong Tahun 2007.....	126
Tabel IV.4	: Nilai Pendapatan Pemerintah Hasil Retribusi Tangkapan Ikan di PPI Karangsong.....	128
Tabel IV.5	: Nilai Pendapatan Koperasi Mina Sumitra dan Dana Nelayan Hasil Retribusi di PPI Karangsong.....	129
Tabel IV.6	: Kualitas Pemasaran Ikan PPI Karangsong.....	132
Tabel IV.7	: Pendapatan Hasil Nelayan dengan Menggunakan Kapal Motor Tempel Ukuran 1-2 GT.....	134

Tabel IV.8	: Pendapatan Hasil Nelayan dengan Menggunakan Kapal Motor Ukuran 5-15 GT.....	135
Tabel IV.9	: Pendapatan Hasil Nelayan dengan Menggunakan Kapal Motor Ukuran Lebih dari 15 GT.....	136
Tabel IV.10	: Perbandingan Pendapatan Status Nelayan Karangsong Menggunakan Kapal Motor 1-2 GT.....	144
Tabel IV.11	: Perbandingan Pendapatan Status Nelayan Karangsong Menggunakan Kapal Motor 5-15 GT.....	144
Tabel IV.12	: Perbandingan Pendapatan Status Nelayan Karangsong Menggunakan Kapal Motor Lebih dari 15 GT.....	145
Tabel IV.13	: Nilai Pendapatan Nelayan Buruh Menurut Penggunaan Sarana Alat Tangkap dan Jenis Permodalan.....	146
Tabel IV.14	: Nilai Tambah dan Keuntungan Pemasaran Jenis Ikan Tongkol untuk Pemasaran Lokal (Kecamatan Indramayu, Sindang dan Jatibarang).....	150
Tabel IV.15	: Nilai Tambah dan Keuntungan Pemasaran Jenis Ikan Tongkol untuk Pemasaran Luar Indramayu (Cirebon, Majalengka, Kuningan, Bandung, Subang dan Jakarta)....	150
Tabel IV.16	: Matrik Keterkaitan Kegiatan Perikanan.....	155
Tabel IV.17	: Rangkuman Hasil Penelitian.....	172
Tabel IV.18	: Perolehan Nilai pada Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan...	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Perkembangan Nilai Produksi Hasil Tangkapan Ikan Yang Didaratkan Di Ppi Karangsong.....	4
Gambar 1.2	: Peta Orientasi Wilayah Studi (Kabupaten Indramayu).....	12
Gambar 1.3	: Peta Orientasi Wilayah Studi (Kecamatan Indramayu).....	13
Gambar 1.4	: Kerangka Pemikiran Studi.....	15
Gambar 1.5	: Kerangka Analisis.....	27
Gambar 2.1	: Konsep Rantai Nilai.....	48
Gambar 2.2	: Rantai Nilai Sederhana.....	49
Gambar 2.3	: Skema Pengelompokkan Sumber Daya Perikanan.....	53
Gambar 2.4	: Kerangka Teori Kegiatan Ekonomi Perikanan.....	67
Gambar 3.1	: Peta Pengembangan PPI di Kabupaten Indramayu.....	71
Gambar 3.2	: Peta Arahan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PPI Karangsong.....	74
Gambar 3.3	: Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan PPI Karangsong..	77
Gambar 3.4	: Peta Kondisi Eksisting PPI Karangsong.....	78
Gambar 3.5	: Penggunaan Lahan Tambak.....	80
Gambar 3.6	: Pendangkalan Sungai Prajagumiwang.....	81
Gambar 3.7	: Penggunaan Lahan Permukiman.....	82
Gambar 3.8	: Sistem Tata Niaga, Pembinaan, Pelayanan dan Pem- asaran Ikan Tangkapan Nelayan PPI Karangsong.....	87
Gambar 3.9	: Jenis Ukuran Kapal Motor Nelayan Karangsong.....	89
Gambar 3.10	: Fasilitas Jalan Lingkungan Kawasan PPI Karangsong.....	98
Gambar 4.1	: Sarana Pembuatan dan Perbaikan Kapal Motor.....	112
Gambar 4.2	: Keperluan Logistik Pelayanan.....	115
Gambar 4.3	: Industri Pengolahan Ikan.....	122
Gambar 4.4	: Rangkaian Kegiatan Perikanan.....	123
Gambar 4.5	: Produksi Tangkapan Ikan Nelayan Karangsong.....	131
Gambar 4.6	: Persentase Penggunaan Modal Untuk Jenis Kapal Motor Tempel Ukuran 1-2 GT.....	133
Gambar 4.7	: Persentase Penggunaan Modal Untuk Jenis Kapal Motor Tempel Ukuran 5-15 GT.....	135
Gambar 4.8	: Persentase Penggunaan Modal Untuk Jenis Kapal Motor Tempel Ukuran Lebih dari 15 GT.....	136

Gambar 4.9	: Sistem Bagi Hasil Menggunakan Modal Sendiri.....	139
Gambar 4.10	: Sistem Bagi Hasil Menggunakan Modal Pinjaman.....	141
Gambar 4.11	: Sistem Bagi Hasil Menggunakan Pinjaman Kapal Motor.	142
Gambar 4.12	: Sistem Bagi Hasil Menggunakan Pinjaman Kapal Motor dan Modal Logistik Pelayaran.....	143
Gambar 4.13	: Keterkaitan Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan.....	156
Gambar 4.14	: Fasilitas Pokok PPI Karangsong.....	160
Gambar 4.15	: Fasilitas Fungsional PPI Karangsong.....	161
Gambar 4.16	: Industri Pembuatan Kapal Motor Nelayan.....	161
Gambar 4.17	: Permukiman Nelayan di Sekitar Sungai Prajagumiwang..	163
Gambar 4.18	: Perumahan Nelayan Karangsong.....	163
Gambar 4.19	: Peta Lokasi Industri Pembuatan Kapal Motor dan Persebaran Permukiman Nelayan Karangsong.....	165
Gambar 4.20	: Tempat Penjemuran Produk Olahan Ikan.....	166
Gambar 4.21	: Peta Lokasi Industri Pengolahan Ikan.....	167
Gambar 4.22	: Pasar Ikan Higienis Indramayu.....	168
Gambar 4.23	: Peta Pemasaran Ikan Sekitar Wilayah Indramayu.....	170
Gambar 4.24	: Peta Pemasaran Ikan di Luar Wilayah Indramayu.....	171
Gambar 4.25	: Keberadaan PPI Karangsong Menstimulir Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Perikanan Dalam Sistem Bisnis Perikanan.....	182

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Penjelasan Hubungan Keterkaitan Kegiatan Perikanan.....	196
Lampiran B	: Analisis Peluang dan Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Perikanan.....	204
Lampiran C	: Pedoman Wawancara.....	224
Lampiran D	: Kuesioner.....	225
Lampiran E	: Tabel E.1 Biaya dan Hasil Tangkapan Nelayan Pencari Ikan Menggunakan Kapal Motor Ukuran 1-2 GT.....	226
	: Tabel E.2 Biaya dan Hasil Tangkapan Nelayan Pencari Ikan Menggunakan Kapal Motor Ukuran 5-15 GT.....	228
	: Tabel E.3 Biaya dan Hasil Tangkapan Nelayan Pencari Ikan Menggunakan Kapal Motor Ukuran Lebih dari 15 GT.....	229
Lampiran F	: Perhitungan Pendapatan Nelayan Karangsong Menggunakan Sistem Bagi Hasil.....	230
Lampiran G	: Perolehan Nilai Bakul Ikan dan Pedagang Pengecer.....	260
Lampiran H	: Lembar Asistensi Tesis.....	262

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi wilayah pesisir kelautan berkaitan dengan sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat mendorong pertumbuhan wilayah melalui kegiatan perikanan, industri pertambangan minyak dan gas bumi bawah laut, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, transportasi, pelabuhan, permukiman serta kegiatan jasa ikutan lainnya. Menurut Parr (1999) dalam Nurgoho dan Dahuri (2004:49), pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan yang terpadu antar sektor dengan memperhatikan aspek keruangan.

Soegiarto (1976) dalam Dahuri et.al. (2001:8) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas daratan meliputi bagian kering maupun yang terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut dan perembesan air laut. Sebaliknya ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 114 km yang merupakan garis pantai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Secara umum Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah pertanian juga sebagai daerah nelayan/maritim. Lebih dari

45 % produksi perikanan laut Jawa Barat dipasok dari hasil nelayan di Kabupaten Indramayu (Diskanla Kabupaten Indramayu, 2005).

Permintaan kebutuhan pasokan ikan dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Indramayu telah menggerakkan pertumbuhan perekonomian wilayah dari sub- sektor perikanan, hal ini dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah. Menurut Adisasmita (2005:18) untuk menciptakan suatu sistem pembangunan ekonomi daerah yang mandiri dalam arti berkecukupan dan berkelanjutan dilakukan dengan pendekatan kebijakan pembangunan pada kekhasan lokal yang memanfaatkan sumber daya alam lokal, sumber daya institusional lokal dan kelembagaan yang dimiliki.

Kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Indramayu sebagai pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah pengembangan Kawasan PPI Karangsong di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu. Sebagai wujud kebijakan pengembangan perikanan tangkap telah dikembangkan fasilitas pelabuhan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelalangan ikan (TPI) di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur fasilitas PPI Karangsong mulai di bangun pertengahan tahun 2003, dimaksudkan untuk mengembangkan suatu sentra produksi perikanan tangkap lengkap dengan kegiatan pengolahan dan jasa lainnya.

Hal ini menjadikan kawasan PPI Karangsong sebagai fungsi ekonomi dalam pertumbuhan wilayah. Menurut Rais et.al (2004:44) fungsi ekonomi yang di maksud merupakan kebijakan secara makro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai pertumbuhan kawasan ekonomi berdasarkan karakter yang di-miliki setiap

kelompok perairan yang dapat diperkirakan sebagai arahan komoditi unggulan, kebutuhan infrastruktur, arahan kelembagaan, arahan jaringan pemasaran produk ataupun perkiraan tingkat kerawanan bencana.

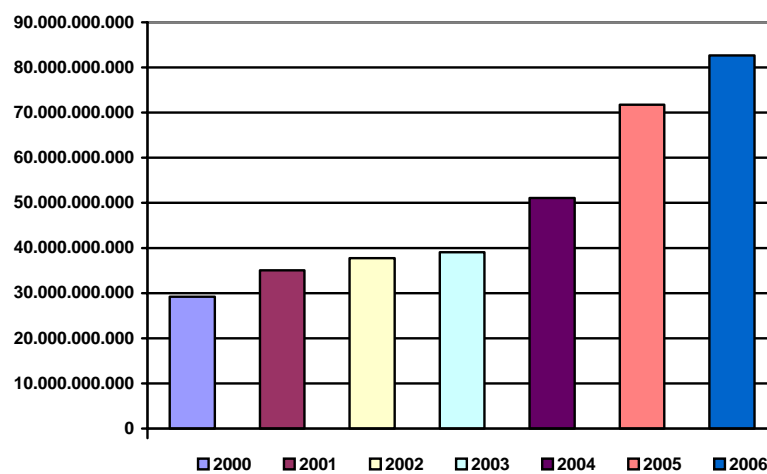
Keberadaan tempat pelalangan ikan (TPI) Karangsong sudah berjalan sejak dulu sebagai tempat pendaratan dan pelelangan ikan oleh masyarakat nelayan Desa Karangsong, mengingat lokasinya yang strategis dan dekat dengan pusat Kota Indramayu serta ditunjang oleh prasarana jaringan jalan yang memadai menjadikan TPI Karangsong menjadi peluang dalam pengembangannya.

Kondisi eksisting PPI Karangsong tidak lepas dari adanya peranan Sungai Prajagumiwang yang berfungsi sebagai alur pergerakan keluar masuk kapal motor atau perahu. PPI Karangsong letaknya masuk ke bagian dalam wilayah dari bibir pantai, fasilitas pelabuhan dan tempat pelelangan ikan terletak sekitar ± 1 km dari garis pantai.

Hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPI Karangsong terdiri dari jenis ikan besar dan ikan kecil, diantara jenis ikan tersebut terdapat jenis komoditas ekspor seperti kakap merah, kakap putih dan cumi-cumi. Jenis ikan yang mempunyai nilai produksi tertinggi yakni ikan tongkol. Perkembangan nilai produksi yang dihasilkan oleh PPI Karangsong pada tahun 2000 sebesar Rp 29.266.249.100 dan pada tahun 2004 mencapai Rp 51.088.371.600. (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2005).

Secara ekonomi wilayah peningkatan nilai PDRB dari sub sektor perikanan, yakni pada tahun 2001 sebesar Rp 697.723,07 dan pada tahun 2005 mencapai nilai Rp 1.485.347,82 (BPS Kabupaten Indramayu, 2006). Ini menunjukkan bahwa hasil

potensi sumber daya perikanan dan kelautan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Indramayu. Dari hasil nilai produksi tangkapan nelayan Karangsong yang berlangsung dari Tahun 2000 hingga Tahun 2006 menunjukkan peningkatan. Perkembangan nilai produksi yang tinggi sebesar 40,30 % terjadi pada tahun 2005, adapun nilai hasil produksi Tahun 2006 sebesar sebesar Rp 82.689.578.500. Untuk selengkapanya perkembangan nilai produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPI Karangsong ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut ini.



Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2007

GAMBAR 1.1
PERKEMBANGAN NILAI PRODUKSI HASIL TANGKAPAN IKAN
YANG DIDARATKAN DI PPI KARANGSONG

Keberadaan PPI Karangsong sebagai kegiatan perikanan telah membentuk transformasi, yakni terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut Djojohadikusumo (1994:2), pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas merupakan peningkatan produksi dan pendapatan tanpa terwujudnya pembangunan. Masyarakat nelayan sekitar Desa Karangsong dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan

pencari ikan, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun permasalahan perekonomian masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut baru dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu seperti juragan kapal dan pengusaha perikanan (pemilik modal).

Menurut Kusnadi (2002:202) terdapat beberapa faktor yang kompleks dan terkait dalam tekanan-tekanan sosial ekonomi yang di hadapi oleh nelayan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor alamiah dan non- alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim penangkapan dan keterbatasan sumber daya manusia. Faktor non-alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, modal, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti.

Faktor kendala dalam kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan Karangsong diantaranya faktor permodalan, musim tangkapan, daerah tangkapan nelayan dan jenis armada yang digunakan. Terkait dalam hal permodalan, masyarakat nelayan Karangsong sebagian besar bekerjasama dengan pihak pemilik modal (juragan) hal ini dilakukan oleh sebagian besar nelayan pencari ikan disebabkan adanya keterbatasan modal, baik permodalan yang bersumber untuk keperluan logistik pelayaran maupun modal untuk memiliki sarana alat tangkap karena mahalny harga sarana alat tangkapnya.

Kerjasama permodalan dalam kegiatan penangkapan ikan antara nelayan pencari ikan dan pemilik modal membuat ketidakberdayaan sebagian nelayan Karangsong, karena dalam sistem bagi hasil pendapatan yang berlangsung cenderung merugikan bagi pihak nelayan. Beberapa kendala lainnya (musim

tangkapan dan jenis armada alat yang digunakan) juga dapat berpengaruh pada hasil pendapatan nelayan Karangsong.

1.2. Rumusan Masalah

Pengembangan Kawasan PPI Karangsong sebagai pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan, memiliki kegiatan unggulan dari hasil produktivitas sektor perikanan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, yakni dengan adanya peningkatan hasil produksi penangkapan ikan. Adanya aktivitas yang berlangsung pada Kawasan PPI Karangsong yakni memicu terbentuknya sistem bisnis per-ikanan yang mempunyai hubungan keterkaitan (ke belakang dan ke depan) dan dampak pengganda berupa terbukanya peluang tenaga kerja, menciptakan nilai pendapatan dan membuka peluang usaha pada sektor kegiatan lain, yang selanjutnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat nelayan pada umumnya.

Keberhasilan dalam upaya pertumbuhan Kawasan PPI Karangsong sebagai kegiatan ekonomi perikanan pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan ekonomi lokal. Menurut Blakely dalam Nurzaman (2002:7), menyatakan bahwa konsep pembangunan ekonomi lokal ditekankan pada penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal dengan memanfaatkan sumberdaya (alam, manusia, modal) setempat yang merupakan upaya bersama antara masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta untuk mencapai keunggulan kompetitif dari wilayah lokal tersebut.

Kegiatan perikanan membentuk rantai nilai yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan hasil produksi dan nilai pendapatan yang diciptakan oleh hubungan keterkaitan yang berlangsung pada kegiatan hulu dan hilir. Hubungan keterkaitan dalam kegiatan

perikanan membentuk interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Adanya hubungan interaksi tersebut memberikan implikasi pada pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan yang berlangsung pada Kawasan PPI Karangsong.

Fenomenalogis yang menggambarkan permasalahan penelitian, terkait kendala dalam produktivitas kegiatan perikanan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dalam menciptakan nilai pendapatan terjadi pada nelayan pencari ikan dan buruh nelayan. Mengingat pelaku usaha yang mendominasi dalam kegiatan perikanan adalah nelayan, sementara stratifikasi nelayan Karangsong yang terjadi bukanlah suatu entitas tunggal, melainkan terdiri dari beberapa kelompok yang dapat dibedakan oleh kondisi kemampuan permodalan, selain itu terjadi ketimpangan dalam sistem bagi hasil pendapatan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik/pemodal (juragan).

Adanya kondisi permasalahan penelitian dalam produktivitas kegiatan perikanan merupakan peluang dan tantangan dalam upaya pengembangan PPI Karangsong sebagai kawasan ekonomi perikanan yang menjadi sentra kegiatan perikanan di Kecamatan Indramayu.

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian (*research question*) dalam penulisan Tesis ini adalah: **“Sejauhmana implikasi keberadaan PPI Karangsong terhadap Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Perikanan dan bagaimana merumuskan strategi pengembangan kawasan ekonomi perikanan”**.

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1. Tujuan

Didasari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini mengkaji implikasi keberadaan PPI terhadap pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu dan merumuskan strategi pengembangan kawasan ekonomi perikanan.

1.3.2. Sasaran Studi

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Identifikasi kondisi fasilitas PPI dan TPI Karangsong;
2. Identifikasi pelaku usaha dan jenis kegiatan perikanan;
3. Analisis Keterkaitan rantai nilai Kegiatan Perikanan;
4. Analisis keterkaitan dan dampak pengganda kegiatan perikanan;
5. Analisis implikasi keruangan kegiatan perikanan;
6. Merumuskan strategi pengembangan kawasan ekonomi perikanan.

1.4. Manfaat Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara praktis; dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan ekonomi yang berlangsung di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal di sekitar PPI Karangsong;
2. Secara akademis; hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pihak-pihak lain terkait dengan fenomena

kegiatan pesisir kelautan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi lokal secara mandiri.

3. *Stakeholders*; dalam memanfaatkan potensi sumber daya pesisir kelautan dilakukan secara bijaksana dan memperhatikan kondisi fisik alam, sosial budaya dan kearifan lokal demi kelangsungan dalam pemanfaatan potensi sumber daya pesisir kelautan.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup substansi yang akan dibahas dalam studi ini dibatasi pada kegiatan perikanan yang diidentifikasi mempunyai hubungan keterkaitan (ke belakang dan ke depan) antara hulu dan hilir yang berimplikasi pada aspek keruangan serta mengkaji peluang dan tantangan pengembangan kawasan ekonomi perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal di masyarakat Desa Karangsong. Secara lebih rinci lingkup materi studi ini adalah:

1. Mengidentifikasi fasilitas utama dan fasilitas fungsional PPI Karangsong yang difokuskan pada keberadaan element fasilitas PPI Karangsong;
2. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong dan difokuskan pada pelaku usaha dalam kegiatan perikanan serta proses mekanisme pelelangan ikan;
3. Kegiatan perikanan mempunyai hubungan keterkaitan rantai nilai dan dampak pengganda yang ditimbulkan oleh kegiatan perikanan. Hubungan keterkaitan difokuskan pada pelaku usaha kegiatan perikanan tangkap.

4. Mengkaji pertumbuhan kawasan ekonomi perikanan yang ditekankan pada hasil nilai pendapatan kelompok nelayan dan peningkatan hasil produksi dan nilai produksi perikanan tangkap;
5. Implikasi keruangan kegiatan perikanan yang berlangsung pada kegiatan hulu dan hilir.
6. Peluang dan tantangan pengembangan kawasan ekonomi perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu.

1.5.2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial dan obyek penelitian yang diambil dalam studi ini adalah kegiatan perikanan yang berlangsung pada PPI Karangsong. Secara administratif Kawasan PPI Karangsong terletak di Desa Karangsong berada di Kecamatan Indramayu. Secara geografis Desa Karangsong berada di utara pesisir pantai Indramayu, sebagian besar wilayahnya merupakan lahan tambak dan jarak ke pusat ibu kota Kabupaten Indramayu \pm sekitar 4,5 km.

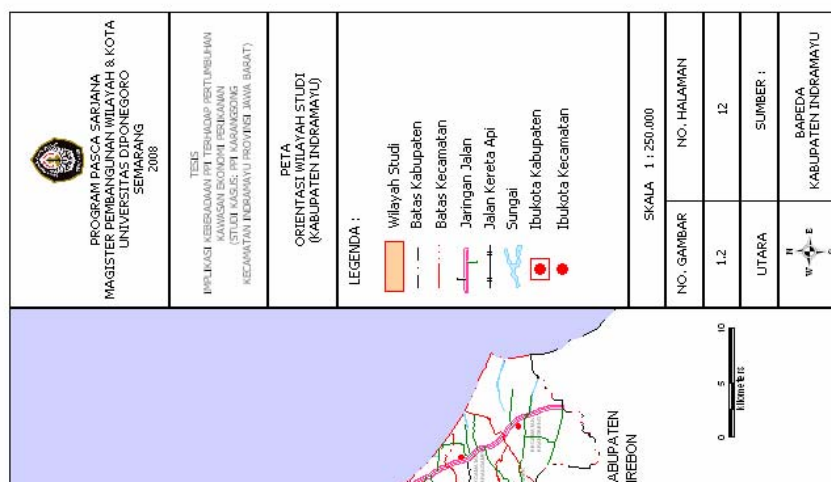
Untuk jelasnya lingkup spasial dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada peta orientasi wilayah penelitian Gambar 1.2 (Kabupaten Indramayu) dan Gambar 1.3 (Kecamatan Indramayu).

1.6. Kerangka Pikir

Keberadaan PPI Karansong sebagai aktivitas perekonomian pesisir kelautan merupakan suatu fenomena yang menggembirakan dalam mendukung per-tumbuhan

perekonomian wilayah Kabupaten Indramayu. Adanya potensi sumber daya kelautan sebagai penghasil komoditas penangkapan ikan oleh para nelayan memberikan kontribusi pendapatan bagi peningkatan nilai produksi yang pada akhirnya dapat memberikan masukan pada pendapatan daerah Kabupaten Indramayu.

Kegiatan perikanan tangkap terdapat pelaku usaha yang mempunyai hubungan keterkaitan (ke belakang dan ke depan) dan berdampak ganda bagi tumbuhnya lapangan usaha serta membuka lapangan pekerjaan yang terkait dalam mendukung usaha kegiatan perikanan tangkap, seperti industri pembuatan sarana alat tangkap berupa kapal motor dan industri olahan ikan serta pemasaran hasil produksi hasil tangkapan. Hal ini diharapkan keberadaan Kawasan PPI Karangong dapat memicu pembangunan ekonomi lokal di sekitar masyarakat Desa Karangsong.

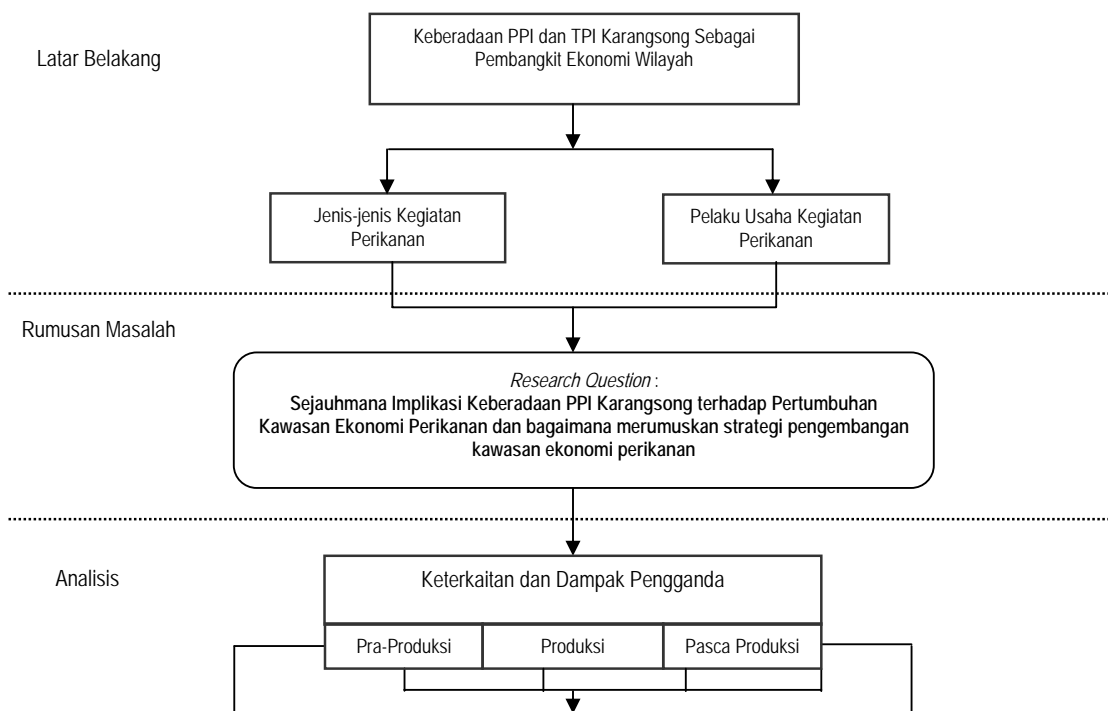


 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008</p>	<p>TEKS</p> <p>INPLAKSI KEBERSIHAN PM TERHADAP PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI PERKOTAAN KAWASAN PERUMAHAN KABUPATEN INDRAMAYU (PROVINSI JAWA BARAT)</p>	
	<p>PETA</p> <p>ORIENTASI WILAYAH STUDI (KABUPATEN INDRAMAYU)</p>	
	<p>LEGENDA :</p> <p>Wilayah Penelitian</p> <p>Batas Kecamatan</p> <p>Batas Desa</p> <p>Jaringan Jalan</p> <p>Sungai</p>	
	<p>SKALA 1 : 50.000</p>	
	<p>NO. GAMBAR</p> <p>1.3</p> <p>UTARA</p> <p>N W E S</p>	<p>NO. HALAMAN</p> <p>13</p> <p>SUMBER :</p> <p>BAPEDA KABUPATEN INDRAMAYU</p>

Kawasan PPI Karangsong merupakan wilayah fungsional yang di-kembangkan untuk sentra kegiatan perikanan, saat ini mengindikasikan terjadinya pertumbuhan kawasan ekonomi, hal ini dapat diidentifikasi oleh adanya pe-ningkatan hasil produksi dan nilai pendapatan bagi pelaku usaha kegiatan perikanan

Adanya keterkaitan dalam kegiatan perikanan sebagai sistem produksi antara kegiatan hulu dan hilir kemudian dilakukan analisis implikasi keruangan oleh

adanya kegiatan perikanan serta mengkaji peluang dan tantangan dalam pengembangan kawasan ekonomi perikanan. Secara skematis diagram kerangka pemikiran studi dapat di lihat pada Gambar 1.4.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.4
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

1.7.1. Pendekatan Studi

Metode penelitian merupakan satu kesatuan tentang bagaimana peneliti melakukan penelitiannya, yang terdiri dari prosedur dan teknik. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, selanjutnya teknik penelitian merupakan alat-alat pengukur, apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitian yang

dikemukakan Nazir (2003:44) adalah untuk memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

Dalam studi ini akan di bahas mengenai keberadaan PPI Karangsong yang menstimulir kegiatan ekonomi perikanan dalam sistem bisnis perikanan yang berlangsung di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu ditinjau dari hubungan keterkaitan rantai nilai dan dampak pengganda serta bagaimana merumuskan strategi pengembangan PPI Karangsong sebagai kawasan ekonomi perikanan dengan melihat peluang dan tantangannya.

Pendekatan metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap semua informasi dan data-data yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran. Menurut Moleong (1993:67), dikatakan bahwa metode pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sementara menurut Brannen (2005:13), penelitian kualitatif mengacu pada konsep dan kategori dengan tujuan yang bersifat teoritis khususnya dalam pengujian teori dalam suatu studi kasus. Sementara dalam pendekatan kuantitatif seperti yang dikemukakan Bulmer (1979) dalam Brannen (2005:13) tujuannya adalah untuk mendukung hasil deskriptif dari kompilasi data yang akan dianalisis.

Penentuan variabel dalam pendekatan studi diperoleh dari hasil perumusan sintesis kajian teori. Hipotesis tersebut berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dalam suatu variabel, selanjutnya menurut Nazir (2003:123) variabel merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai dan sebaliknya konsep dapat diubah menjadi variabel. Menurut Singarimbun (1985:14) hipotesis dapat

diubah menjadi data (observasi) dengan menginterpretasikan hipotesa tersebut menjadi sesuatu yang dapat diamati dengan penyusunan alat pengukur termasuk penyusunan skala dan penentuan sampel dengan menjelaskan peng-ukuran melalui penyederhanaan informasi dan perkiraan parameter, observasi dapat diubah menjadi informasi yang lebih umum yakni generelasi empiris.

Pendekatan studi untuk menentukan variabel penelitian diperoleh dari hasil pendekatan secara teoritis dan empiris. Konsep pendekatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan perikanan yang berlangsung di beberapa tempat, seperti di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dan kawasan industri perikanan terpadu di Bojonegoro Provinsi Banten. Sementara pendekatan empiris diperoleh dari hasil pemetaan di lapangan terhadap kegiatan perikanan yang berlangsung di Kawasan PPI Karangsong, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nazir (2003:55) bahwa untuk memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang diterangkan dalam hubungan-hubungan dan prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari penelitian yang akan dipecahkan.

1.7.2. Data Penelitian

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik data kualitatif yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan dan kata-kata, maupun data kuantitatif, yakni data yang berwujud angka-angka yang menunjukkan fakta. Kebutuhan data yang diperlukan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian yang sudah tersaji dalam dokumen atau laporan tertulis hasil survei dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh

instansi terkait, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi dan survei langsung di lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket atau daftar pertanyaan (kuesioner) pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Data-data penelitian dalam kajian studi ini meliputi:

1. Fasilitas PPI Karangsong, merupakan data-data elemen fasilitas pokok dan fungsional yang berhubungan dengan Kawasan PPI Karangsong. Jenis data ini diperoleh melalui pengamatan/observasi di lapangan dan dari berbagai instansi terkait. Parameter jenis-jenis kegiatan ini untuk mengidentifikasi keberadaan fungsi fasilitas PPI Karangsong.
2. Jenis-jenis kegiatan dan pelaku usaha kegiatan perikanan, merupakan data-data jenis usaha dan pelaku kegiatan yang berhubungan dalam sistem bisnis perikanan. Jenis data ini diperoleh dari data sekunder dan data primer diperoleh melalui pengamatan/observasi di lapangan dan dari berbagai instansi terkait. Parameter jenis-jenis kegiatan ini untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan dalam kegiatan usaha perikanan.
3. Data kelompok kegiatan perikanan, diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, sedangkan data primer dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara di lapangan untuk memperoleh data dan informasi dari daftar pertanyaan yang dikelompokkan menurut kelompok nelayan yang menggunakan armada atau sarana alat tangkap berupa armada atau jenis kapal motor berdasarkan ukuran kapasitas (*Gross Ton*). Parameter ini untuk mengidentifikasi sarana alat tangkap yang digunakan nelayan Karangsong untuk menangkap ikan di laut dan penyerapan tenaga kerjanya.

4. Data hasil produksi dan nilai produksi perikanan tangkap, diperoleh dari instansi terkait. Parameter data produksi perikanan tangkap digunakan untuk mengetahui perkembangan dan kualitas pemasaran hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPI Karangsong.
5. Data biaya produksi dan pendapatan, diperoleh dari data primer dengan cara wawancara dan mengisi angket dari daftar pertanyaan (kuesioner) terhadap kelompok kegiatan masyarakat nelayan. Parameter biaya produksi digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan permodalan dan pendapatan kelompok nelayan.
6. Data sebaran fasilitas PPI dan jaringan pemasaran yang mendukung kegiatan perikanan, merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, adapun data dan informasi yang tidak diperoleh dari data sekunder diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Parameter data sebaran fasilitas PPI dan TPI untuk mengidentifikasi hubungan interaksi keruangan terkait aktivitas hulu dan hilir dalam kegiatan perikanan.

Secara ringkas kebutuhan data berdasarkan tujuan dan sasaran studi dimaksud dapat di lihat pada Tabel I.1.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam studi ini diperoleh dengan cara menyeleksi data yang paling tepat sehingga benar-benar di dapat data yang valid dan reliabel. Data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan disebut sebagai data primer sedangkan data yang sifatnya sudah tersaji dalam dokumen yang

tertulis disebut data sekunder. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dan wawancara.

1.7.3.1 Angket (Kuesioner)

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna dengan tujuan mencari informasi lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. (Riduwan, 2004:99).

TABEL I.1
DATA PENELITIAN

Sasaran Penelitian	Output	Analisis	Data	Jenis Data	Sumber	Cara Memperoleh
Mengidentifikasi fasilitas PPI dan TPI Karangsang	Teridentifikasinya elemen fasilitas yang ada di Kawasan PPI Karangsang	Deskriptif	Fasilitas pokok PPI Fasilitas fungsional PPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bapeda ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ KPL Mina Sumitra ▪ Survey 	Menyeleksi dokumen pada instansi terkait dan pengamatan di lapangan.
Mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan pelaku kegiatan perikanan tangkap	Teridentifikasinya jenis-jenis usaha dan pelaku kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsang.	Deskriptif	Jenis-jenis dan pelaku usaha yang terkait dalam mendukung kegiatan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ KPL Mina Sumitra ▪ Survey 	Menyeleksi dokumen pada instansi terkait dan pengamatan di lapangan serta wawancara.
Mengkaji keterkaitan dan dampak pengganda kegiatan perikanan tangkap	Teridentifikasinya hubungan keterkaitan dan dampak pengganda jenis-jenis usaha perikanan.	Deskriptif	Pelaku usaha kegiatan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ KPL Mina Sumitra ▪ Survey 	Menyeleksi dokumen pada instansi terkait dan wawancara.
Mengkaji pertumbuhan kawasan kegiatan perikanan tangkap.	Teridentifikasinya tingkat pendapatan antar kelompok nelayan dan peningkatan hasil produksi ikan untuk mengetahui kualitas pemasaran ikan di PPI Karangsang.	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil nilai tangkapan Ikan ▪ Biaya produksi penangkapan ikan ▪ Produksi dan Nilai produksi tangkapan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ KPL Mina Sumitra ▪ Survey 	Menyeleksi dokumen pada instansi terkait, wawancara dan penyebaran angket.
Mengkaji hubungan keruangan kegiatan perikanan tangkap	Teridentifikasinya implikasi keruangan kegiatan perikanan.	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebaran fasilitas PPI ▪ Jaringan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ KPL Mina Sumitra ▪ Survey 	Menyeleksi dokumen pada instansi terkait dan wawancara.
Mengkaji peluang dan tantangan kegiatan perikanan tangkap	Strategi pengembangan kawasan ekonomi perikanan.	SWOT	Potensi dan kendala hasil pengamatan di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ KPL Mina Sumitra ▪ Survey 	Menyeleksi dokumen pada instansi terkait dan pengamatan di lapangan

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Daftar pertanyaan dalam penelitian dilakukan dengan membuat sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator yang berhubungan dengan beberapa variabel penelitian. Angket yang disajikan dalam penelitian ini dalam bentuk angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendaknya, sedangkan angket tertutup merupakan angket dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga responden diminta untuk memilih jawaban sesuai dengan karakteristiknya.

1.7.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi arus informasi yang diterima untuk mengetahui hal-hal secara lebih mendalam dari sumbernya yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara (Riduwan 2004:102).

Wawancara ini dapat dilakukan di kesempatan waktu pada saat penyebaran angket atau di waktu khusus/situasi tertentu. Teknik wawancara ini dilakukan cara wawancara bebas terpimpin dengan menyiapkan daftar pedoman pertanyaan yang berisi uraian pertanyaan penelitian secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga diharapkan dalam proses wawancara dapat berjalan dengan baik.

1.7.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2003:271). Selanjutnya menurut Riduwan (2004:55) populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sesuai dengan ruang lingkup wilayah yang diambil dalam studi ini, maka jumlah populasi yang akan dijadikan dasar pengambilan sampel adalah jumlah jenis sarana alat penangkapan ikan berupa kapal motor/perahu.

Sugiono (2005:49) dan Arikunto dalam Riduwan (2004:56) mengatakan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan dapat mewakili seluruh populasi, misalnya penduduk di wilayah tertentu. Menurut sampel adalah bagian perhitungan jumlah sampel (apabila populasi sudah diketahui), menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} \dots\dots\dots(1-1)$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d² = presisi yang ditetapkan atau derajat kecermatan

Nilai derajat kecermatan yang diambil dalam studi ini adalah sebesar 10%, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap studi adalah sebesar 90%.

Adapun pengambilan sampel bertingkat (berstrata) menggunakan rumus:

$$\boxed{n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n} \dots\dots\dots(1-2)$$

Dimana:

n_i = jumlah sampel menurut stratum

n = jumlah sampel seluruhnya

N_i = jumlah populasi menurut stratum

N = jumlah populasi seluruhnya

Langkah-langkah penentuan jumlah sampel (1-1) sebelumnya diketahui terlebih dahulu jumlah populasi dari hasil perhitungan seperti pada penggunaan rumus populasi (1-2).

Untuk menentukan jumlah sampel, dilakukan dengan pendekatan pada penggunaan armada atau sarana alat tangkap yakni kapal motor nelayan berdasarkan ukuran kapasitas (*Groos* Ton).

Jumlah armada kapal motor yang beroperasi di PPI Karangsang terdapat 616 kapal motor dari berbagai jenis ukuran, selanjutnya jumlah sampel kapal motor dari berbagai ukuran tersebut di cari sampel berdasarkan strata yakni untuk mengklasifikasikan jenis kapal motor menurut kapasitas yang terdiri dari ukuran kapasitas 1-2 GT, 5-15 GT dan lebih dari 15 GT, seperti pada Tabel I.2.

TABEL I.2
JENIS ARMADA KAPAL MOTOR NELAYAN KARANGSONG

No.	Jenis Armada	Kapasitas (GT)	Alat Tangkap	Jumlah
1.	Kapal motor tempel	1 – 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaring udang ▪ Jaring Rajungan ▪ Otok ▪ Arad 	284
2.	Kapal motor	5 – 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pancing ▪ Jaring Rampus 	144
3.	Kapal motor	> 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaring Nylon 	188
Jumlah				616

Sumber: KPL Mina Sumitra, 2006

Nilai derajat kecermatan yang diambil dalam studi ini adalah sebesar 10%, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap studi adalah sebesar 90%.

Penentuan sampel untuk mencari jumlah sampel armada kapal motor menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{616}{(616)(0,1^2) + 1} = \frac{616}{7,16} = 86 \text{ sampel}$$

Kemudian di cari pengambilan berstrata menggunakan formulasi sebagai berikut:

a. Kapal Motor Tempel Ukuran 1-2 GT : $n_i = \frac{N_i}{N} . n = \frac{284}{616} \times 86 = 40 \text{ sampel}$

b. Kapal Motor Ukuran 5-15 GT : $n_i = \frac{N_i}{N} . n = \frac{144}{616} \times 86 = 20 \text{ sampel}$

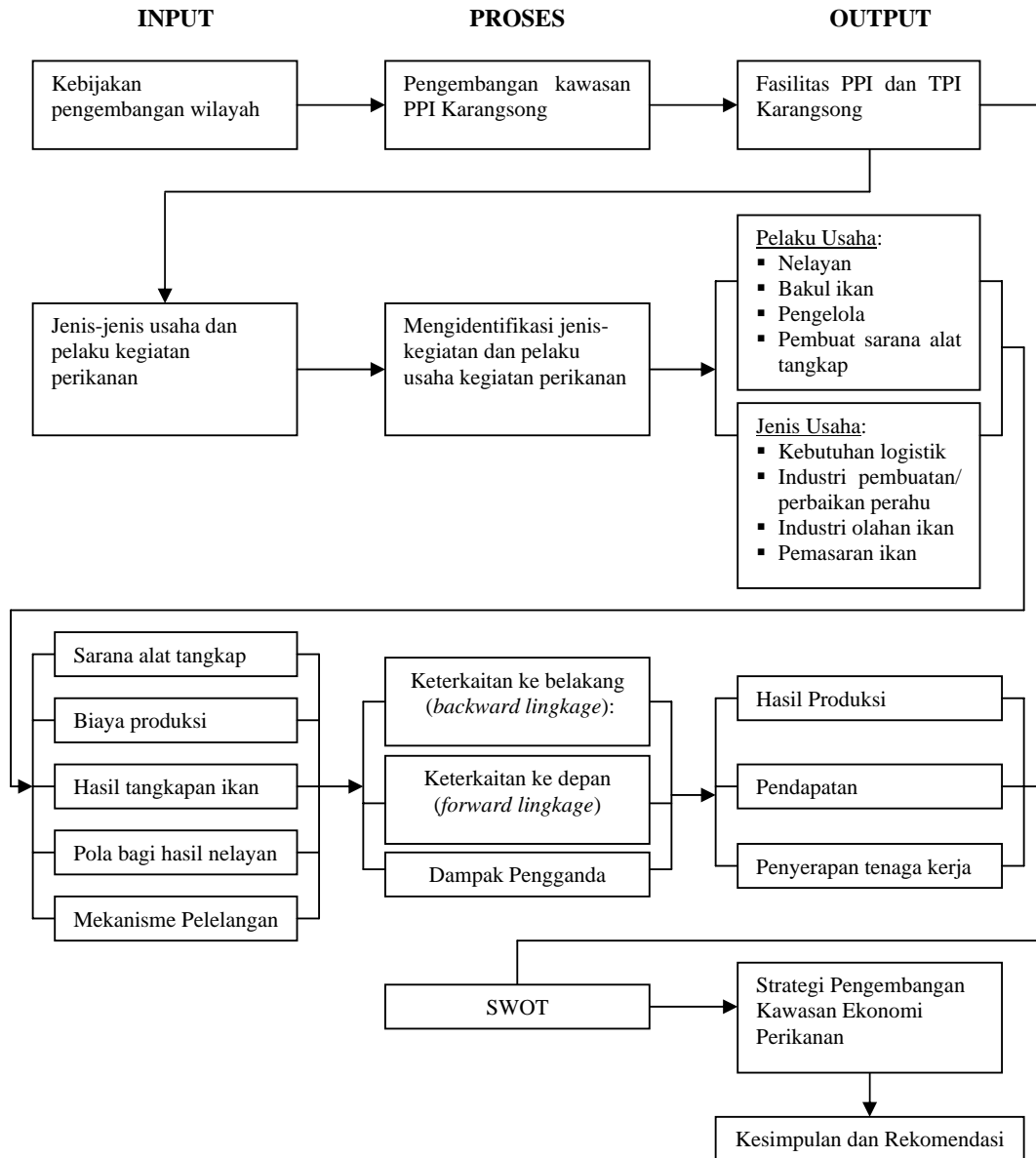
c. Kapal Motor Ukuran < 15 GT : $n_i = \frac{N_i}{N} . n = \frac{188}{616} \times 86 = 26 \text{ sampel}$

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan data atau bahan keterangan mengenai suatu keadaan diurai dan diselidiki hubungannya satu sama lain (Warpani, 1984:1). Tujuan analisa adalah untuk menyederhanakan data-

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi (Singarimbun, 1981:213). Teknik analisis data ini dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian serta untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan. Adapun jenis analisis yang dipergunakan dalam mencapai tujuan penelitian melalui sasaran-sasaran penelitian yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui kerangka analisis pada studi ini dapat di lihat pada Gambar 1.5.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.5
KERANGKA ANALISIS

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup spasial, kerangka pemikiran. Di sini juga dikemukakan pendekatan dan pelaksanaan studi dan sistematika penulisan.

BAB II PERTUMBUHAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN

Bab II menjelaskan landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam penyusunan studi yang meliputi kajian pertumbuhan kawasan, teori basis ekonomi yang mengkaji analisis keterkaitan dan dampak pengganda serta hubungan keruangan, rantai nilai, di sini juga melakukan pendekatan studi kasus terhadap tinjauan kawasan industri perikanan berupa fasilitas pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, serta kegiatan masyarakat pesisir yang mengkaji kelompok masyarakat nelayan, permodalan, biaya dan pola bagi hasil pendapatan serta sintesis kajian teori.

BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN GAMBARAN UMUM KEGIATAN PERIKANAN DI KAWASAN PPI KARANGSONG

Bab ini berisi tentang tinjauan kebijakan pengembangan perikanan dan menjelaskan kondisi umum wilayah studi dan menjelaskan hasil identifikasi kondisi kegiatan perikanan dan operasional pelabuhan pen-daratan ikan.

BAB IV ANALISIS KEGIATAN USAHA PERIKANAN DI KAWASAN PPI KARANGSONG

Bab ini berisikan analisis dan temuan-temuan dari penelitian untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian, yakni identifikasi jenis-jenis kegiatan usaha perikanan tangkap, analisis hubungan keterkaitan dan dampak pengganda, analisis pertumbuhan kawasan ekonomi yang meliputi analisis nilai pendapatan pada kelompok kegiatan perikanan dan peningkatan produksi perikanan, analisis hubungan implikasi keuangan kegiatan perikanan serta sintesis temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengemukakan kesimpulan hasil analisis yang menjawab pertanyaan penelitian dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian.

BAB II

PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI PERIKANAN

Tinjauan teori ini di buat untuk memberikan landasan teoritis pada penelitian yang berisikan teori-teori yang merepresentasikan kegiatan penelitian dan digunakan sebagai dasar penentuan variabel-variabel penelitian. Tinjauan teoritis ini merupakan upaya untuk memahami permasalahan dalam penelitian.

Menurut Nazir (2003:93) tinjauan teori atau kajian pustaka bertujuan untuk menggali teori-teori yang berkembang dalam ilmu yang berkepentingan dan memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan penelitian sekaligus mencari metoda-metoda serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, juga memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih dan menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan.

2.1. Pertumbuhan Kawasan

Kontekstual pemahaman pertumbuhan kawasan dalam kajian pustaka ini adalah melihat keberadaan Kawasan PPI Karangsang yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai sentra kegiatan perikanan. Sebagai wujud kebijakan pengembangan perikanan telah dikembangkan fasilitas pelabuhan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelalangan ikan (TPI) di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur di kawasan PPI Karangsang dimaksudkan untuk mengembangkan fasilitas utama dan pendukung dalam kegiatan perikanan. Selain itu, dilakukan pendekatan kajian atau studi kasus terhadap kegiatan industri perikanan di beberapa tempat lokasi. Untuk memahami tentang pertumbuhan suatu kawasan akan

diuraikan masing-masing definisi atau pengertian pertumbuhan dan kawasan di bawah ini.

2.1.1. Definisi Pertumbuhan

Istilah pertumbuhan dan perkembangan sesungguhnya tidak bermakna sama. Menurut Parr dalam Dahuri (2004:49), perkembangan senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengembangan keputusan di dalam ataupun yang memengaruhi suatu wilayah. Representasi dari suatu proses pengembangan keputusan ini dapat diaktualisasikan pada suatu kondisi terhadap kebijakan pengembangan perikanan Kabupaten Indramayu yang mengembangkan PPI Karangsong sebagai kegiatan perikanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Parr dalam Dahuri (2004:49), mengemukakan bahwa suatu wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor dan teori tahapan perkembangan. Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah atau perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, utilitas, publik).

Menurut Djojohadikusumo (1994:3), ciri pokok dalam proses pertumbuhan yang menyangkut peningkatan produksi dan pendapatan terdapat dinamika yang menyebabkan faktor perubahan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang

berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Hubungannya ditunjukkan dengan perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain.

Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas yaitu peningkatan produksi dan pendapatan yang dapat berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. (Djojohadikusumo, 1994:2).

Pertumbuhan dalam pendekatan permintaan terjadi sebagai akibat adanya permintaan barang dan jasa tertentu terhadap suatu wilayah oleh wilayah lainnya. Upaya memenuhi permintaan ekspor tersebut dengan menggerakkan potensi dan sistem produksi lokal akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi permintaan luar wilayah dapat dipenuhi berarti semakin tinggi pula aktivitas ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan wilayah berdasarkan pendekatan wilayah yang sangat umum dikenal adalah teori pertumbuhan berbasis ekspor (Nugroho dan Dahuri, 2004:57)

Berdasarkan uraian kajian tersebut, bahwa produksi dan nilai produksi hasil kegiatan perikanan yang berlangsung di Kawasan PPI Karangsong sebagai sarana pelabuhan pendaratan ikan (PPI) maupun tempat pelelangan ikan (TPI), saat ini telah menunjukkan indikasi pertumbuhan sebagai kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Yang dimaksud kegiatan utama merupakan kegiatan hulu berupa pe-nangkapan ikan, sedangkan kegiatan hilir merupakan bagian kegiatan pendukung yang dimulai dari persiapan sampai pada pemasaran hasil produksi kegiatan perikanan.

Sebagai studi kasus hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bustami Mahyuddin tahun 2001, pada kajian pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu Provinsi Jawa Barat. Menunjukkan bahwa peranan pelelangan ikan dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Menurut Mahyuddin (2001), tinjauan kajian pendapatan nelayan menunjukkan apakah betul keberadaan tempat pelelangan ikan dapat menaikkan nilai jual ikan yang diperoleh nelayan, serta tinjauan kualitas pemasaran ikan yang diperkirakan apakah cukup memadai. Kajian eksistensi pelelangan ikan ditinjau apakah pelelangan ikan itu diperlukan atau tidak. Hal ini ditinjau dari berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi dan aspek sosial-budaya. Tinjauan aspek ekonomi diarahkan kepada keuntungan yang di dapat nelayan apabila mengikuti pelelangan ikan, sedangkan aspek sosial di bahas masalah sosial atau hubungan yang terjadi diantara nelayan akibat adanya aktivitas pelelangan ini, selanjutnya aspek budaya dikaji apakah adanya pelelangan ikan menyebabkan perubahan tingkah laku mereka dalam dunia perikanan.

Sedangkan kajian aplikasi aturan pelelangan ikan ditinjau berdasarkan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pelelangan ikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Menurut Mahyuddin (2001), kontribusi pelelangan ikan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu terhadap produktivitas kapal

perikanan cukup baik. Hal ini memungkinkan Kota Pelabuhanratu sebagai pusat pertumbuhan perekonomian pada bidang perikanan di Kabupaten Sukabumi. Sementara pendapatan nelayan meningkat akibat adanya aktivitas pelelangan ikan di PPN Pelabuhanratu.

2.1.2. Definisi Kawasan

Menurut Adisasmita (2005:127), pendekatan pembangunan sektoral menekankan pada pembangunan masing-masing sektor sesuai dengan potensinya, yang selanjutnya ditentukan prioritasnya. Pendekatan wilayah (*regional*) lebih maju karena mengutamakan keterkaitan pembangunan antar sektor dalam suatu wilayah. Saat ini telah dilontarkan pendekatan pembangunan kawasan.

Kawasan diartikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai fungsi atau aspek fungsional tertentu. Dengan menerapkan pendekatan pembangunan kawasan diharapkan pembangunan dapat lebih interaktif dan responsif secara fungsional sehingga manfaat pembangunan dapat lebih terealisasi dan ke-terbatasan dapat teratasi.

Pendekatan pembangunan wilayah dengan didasarkan pada keunggulan dan potensi wilayah merupakan pendekatan pengembangan kawasan andalan, yaitu kawasan yang diprioritaskan pengembangannya di dalam kawasan budidaya sehingga diharapkan pengembangan kawasan andalan dapat menciptakan sektor unggulan. (Adisasmita, 2005:127).

Selanjutnya Adisasmita (2005:127) menjelaskan sektor unggulan yang dimaksud adalah; (1) sektor yang menghasilkan produksi yang mempunyai kontribusi besar terhadap nilai produksi bruto (PDRB); (2) sektor yang memberikan

lapangan kerja yang besar, dengan demikian akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat; (3) sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*); (4) sektor yang berpotensi meningkatkan ekspor non-migas; (5) sektor yang pada saat sekarang meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil tetapi sektor tersebut memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan pada masa mendatang.

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, kawasan andalan dapat dikelompokkan menjadi kawasan andalan berkembang cepat, berkembang sedang dan berkembang lambat. Tiap kawasan andalan mempunyai konstelasi permasalahan yang berbeda-beda. Strategi pengembangannya harus mencerminkan perbedaan dan harus diupayakan untuk mencapai keseimbangan dengan seluruh program pembangunan. Dengan pendekatan keseimbangan, diupayakan untuk menciptakan keserasian laju pertumbuhan antar kawasan andalan dan wilayah.

Berdasarkan pendekatan kajian teori tentang pemahaman pertumbuhan kawasan, dari penjelasan definisi pertumbuhan dan definisi kawasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta melihat beberapa pendekatan studi kasus yang berorientasi pada suatu aktivitas kawasan industri perikanan, bahwa pertumbuhan kawasan industri perikanan dapat direpresentasikan sebagai peningkatan hasil suatu produk dan pendapatan yang dapat berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan yang dilandasi oleh adanya fungsi kegiatan ekonomi. Seperti yang dikemukakan Rais et.al (2004:44), fungsi ekonomi yang dimaksud merupakan kebijakan secara makro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan

ekonomi berdasarkan karakter yang dimiliki setiap kelompok perairan yang dapat diperkirakan sebagai arahan komoditi unggulan, kebutuhan infrastruktur, arahan kelembagaan, arahan jaringan pemasaran produk ataupun perkiraan tingkat kerawanan bencana.

2.1.3. Kawasan Ekonomi Perikanan

Sektor perikanan saat ini merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan lapangan kerja di saat semakin sempitnya lahan pertanian di wilayah daratan dan semakin tingginya persaingan tenaga kerja di bidang industri dan jasa. Potensi perikanan yang cukup besar di era otonomi daerah membuka peluang untuk dikembangkan guna meningkatkan penyediaan lapangan kerja (Dahuri, 2001).

Hasil dari sektor perikanan banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Ikan segar biasa dikonsumsi untuk makanan sehari-hari baik di lingkungan rumah tangga ataupun di berbagai tempat makan komersil.

Monintja dalam Laapo (2004:31) mengemukakan bahwa pengembangan usaha perikanan secara umum dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, Produk Domestik Regional Bruto, devisa negara, gizi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, tanpa mengganggu atau merusak kelestarian sumberdaya perikanan.

Sebagai studi kasus, kajian yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten dalam mewujudkan kawasan industri pengolahan perikanan Bojonegoro telah mengembangkan konsep kawasan perikanan terpadu di provinsi Banten. Konsep kawasan perikanan terpadu yang dikembangkan

diantaranya; industri pengolahan perikanan, komponen regulasi dan komponen teknis kawasan industri pengolahan hasil perikanan. (www.dkp.banten.go.id)

Terkait dalam industri pengolahan perikanan, meliputi subsektor agribisnis hilir (*Down Stream Agribisnis*) dan sub sektor jasa penunjang (*Supporting Institution*). Sedangkan sub sektor hulu (*Upstream Agribisnis*) berupa kegiatan industri penangkapan ikan dan sub sektor perikanan primer (*On Farm Agribisnis*) berupa kegiatan budidaya yang merupakan sub sektor produksi yang ikut mendukung berkembang pada sub sektor hilir. Pengolahan hasil perikanan sebagai subsektor hilir diharapkan mempercepat proses pembangunan kawasan industri perikanan di sektor hulu dan akan merubah pandangan masyarakat di daerah, baik nelayan dan pembudidaya untuk lebih mengoptimalkan produksi hasil tangkapan maupun budidaya.

Untuk komponen regulasi dalam industri perikanan perlu di dukung oleh unsur regulasi yang mengatur pembuatan kawasan industri perikanan (*Cluster Industry Fisheries*), baik yang bersumber dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengatur tata ruang pembangunan kawasan industri perikanan sehingga unsur yang menjaga stabilitas lingkungan pesisir tetap terjaga atau dari instansi atau Departemen yang berkaitan dengan pengaturan rencana tata ruang kota/kabupaten secara umum. Diantara komponen regulasi yang arahan peng-elolaannya mengatur kawasan industri, antara lain menyiapkan perangkat *zoning regulation* sebagai landasan pembangunan pada kawasan-kawasan yang cepat berkembang.

Komponen teknis kawasan industri pengolahan hasil perikanan, pembangunannya diarahkan pada pengoperasian unit industri pengolahan hasil

perikanan berupa kegiatan pendingin, pembekuan ikan dan pengolahan tradisional (pemindangan, pengasinan, pengeringan dll). Komponen penunjang yang terkait dengan beroperasi komponen industri perikanan antara lain pusat pendaratan ikan, unit perbekalan dan unit penampungan.

Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, aliran listrik dan air bersih sangat penting dalam mendukung industri perikanan. Unsur penyediaan lahan dalam kawasan industri perikanan adalah sebagai berikut: (www.dkp.banten.go.id)

1. Bangunan unit pengolahan ikan;
2. Bangunan unit penyimpanan dan pembekuan *cold storage*;
3. Bangunan pusat pendaratan ikan dan tambat labuh;
4. Bangunan perbekalan nelayan;
5. Bangunan pengelola kawasan;
6. Unit penampungan limbah padat dan drainase limbah cair;
7. Unit perbengkelan;
8. Tempat pelalangan ikan;
9. Pasar ikan
10. Unit Pengelolaan ikan tradisional (pemindangan, pengasinan, pengeringan);
11. Daerah pemukiman nelayan.

Persiapan pembangunan kawasan industri perikanan berupa penyiapan bangunan infrastruktur diharapkan akan menarik *investor* untuk ikut bergabung dan beraktifitas disamping adanya regulasi daerah yang kondusif.

2.2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Adisasmita (2005:15) upaya meningkatkan pembangunan di daerah tidak semata-mata menekankan pada peranan kekuatan luar (*ekternal forces*), tetapi sudah pada saatnya untuk mengutamakan pada peranan kekuatan dari dalam (*internal forces*), yang dilakukan dalam upaya mendorong pengembangan inisiatif dan partisipatif masyarakat yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat.

Konsep pembangunan ekonomi lokal ditekankan pada penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal dengan memanfaatkan sumberdaya (alam, manusia, modal) setempat yang merupakan upaya bersama antara masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta untuk mencapai keunggulan kompetitif dari wilayah lokal tersebut (Blakely dalam Nurzaman, 2002:7).

Pembangunan ekonomi daerah (lokal) merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2005:18).

Menurut Blakely (1994:50), pengembangan ekonomi lokal menitikberatkan pada kebijakan “*endogenous development*”, mendayagunakan potensi sumberdaya manusia, institusional, dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi lokal bersifat *process-*

oriented yaitu merupakan suatu proses melibatkan pembentukan lembaga-lembaga baru, pengembangan industri-industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar baru, transfer teknologi, dan memelihara usaha dan perusahaan baru.

Sebagai motor penggerak dalam pengembangan suatu wilayah dapat menggunakan komoditas-komoditas yang di nilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat lokal, domestik, maupun internasional. Beberapa kriteria mengenai komoditas unggulan, diantaranya (Alkadri ed, 1999:10):

- Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian, artinya komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
- Mempunyai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang yang kuat.
- Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan.
- Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pasokan bahan baku (jika bahan baku di wilayah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
- Memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
- Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.

- Bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, hingga fase kejenuhan atau penurunan.
- Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
- Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan seperti dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, ke-lembagaan serta fasilitas insentif/disinsentif.
- Pengembangannya berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

2.2.1. Analisis Keterkaitan dan Analisis Pengganda

Analisis keterkaitan (*linkage analysis*) menyatakan tingkat ketergantungan antar sektor dan sejauh mana sektor tertentu dipengaruhi dan mempengaruhi sektor lainnya. Kaitan antar sektor dapat diidentifikasi berdasarkan arah penggunaan hasil dan masukkan sebagai kaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*). Sama halnya dengan analisis pengganda, analisis keterkaitan dapat dilakukan terhadap hasil (keterkaitan antar industri), perubahan pendapatan dan kesempatan kerja. (Nugroho dan Dahuri. 2004:66).

Kontekstual dalam analisis keterkaitan pada kegiatan industri perikanan yakni saling terkait dengan komponen-komponen sarana dan prasarana produksi. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dalam kegiatan industri perikanan merupakan pendukung keperluan penangkapan ikan berupa penyediaan beberapa kebutuhan yang perlu dipersiapkan antara lain; keperluan logistik pelayaran, kegiatan perbaikan dan pemeriksaan kapal. Sedangkan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) merupakan pendukung dari hasil produksi perikanan berupa

kegiatan transportasi dalam memasarkan hasil tangkapan ikan dan industri pengolahan ikan.

Selanjutnya kegiatan yang tidak berhubungan dengan tahapan produksi tetapi sebagai efek *multiplier* dari kegiatan utama, diantaranya perumahan nelayan dan penyerapan tenaga kerja di dalam tahapan kegiatan industri perikanan yang terjadi pada kelompok kegiatan masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, bahwa dalam kegiatan industri perikanan memiliki keterkaitan atau saling hubungan antara kegiatan persiapan penangkapan ikan (pra-produksi) sampai pada hasil pemasaran ikan (pasca produksi). Hubungan keterkaitan tersebut menciptakan rantai kegiatan dalam menciptakan nilai tambah yang selanjutnya mendatangkan pendapatan dan menciptakan kesempatan lapangan kerja dari masing-masing tahapan produksi tersebut.

Selanjutnya dijelaskan oleh Adisasmita (2005:28) bahwa aktivitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yakni aktivitas basis dan non-basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non-basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah sifat lokal.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut dan demikian

sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005:28).

Analisis pengganda merupakan faktor penentu (determinan) dari teori basis ekonomi yang melihat pertumbuhan ekonomi dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah lain di luar batas masyarakat ekonomi regional. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan material (bahan) untuk komoditas ekspor akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. (Nugroho dan Dahuri. 2004:66).

Analisis pengganda (*multiplier analysis*) menyatakan tingkat ketergantungan sektor ekonomi. Analisis pengganda dapat dilakukan terhadap hasil, pendapatan dan tenaga kerja. Yang ingin dilihat adalah seberapa jauh perubahan-perubahan dalam hasil, pendapatan dan kesempatan tenaga kerja sebagai akibat perubahan permintaan suatu sektor. (Nugroho dan Dahuri. 2004:66).

Terkait analisis pengganda yang dikemukakan oleh Nugroho dan Dahuri (2004:66), hal ini seperti pada kondisi berlangsungnya aktivitas pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memunculkan jenis-jenis kegiatan masyarakat nelayan antara lain; masyarakat nelayan tangkap atau pencari ikan yang terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh (ABK), serta pedagang pengepul ikan dan pengolah ikan. Berkaitan dengan adanya hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap tersebut dapat menciptakan rantai kegiatan yang mampu memberikan pendapatan ekonomi dan membuka kesempatan lapangan usaha dalam kegiatan perikanan tangkap.

Fenomena yang menggambarkan terjadinya aktivitas tersebut dapat menciptakan efek pengganda yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas industri perikanan, dimana masing-masing pelaku kegiatan masyarakat nelayan saling tergantung satu sama lainnya dengan pelaku kegiatan masyarakat nelayan lainnya. Adanya ketergantungan tersebut tidak lepas oleh adanya faktor permintaan pada hasil produk yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat nelayan yakni produk ikan sebagai salah satu kebutuhan sumber daya protein masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

2.2.2. Wilayah Pasar

Blair (1995:67) menjelaskan wilayah pasar (*market area*) adalah wilayah di mana suatu produk dijual. Pasar merupakan suatu penentu lokasi yang penting. Pasar merupakan suatu variabel, di mana para pembeli berada dalam wilayah yang luas dengan intensitas permintaan yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat-tempat lainnya. Pihak perusahaan berusaha memasuki pasar dan melayani permintaan yang sebesar-besarnya. (Glasson, 1983:104)

Menurut Blair (1995:73) besarnya wilayah pasar ditentukan oleh tiga faktor sebagai berikut: (a) Skala ekonomi, barang dan jasa yang mempunyai skala ekonomi yang tinggi; (b) *demand density* (tingkat kepadatan penduduk dan pendapatan perkapita); (c) biaya transportasi, biaya transportasi yang tinggi akan menimbulkan harga jual yang tinggi pula, dan pada akhirnya bisa memperkecil wilayah pasar.

Terkadang produsen memilih berkonsentrasi di bidang produksi saja dan menyerahkan kegiatan pemasaran kepada orang lain sebagai distributor. Distributor harus mendapat untung karena selain menanggung biaya transportasi juga

menanggung kerusakan barang selama di perjalanan. Distributor akan membeli dari produsen dan memasarkan ke berbagai wilayah (heksagon) se-panjang biaya transportasi masih lebih rendah dari selisih antara harga beli distributor dengan harga beli pengecer (Tarigan, 2005:88).

Untuk meningkatkan jumlah produksi dan menggunakan distributor dapat memperluas jangkauan pemasaran, tetapi jangkauan pemasaran tetap ada batas-nya. Jangkauan pemasaran dibatasi oleh berbagai faktor seperti biaya transportasi yang semakin mahal, barang yang tidak tahan lama di perjalanan, terbatasnya jumlah yang dapat diangkut dalam sekali jalan, dan yang terpenting adanya produsen/distributor di tempat lain yang melakukan hal yang sama. (Tarigan 2005:89)

2.2.3 Interaksi Keruangan

Interaksi keruangan di lihat sebagai suatu fokus utama dalam kajian geografis dan digunakan untuk menentukan interdependensi antar wilayah yang didalamnya mencakup gerakan barang, orang, uang, gagasan, dan sebagainya. Interaksi keruangan migrasi, komunikasi dan transportasi dapat terjadi jika dipenuhi oleh tiga persyaratan yaitu: (a) komplementaritas yang dapat diartikan sebagai perbedaan karakteristik antar wilayah yang saling melengkapi dan se-lanjutnya melahirkan permintaan dan penawaran; (b) transferabilitas yaitu se-makin kecilnya hambatan dalam hal waktu dan biaya sehingga interaksi antar wilayah relatif lebih mudah; (c) *intervening opportunities* (absennya alternatif lain) yaitu tidak adanya pilihan atau alternatif lain dalam hal pemenuhan ke-butuhan sehingga perlu berinteraksi dengan wilayah lain (Daldjoeni, 1997:190).

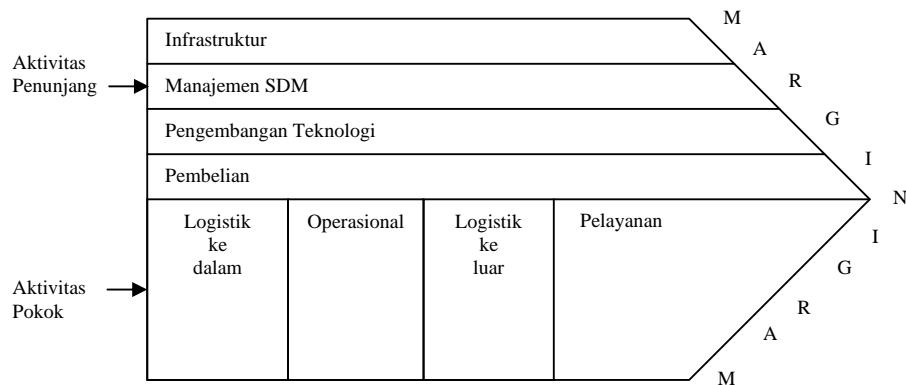
Harris dan Ullman dalam Daldjoeni (1992:34) mengatakan bahwa interaksi keruangan akan membentuk beberapa pola keruangan: (a) seragam, pola ruang ini menggambarkan bahwa tempat-tempat pusat didistribusikan ke dalam suatu pola seragam yang berfungsi menyediakan barang dan jasa ke wilayah sekitarnya; (b) fungsi khusus, pola ini cenderung memperlihatkan pengelompokan karakteristik tapak atau aktifitas lain yang saling melengkapi; (c) pusat transport, pola ini dibentuk dari besarnya aktivitas fisik, komersil atau politik yang terjadi dalam aktivitas transportasi secara terus menerus; (d) gabungan, pola ini merupakan pola gabungan dari beberapa pola tersebut di atas.

Interaksi keruangan dalam pengembangan wilayah terdiri dari beberapa jenis yaitu: (a) interaksi fisik, berbentuk interaksi keruangan dari sekelompok permukiman menciptakan interaksi fisik melalui jaringan transportasi baik alami maupun buatan; (b) interaksi ekonomi, membentuk integrasi keruangan dari jaringan pemasaran dari berbagai kegiatan ekonomi; (c) interaksi pergerakan penduduk, merupakan gambaran dari interaksi desa-kota; (d) interaksi teknologi, terintegrasi secara keruangan dan fungsional; (e) interaksi sosial, merupakan dampak dari interaksi ekonomi terhadap pola hubungan sosial masyarakat; (f) interaksi pelayanan sosial, merupakan interaksi yang terbentuk oleh aktivitas kebutuhan pelayanan umum, interaksi ini juga dipengaruhi oleh jumlah dan kepadatan penduduk (g) interaksi politik, administrasi dan kelembagaan, merupakan interaksi ruang yang diintegrasikan dan ditransormasikan melalui struktur politik, administratif, dan kelembagaan, serta saling ketergantungan antar lembaga (Rondinelli, 1978:54)

2.3. Rantai Nilai (*Value Chain*)

Pendekatan rantai nilai didasarkan pada serangkaian kegiatan yang berurutan dari sekumpulan aktivitas nilai (*value activities*) yang dilaksanakan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan serta mendukung produk dan jasa. Aktivitas dalam rantai nilai dibagi dalam dua kategori, yakni; (Porter dalam Umar, 1999:135).

- a. Aktivitas utama adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan diri dalam penciptaan fisik produk atau jasa, penjualan dan pengirimannya kepada pembeli serta aktivitas purna jual.
- b. Aktivitas pendukung merupakan aktivitas-aktivitas yang melengkapi aktivitas utama dengan berbagai fungsi, yaitu kelengkapan infrastruktur, manajemen SDM, pengembangan teknologi, pengadaan barang dan pengembangan teknologi.



Sumber: Porter dalam Umar (1999:136)

GAMBAR 2.1
KONSEP RANTAI NILAI

Gambar 2.1 merupakan konsep mata rantai nilai tambah yang menjelaskan bahwa setiap mata rantai baik yang utama maupun penunjang dapat menambah nilai dari

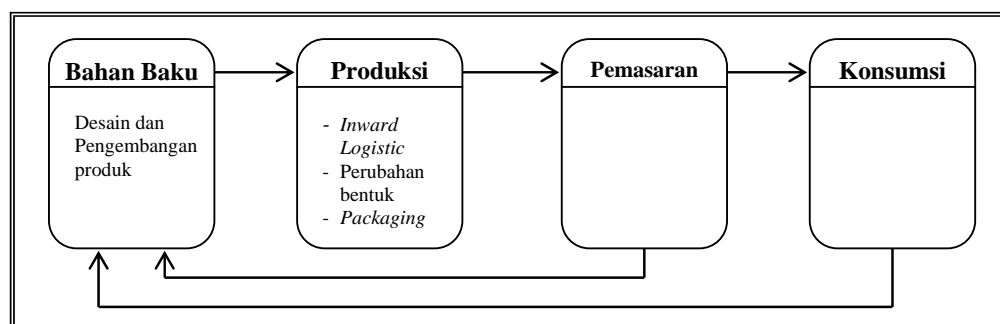
produk yang dihasilkan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut merupakan harga yang akan di bayar konsumen.

Rantai nilai didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengimplimentasikan produk atau jasa mulai dari konsep, berbagai tahap produksi hingga pemasaran ke konsumen akhir dan pengolahan produk sehabis digunakan. (Kaplinsky dan Morris, 2000:4)

Rantai nilai menggambarkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu usaha dan menghubungkannya dengan analisis kemampuan bersaing usaha tersebut. Analisis rantai nilai adalah suatu cara dalam mengidentifikasi aktivitas dalam suatu usaha yang secara langsung berhubungan dengan upaya untuk meraih keunggulan bersaing (Tallec dan Bockel, 2005:2).

Analisis rantai nilai dijelaskan Michael Porter sebagai “*the building blocks of competitive advantage*”. Analisis rantai nilai memperlihatkan organisasi se-bagai suatu proses yang berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. (Kuncoro, 2006:46).

Analisis rantai nilai memiliki peranan penting dalam memahami kebutuhan dan lingkup persaingan yang sistematis. Hal lain yang membuat analisis rantai nilai menjadi penting adalah rantai nilai membantu dalam memahami keunggulan dan kelemahan sebuah perusahaan atau negara atau wilayah (Kaplinsky dan Morris 2000:9).



Sumber : Kaplinsky dan Morris, 2000

GAMBAR 2.2 **RANTAI NILAI SEDERHANA**

Gambar 2.2 menunjukkan penambahan nilai dari komponen produksi, yang sebenarnya mempunyai beberapa rangkaian kegiatan dalam setiap komponen dalam rantai nilai. Selanjutnya akan ada rantai produsen yang memiliki rantai nilai tersendiri yang mengakibatkan rantai nilai bercabang-cabang dan makin kompleks.

Kaplinsky dan Morris (2000:38) menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai peningkatan rantai nilai antara lain:

- ❖ Peningkatan Proses, meningkatkan efisiensi proses internal secara signifikan agar lebih baik dari para pesaing.
- ❖ Peningkatan Produk, menghasilkan produk-produk baru atau meningkatkan produk lama lebih cepat dari para pesaing. Hal ini termasuk mengubah proses pengembangan produk-produk baru, baik itu dalam setiap komponen rantai nilai maupun dalam hubungan antar komponen rantai nilai yang berbeda.
- ❖ Peningkatan Fungsional, meningkatkan penambahan nilai dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan atau memindahkan kegiatan-kegiatan ke rantai yang berbeda dalam rantai nilai.
- ❖ Peningkatan Rantai, memindahkan kegiatan dalam sebuah rantai nilai baru.

French Research Institute telah memperkenalkan dan mengembangkan analisis rantai nilai komoditas (*Commodity chain analysis*) sebagai suatu teknik untuk menganalisis rantai pemasaran yang sudah ada bagi komoditas pertanian yang dapat

menentukan pembuatan kebijakan publik, didalamnya terkandung analisis kuantitatif dari input dan output, harga dan penambahan nilai dalam rantai nilai komoditas. Proses analisis rantai nilai komoditas adalah: (a) pemetaan rantai nilai, sebagai langkah awal analisis rantai nilai untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang rantai nilai; (b) aliran produk; (c) para pelaku rantai nilai dan jenis interaksi antar pelaku (Tallec dan Bockel, 2005:4).

Selanjutnya Cook dan Bredhal dalam Saragih (2001:132) menjelaskan secara lebih operasional, konsep keunggulan bersaing adalah kemampuan me-masok (menjual) barang dan jasa sesuai dengan atribut preferensi konsumen (waktu, tempat, bentuk) pada harga yang sama atau lebih baik dari yang dipasarkan pesaing dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi kemampuan bersaing.

Kemampuan suatu negara/perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar secara menguntungkan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan keunggulan komparatifnya, ini dijadikan dalam konsep keunggulan daya saing (Porter dalam Saragih, 2001:131).

Menurut Tallec dan Bockel (2005:9) analisis rantai nilai komoditas di-gunakan untuk menunjukkan keseluruhan para pelaku ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang relevan oleh para pelaku ekonomi tersebut yang memberikan pengaruh secara langsung dalam menentukan suatu produk akhir. Dalam hal ini rantai nilai meliputi urutan kegiatan yang lengkap, mulai dari bahan baku atau produk antara, hingga proses akhir sampai kepada konsumen. Tujuan utama dari analisis rantai nilai adalah untuk mengidentifikasi potensi-potensi bagi pengembangan wilayah maka lokasi

geografis dari para pelaku yang terlibat harus diperhitungkan pada setiap komponen dalam rantai nilai.

2.4. Klasifikasi Sumber Daya Perikanan

Sumberdaya perikanan adalah salah satu sumberdaya yang sifatnya terbuka dan dimiliki oleh umum. Dalam perikanan bebas yang tidak diatur oleh undang-undang memberikan konsekuensi bahwa setiap orang adalah bebas untuk keluar-masuk dan mengambil sumberdaya tersebut. (Susilowati, 2005).

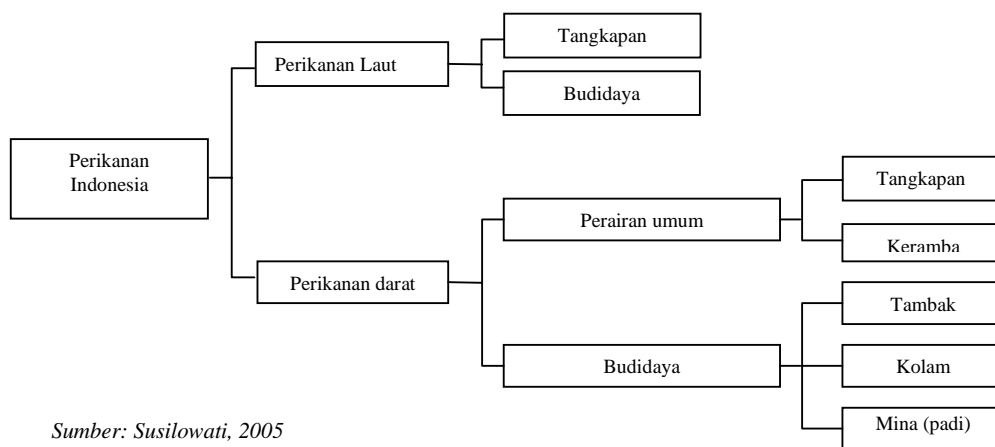
Jenis ikan yang pada umumnya ditangkap untuk dijadikan konsumsi baik dalam bentuk ikan segar maupun olahan adalah jenis ikan pelagis. Menurut Dahuri (2001:15) organisme *pelagis* adalah organisme yang hidup di laut terbuka, seperti jenis ikan yang hidup dekat permukaan air laut seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, dan juga *pelagis* kecil seperti ikan kembung, ikan lemuru, ikan lajang dan berbagai jenis ikan lainnya.

Perikanan tangkap menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2003) adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau pengumpulan hewan atau tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas. Selanjutnya Dahuri (2001:220) mengklasifikasikan perikanan laut menjadi 2 (dua) yakni, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kegiatan budidaya perikanan adalah usaha perikanan tambak, baik tambak udang, bandeng atau campuran keduanya. Dalam kegiatan budi daya perikanan, pengaruh utama yang perlu diperhatikan antara lain adalah pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar lokasi budi daya dan pengaruh budi daya terhadap lingkungan. Kegiatan perikanan tangkap dapat dikelompokkan

ke dalam 3 kelompok, yakni (1) perikanan lepas pantai, (2) perikanan pantai dan (3) perikanan darat.

Kegiatan perikanan pantai adalah kegiatan menangkap populasi hewan air (ikan, udang, kerang-kerangan) dan memanen tumbuhan air (ganggang, rumput laut) yang hidup liar di perairan sekitar pantai. Permasalahan yang dihadapi perikanan tangkap pada umumnya adalah menurunnya hasil tangkap yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan dan degradasi kualitas fisik, kimia dan biologi lingkungan perairan.

Untuk mengetahui lebih lanjut struktur pengelompokan sumberdaya perikanan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: Susilowati, 2005

GAMBAR 2.3
SKEMA PENGELOMPOKKAN SUMBER DAYA PERIKANAN

2.5 Perkembangan Daerah Pantai Pesisir

Perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah pantai dilandasi oleh berbagai macam bentuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik, jelas akan termanifestasikan pada perkembangan fisiknya. Faktor-faktor

yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah pantai ini dengan sendirinya tidak sama untuk berbagai daerah. Faktor yang umum dapat dikemukakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan daerah pantai terjadi karena potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah pantai yang dimanfaatkan secara ekonomis, seperti perikanan dan hasil laut lainnya (Mulyadi, 2005:99).

Menurut Mulyadi (2005:101) ada empat pola perkembangan daerah ter-bangun (*built up areas*) di daerah pantai, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah kota pantai, kota pantai umumnya berkembang karena adanya potensi ekonomi, strategi pertahanan dan sebagai pusat pemerintaha. Daerah ter-bangun berkembang secara intensif sepanjang pantai. Penggunaan tanah daerah pantai lebih berorientasi ekonomis seperti untuk pelabuhan, per-gudangan, industri perkapalan dan industri berat lainnya. Adakalanya untuk kegiatan rekreasi yang produktif. Daerah pantai umumnya merupakan “gerbang” kegiatan sosial ekonomi, politik dan budaya bagi daerah belakang-nya.
2. Daerah desa pantai, perkembangan dan pertumbuhan dimulai oleh terbukanya kelompok masyarakat yang mata pencahariannya hasil laut. Pemukiman umumnya berorientasi ke arah laut karena usaha utama dari hasil laut. Biasanya perkembangan daerah terbangun terpencar-pencar di tepi pantai sesuai dengan potensi kebutuhan masyarakat. Jadi, sifat perkembangan fisik adalah ekstensif. Sedikitnya ada tiga macam perkembangan bangunan di daerah pantai yang mempunyai hubungan dengan kegiatan sosial ekonomi masyarkatnya, yaitu :
 - a. Desa pantai yang jauh dari pesisir yang umumnya mempunyai ciri orientasi masyarakat bercocok tanam, sebagai buruh, peternakan;

- b. Desa pantai yang dekat ke laut, tetapi tidak langsung berpesisir, orientasi masyarakat umumnya perikanan darat (empang) dan mengolah hasil laut lainnya seperti garam dan kerajinan, bertani dan peternakan, buruh atau pegawai negeri;
 - c. Desa pantai yang berpesisir, orientasi kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya pada perikanan laut, perikanan empang, bertani sambilan dan buruh.
3. Pantai pusat kegiatan rekreasi, yaitu suatu kawasan rekreasi yang me-manfaatkan potensi alam daerah pantai. Orientasi kegiatannya adalah ke arah pantai dan sepanjang pantai serta memberikan pelayanan bagi kebutuhan rekreasi regional di pedalaman. Dalam hubungan ini, peranan jaringan per-hubungan darat dengan daerah dan kota-kota lainnya di pedalaman merupakan faktor yang sangat penting.
 4. Pantai untuk kegiatan khusus, yaitu suatu penggunaan fungsi daerah pantai untuk kepentingan kegiatan-kegiatan khusus bagi yang berorientasi kepada ekonomi dan ataupun pemerintah. Berorientasi kepada kepentingan ekonomi seperti, industri perkapalan, depot bahan bakar, industri pengolahan hasil laut.

2.5.1. Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelalangan Ikan

Dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai

tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006, dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu:

1. PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera);
2. PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara);
3. PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai);
4. PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan).

Pangkalan Pendaratan Ikan yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 700 pelabuhan pangkalan pendaratan ikan yang merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh daerah. Sifat dari pangkalan ini antara lain: (Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia).

1. Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT;
2. Jumlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton / tahun;
3. Melayani Kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.

Tempat Pelelangan Ikan secara konseptual disediakan oleh pemerintah untuk membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan. Salah satu tugas TPI adalah untuk melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan sehingga harga ikan menjadi lebih tinggi dan stabil serta memberikan keuntungan bagi nelayan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di suatu tempat pelelangan ikan guna mempertemukan antara penjual dan pembeli ikan sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama. (Mahyuddin, 2001)

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tempat pelelangan ikan sebagai kegiatan ekonomi perikanan dapat meningkatkan pendapatan nelayan melalui proses pelelangan ikan, disamping sebagai aktivitas pelelangan yang menghasilkan produksi ikan secara kuantitas, juga perlu diperhatikan secara kualitas pemasaran ikan, hal ini untuk memperkirakan apakah kualitas pemasaran ikan cukup memadai jika dibandingkan pada tempat/lokasi yang berbeda.

Menurut Mahyuddin (2001), untuk melakukan kajian terhadap kualitas pemasaran ikan dapat dilakukan dengan pendekatan perhitungan Indeks Relatif Nilai Produksi (I) yaitu dapat dilakukan melalui pendekatan formulasi di bawah ini.

$$I = \frac{Np/Qp}{Nt/Qt} \dots\dots\dots(2-1)$$

Keterangan

Np = Nilai produksi perikanan dari pelabuhan perikanan setempat (lokal)

Nt = Nilai produksi perikanan dari seluruh pelabuhan perikanan

Qp = Jumlah produksi perikanan dari pelabuhan perikanan setempat (lokal)

Qt = Jumlah produksi perikanan dari seluruh pelabuhan perikanan

Berdasarkan hasil perhitungan indeks relatif nilai produksi dapat di-analisis dan disimpulkan sebagai berikut:

⇒ Jika $I = 1$, produksi perikanan relatif dari pelabuhan perikanan setempat dengan produksi perikanan relatif dari seluruh pelabuhan perikanan sama baiknya. Artinya pemasaran ikan di pelabuhan perikanan setempat sama baik-nya dengan kualitas pemasaran ikan dari seluruh pelabuhan perikanan.

- ↳ Jika $I > 1$, produksi perikanan relatif di pelabuhan perikanan setempat lebih baik apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari seluruh pelabuhan perikanan. Artinya kualitas pemasaran ikan di pelabuhan perikanan setempat lebih baik daripada kualitas pemasaran ikan di seluruh pelabuhan perikanan.
- ↳ Jika $I < 1$, produksi perikanan dari pelabuhan perikanan setempat lebih jelek apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari seluruh pelabuhan perikanan, yang berarti bahwa kualitas pemasaran ikan di pelabuhan perikanan setempat kurang baik dibandingkan dengan kualitas pemasaran ikan di seluruh pelabuhan perikanan.

Untuk memperlancar proses pelelangan ikan ini, Pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang ada di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian semakin berfungsinya tempat pelelangan ikan untuk aktivitas pelelangan ikan maka semakin berfungsi pula suatu pelabuhan perikanan. Namun demikian tidak semua pelabuhan perikanan diharuskan memiliki tempat pelelangan ikan tergantung dimana pelabuhan perikanan itu berada dan fungsi utamanya untuk apa, sebagai contoh pelabuhan perikanan yang berada di Indonesia Bagian Timur dan lokasi pelabuhan perikanan yang berada pada daerah terpencil yang jumlah penduduknya relatif sedikit dan umumnya melayani aktivitas bongkar muat ikan untuk tujuan ekspor tidak memerlukan tempat pelelangan ikan.

2.5.2. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004:251), sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi-interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi dan

lingkungan. Khususnya pada masyarakat nelayan, karakteristik yang mencolok adalah ketergantungan pada musim penangkapan, para nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses teknologi penangkapan. Kondisi ini mempunyai implikasi terhadap perilaku konsumsinya.

Pada musim penangkapan, nelayan cenderung konsumtif dan relatif kekurangan pada musim paceklik. Pada musim paceklik, nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil dan buruh tambak seringkali terpaksa menjamin uang atau barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau pedagang pengumpul. Sebagai konsekuensinya, para peminjam terkait dengan pihak juragan atau pedagang dengan ikatan berupa keharusan menjual tangkapannya kepada pedagang atau juragan tersebut. Pola hubungan yang asimetris ini sangat mudah berubah menjadi alat dominasi dan eksploitasi.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi karakteristik masyarakat pesisir adalah adanya pasar. Berbeda dengan petani padi yang dapat menyimpan sebagian panennya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, para nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian besar hasilnya. Ditambah sifat produk perikanan yang kurang tahan lama, kecuali jika tersedia fasilitas pengolahan atau pengawetan, maka keberadaan pasar sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan.

2.5.3. Kegiatan Masyarakat Nelayan

2.5.3.1. Kelompok Masyarakat Nelayan

Imron dalam Mulyadi (2005:7) mendefinisikan nelayan sebagai suatu kelompok yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai dengan lingkungan permukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Menurut Mulyadi (2005:7), nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Di lihat dari segi pemilikan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan per-orangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam peng-operasiannya tidak melibatkan orang lain.

Adapun menurut Syarif (2001), masyarakat nelayan dapat dibedakan menurut 4 (empat) kelompok dari kegiatan masyarakat nelayan, antara lain:

1. Masyarakat nelayan tangkap

Masyarakat nelayan tangkap merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut yang dapat di bedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul

Masyarakat nelayan pengumpul/bakul merupakan kelompok masyarakat yang bekerja disekitar tempat pelabuhan/pendaratan ikan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.

3. Masyarakat nelayan buruh

Masyarakat nelayan buruh sebagai masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, ciri dari mereka dapat terlihat dari tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan.

4. Masyarakat nelayan tambak.

Masyarakat nelayan tambak merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari masyarakat nelayan pengolah dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

2.5.3.2. Modal Usaha-usaha Nelayan

Nilai aset (investasi) tetap/tidak bergerak dalam satu unit penangkap disebut juga sebagai modal. Pada umumnya untuk satu unit penangkap modal terdiri alat-alat penangkapan (pukat, jala dll), boat atau sampan penangkap, alat-alat pengolahan atau pengawet di dalam kapal dan alat-alat penangkapan laut. (Mulyadi, 2005:8).

Menurut Mulyadi (2005:86), penilaian terhadap modal usaha nelayan dapat dilakukan menurut tiga cara, yakni ; *Pertama*, penilaian didasarkan kepada nilai

alat-alat yang baru, yaitu berupa ongkos memperoleh alat-alat tersebut menurut harga yang berlaku sekarang. Jadi dengan mengetahui jenis-jenis alat dan jumlahnya beserta harganya yang baru dapatlah dihitung besar modal sekarang. *Kedua*, berdasarkan harga pembelian atau pembuatan alat-alat, jadi berapa investasi awal yang telah dilaksanakan nelayan, bertolak dari sini dengan memperhitungkan penyusutan tiap tahun dapat dihitung nilai alat-alat atau modal pada waktu sekarang. Cara kedua ini dilakukan apabila nelayan membeli alat-alat baru dan nelayan mengingat harga pembelinya. *Ketiga*, dengan menaksir nilai alat pada waktu sekarang, yakni harga yang akan diperoleh apabila alat-alat di jual. Dalam hal ini penilaian dipengaruhi oleh harga alat baru, tingkat penyusunan alat atau kondisi alat pada waktu ini. Cara ini terutama digunakan hanya untuk menilai boat/sampan yang umurnya telah beberapa tahun dan masih dalam kondisi yang agak baik.

2.5.3.3. Biaya dan Pendapatan Nelayan

Menurut Mulyadi (2005:88), ongkos produksi dalam usaha nelayan terdiri dari dua kategori, yaitu ongkos berupa pengeluaran nyata (*actual cost*) dengan ongkos yang tidak merupakan pengeluaran nyata (*inputed cost*). Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran nyata ada yang kontan dan ada yang tidak kontan. Pengeluaran-pengeluaran kontan adalah (1) bahan bakar dan oli; (2) bahan pengawet (es dan garam); (3) pengeluaran untuk makan/konsumsi awak; (4) pengeluaran untuk reparasi; (5) pengeluaran untuk retribusi dan pajak. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak kontan adalah upah/gaji awak nelayan pekerjaan yang umumnya bersifat bagi hasil dan dibayar sesudah hasil di jual. Pengeluaran-

pengeluaran tidak nyata ialah penyusutan dari boat/sampan, mesin-mesin dan alat-alat penangkap.

Mulyadi (2005:90) menjelaskan bahwa pada umumnya pendapatan para nelayan penggarap ditentukan secara bagi hasil dan jarang diterima sistem upah atau gaji tetap yang diterima nelayan. Dalam sistem bagi hasil, bagian yang di bagi ialah pendapatan setelah dikurangi ongkos-ongkos eksploitasi yang di-keluarkan pada waktu beroperasi ditambah dengan ongkos hasil penjualan. Jadi, disini termasuk ongkos bahan bakar, oli, es dan garam, biaya makanan para awak kapal, dan pembayaran retribusi. Biaya lain yang masih termasuk ongkos eksploitasi seperti biaya reparasi dengan demikian adalah seluruhnya tanggungan dari pemilik alat dan boat.

Selanjutnya Mulyadi (2005:90) menjelaskan hasil yang dibagi adalah hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Caranya ialah ikan hasil tangkapan satu unit penangkapan dijual oleh pemilik kemudian barulah dilakukan perhitungan bagi hasil. Waktu-waktu perhitungan bagi hasil juga dilakukan sekali sebulan sehingga para nelayan penggarap menerima bagiannya sekali sebulan.

2.5.3.4. Sistem Pengawetan dan Pengolahan Ikan

Ikan adalah satu diantara bahan makanan protein yang paling mudah mengalami pembusukan (*perishable*). Oleh karena itu, sangat diperlukan tindakan yang tepat dan cermat di dalam pencegahan pembusukan tersebut, mulai dari saat penangkapan sampai tiba di tangan konsumen. Tindakan yang dimaksud adalah berupa pengawetan dan pengolahan seperti pengasinan, pengeringan, perebusan, pembekuan dan pengasapan.

Secara rinci jenis dan cara pengawetan ikan dijelaskan sebagai berikut:
(Mulyadi, 2005:90).

1. Pengasinan dan pengeringan; ikan-ikan yang baru ditangkap, disortir lebih dahulu atas jenis-jenis ikan yang dibelah untuk di buang isi perutnya atau tidak. Sesudah di sortir ikan-ikan tersebut dimasukan ke dalam tong yang terlebih dahulu diisi dengan air yang bercampur garam, selanjutnya ikan di jemur di atas sebuah pelataran/bilah bambu.
2. Pengasinan dan Perebusan; pengolahan ini biasanya digabungkan dengan pengasinan biasa dan dilakukan sebagai pelengkap usaha pengasinan. Cara pengasinan dan perebusan yang lazim adalah ikan-ikan disusun berlapis-lapis di dalam keranjang. Hasil dari proses tersebut selanjutnya siap untuk di-kirimkan ke grosir-grosir dan tempat penjualan.
3. Pengasinan, perebusan dan pengeringan; salah satu cara pengolahan ikan teri ialah dengan cara pengasinan, perebusan dan pengeringan/penjemuran. Hal ini dilakukan karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan penjualan basah.
4. Pendinginan dengan Es; pengawetan ikan dengan es disebut dengan pendinginan *fishis*, memegang peranan yang penting di dalam pengadaan ikan segar terhadap konsumen. Ikan segar disukai segala lapisan masyarakat/konsumen, para nelayan, pedagang ikan dan pengusaha-pengusaha ikan selalu berusaha untuk menjual ikannya ke pasaran dalam bentuk ikan segar, terkecuali untuk ikan-ikan kecil.

2.5.3.5. Pola Bagi Hasil Tangkapan

Menurut Acheson dalam Mulyadi (2005:76), menjelaskan pola bagi hasil tangkapan sebagai alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi resiko. Mempergunakan pola bagi hasil serta tidak memberikan upah secara riil, pada kenyataannya lebih dapat meningkatkan motivasi di antara awak dalam bekerja di laut. Pola bagi hasil juga akan dapat mengurangi resiko bagi pemilik kapal serta menjaminy, tidak memberi upah yang tidak sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk. Hal ini terjadi karena penghasilan nelayan yang tidak dapat ditentukan kepastiannya, tergantung dari jumlah ikan yang ditangkap dan hasil penjualan yang dilakukannya.

Beberapa hasil penelitian Susilo, Wagito, Masyhuri dalam Mulyadi (2005:77), menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dari pola bagi hasil tangkapan sangatlah timpang diterima antara pemilik dan awak kapal. Secara umum hasil bagi bersih yang diterima awak kapal dan pemilik adalah separo-separo (setengah-setengah). Akan tetapi, bagian yang diterima awak kapal harus dibagi lagi dengan sejumlah awak yang terlibat dalam aktivitas kegiatan di kapal.

Menurut Mulyadi (2005:78), dalam suatu komunitas nelayan biasanya terdiri dua kelompok besar, yaitu kelompok produsen (para penangkap ikan) dan kelompok pemasaran (para pedagang yang membeli dan menjual kembali ikan hasil tangkapan nelayan). Dalam hal ini kelompok pemasaran dapat dikatakan sebagai institusi yang menjembatani antara nelayan dengan pasar. Sementara itu, kelompok produsen dapat dibedakan menjadi nelayan pemilik perahu dan peralatan perikanan (juragan) serta nelayan yang bekerja sebagai buruh nelayan. Di antara para

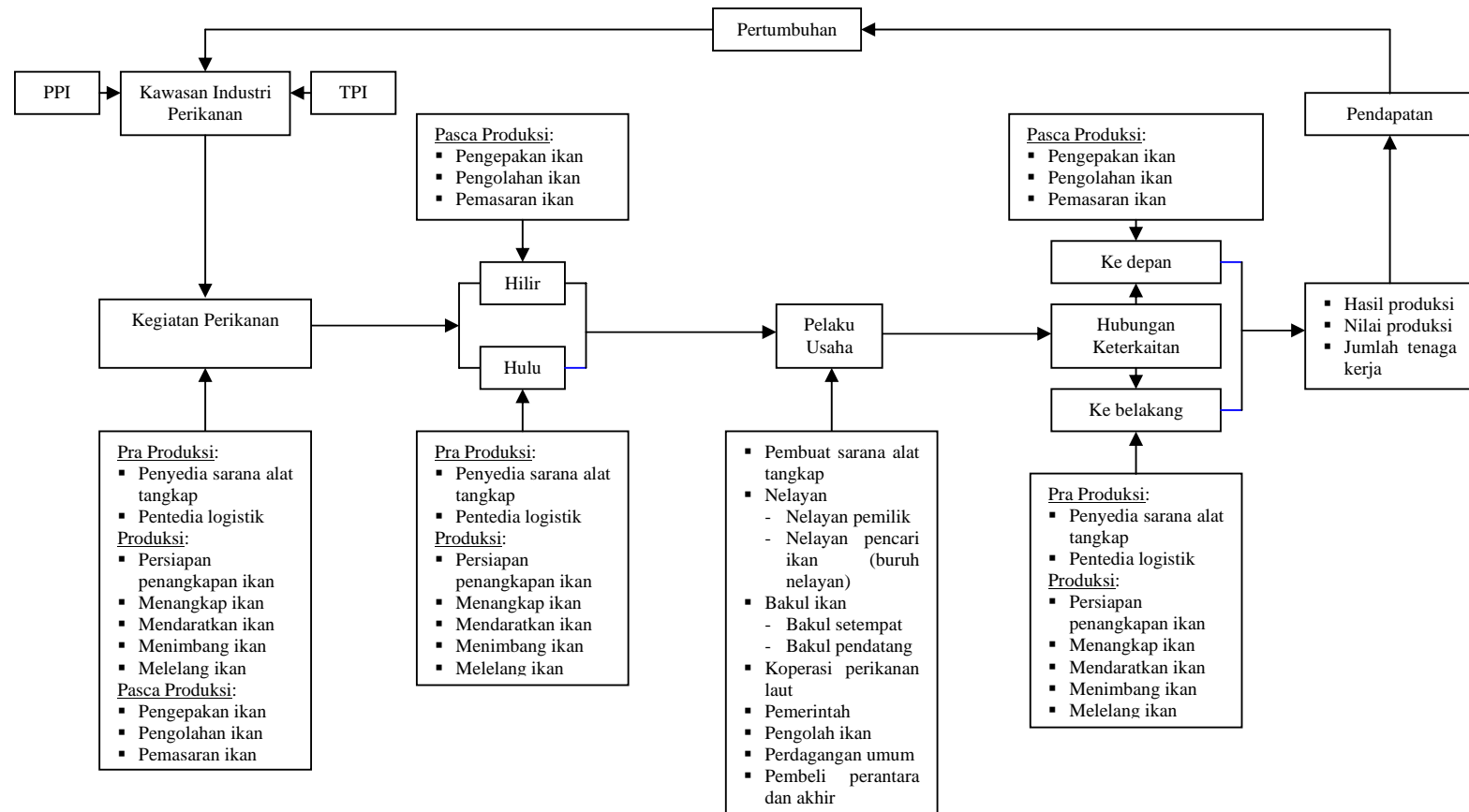
pedagang ada seorang yang ditunjuk oleh juragan untuk memimpin penangkapan di laut, yang disebut dengan juragan laut.

Hubungan *patron client* dalam komunitas masyarakat nelayan umumnya terjadi antara buruh nelayan dengan juragan di satu pihak atau antara juragan dengan pedagang di lain pihak. Jarang ditemukan hubungan antara buruh nelayan dengan pedagang, karena buruh nelayan bukanlah pengambil keputusan dalam aktivitas penangkapan ikan. Menurut Mulyadi (2005:78), hubungan *patron client* yang terjadi lebih didasarkan pada asas untuk saling memberi dan saling menerima. Pola hubungan *patron client* lebih disebabkan oleh pola pendapatan nelayan yang tidak pernah teratur, lebih banyak diliputi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) sehingga adaptasi yang dikembangkan dalam komunitasnya lebih pada semacam asuransi sosial yang diperoleh melalui hubungan *patronage*.

2.6. Sintesis Kajian Teori

Bertitik tolak dari beberapa kajian teori dan pandangan terhadap studi kasus dalam kegiatan industri perikanan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dibuat suatu sintesis dalam bentuk kerangka teori untuk memperoleh variabel-variabel dalam penelitian ini. Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan teori dan fakta dalam kegiatan ekonomi perikanan. Pendekatan teori ini mengacu pada suatu kumpulan konsep, definisi dan proporsi yang saling terkait yang diurutkan secara sistematis untuk menjelaskan suatu kejadian atau fakta (fenomenologi) yang ada, yakni tentang kegiatan industri perikanan.

Dari hasil kajian teori diatas, muncul hipotesis awal sebagai jawaban teoritis yang secara skematis akan diuraikan dalam kerangka teori pada Gambar 2.4.



Sumber: Pendekatan Berbagai Kajian Teori, 2007

GAMBAR 2.4
KERANGKA TEORI
KEGIATAN EKONOMI PERIKANAN

Berdasarkan hasil skema kerangka teori yang sudah dijelaskan, menunjukkan bahwa kegiatan perikanan mempunyai serangkaian tahapan kegiatan yang berlangsung dari hulu sampai ke hilir. Tahapan kegiatan tersebut membentuk hubungan keterkaitan (kebelakang dan kedepan) dan interaksi keruangan.

Dalam hubungan keterkaitan dan keruangan terdapat pelaku usaha yang mendukung jalannya proses kegiatan perikanan tangkap, keterkaitan ke belakang yaitu sebagai proses persiapan-persiapan (pra produksi) dalam melakukan kegiatan perikanan tangkap (produksi), sedangkan keterkaitan ke depan berkaitan dengan pemasaran hasil produksi (pasca produksi). Proses hasil produksi dan nilai produksi selanjutnya berhubungan dengan perolehan pendapatan ekonomi pada pelaku kegiatan perikanan tangkap dan dampak pengganda lainnya.

Adanya proses perolehan produksi kegiatan perikanan berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Parr dalam Dahuri (2004:49), menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengembangan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah. Selanjutnya menurut Djojohadikusumo (1994:3), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses produksi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Berkaitan dengan jenis produk yang dihasilkan dalam kegiatan perikanan adalah beberapa jenis ikan laut sedangkan sarana yang pendukung produksi tersebut yakni adanya pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan sebagai wadah atau tempat yang menampung kegiatan sistem bisnis perikanan.

Dari hasil sintesis kajian teori, selanjutnya untuk menentukan beberapa variabel dalam penelitian ini, yakni kegiatan perikanan dan pertumbuhan kawasan. Untuk mengetahui secara rinci pemilihan variabel penelitian dalam menentukan komponen-komponen variabel dapat di lihat pada Tabel II.1.

TABEL II.1
VARIABEL PENELITIAN

No.	Variabel	Komponen Variabel	Pengukuran Variabel
1.	Kegiatan Perikanan	1. Pelaku usaha	Mengeidentifikasi pelaku usaha dalam bisnis perikanan tangkap.
		2. Sarana alat tangkap	Mengidentifikasi sarana alat tangkap yang digunakan nelayan Karangsong.
		3. Biaya produksi	Mengidentifikasi jenis-jenis biaya yang digunakan untuk proses produksi.
		4. Modal produksi	Mengidentifikasi jenis-jenis permodalan yang digunakan oleh masyarakat nelayan Karangsong.
		5. Pendapatan	Mengidentifikasi perolehan pendapatan yang terkait pada pelaku usaha dalam bisnis perikanan.
2.	Pertumbuhan Kawasan	1. Komoditi unggulan	Mengidentifikasi perkembangan hasil produksi dan nilai produksi hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPI Karangsong dengan mengukur indeks relatifnya untuk mengetahui kualitas pemasaran ikan.
		2. Kebutuhan infrastruktur	Mengidentifikasi keberadaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang PPI Karangsong
		3. Arah kebijakan kelembagaan	Mengidentifikasi arahan kelembagaan dalam pengelolaan PPI Karangsong
		4. Jaringan pemasaran	Mengidentifikasi jaringan pemasaran hasil produksi perikanan.

Sumber: Hasil Analisis, 2008

BAB III

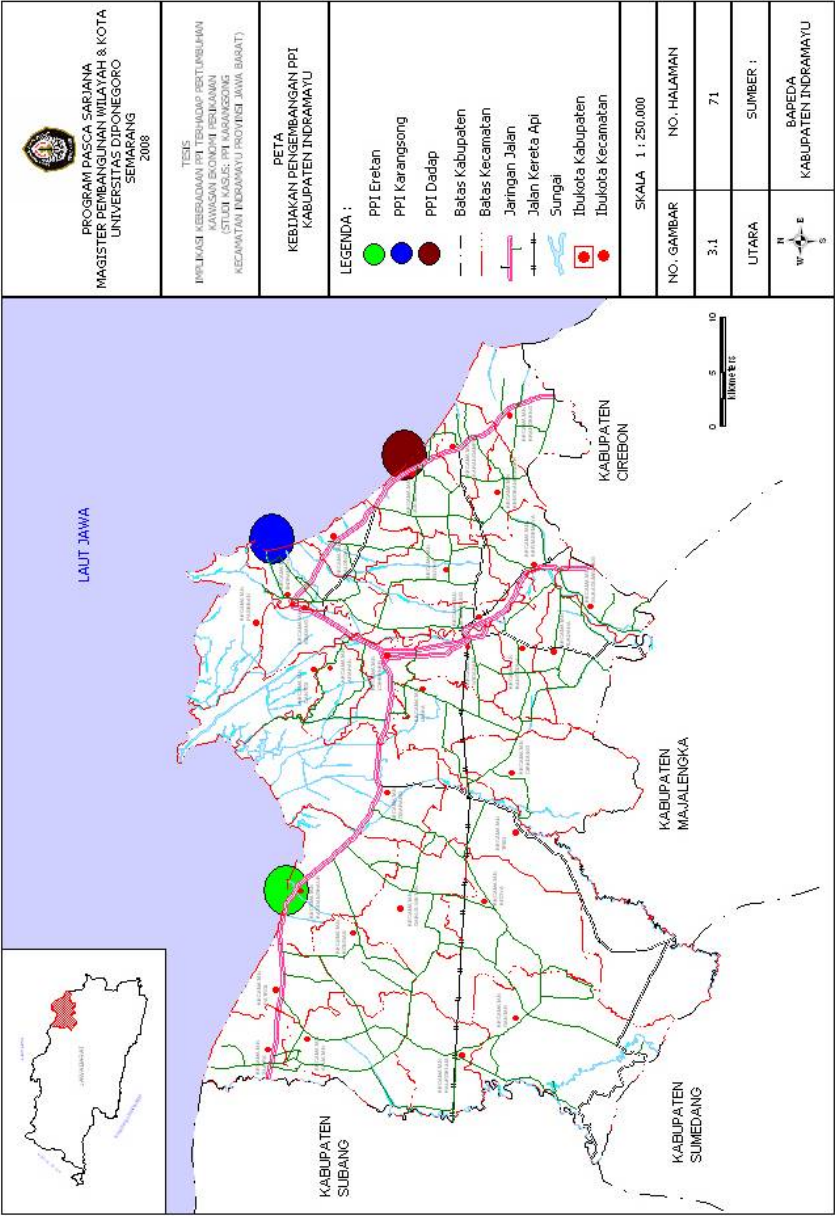
TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN GAMBARAN UMUM KEGIATAN PERIKANAN DI KAWASAN PPI KARANGSONG

3.1. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Perikanan

Menurut UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Kelautan, garis besar kebijaksanaan pembangunan prasarana perikanan antara lain;

- Berorientasi pada kepentingan nasional.
- Berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat.
- Pemerataan pembangunan berdasarkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan dengan pendekatan wilayah.
- Pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitas dalam kegiatan berproduksi, distribusi produk perikanan dan pengembangan industri perikanan.

Menurut Kebijakan Pengembangan Perikanan Kabupaten Indramayu, terdapat 3 (tiga) pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di sepanjang pantai Indramayu yang diproyeksikan sebagai sentra kegiatan perikanan yang besar, yaitu PPI Karangsong untuk wilayah Tengah, PPI Dadap untuk wilayah Timur dan PPI Eretan untuk wilayah Barat. Ketiga PPI ini di-harapkan dapat mengoptimalkan potensi pantai dan perairan Kabupaten Indramayu. Untuk itu perlu di dukung oleh penyediaan prasarana yang me-madai. Untuk jelasnya pengembangan ketiga PPI di lihat pada Gambar 3.1.



3.1.1. Tata Ruang Regional

Menurut kebijaksanaan RTRW Kabupaten Indramayu, potensi yang berpengaruh kuat terhadap pengembangan Kawasan PPI Karangsong diantaranya sebagai berikut:

- a. Kawasan Budidaya; pengembangan sekitar Kawasan PPI Karangsong sebagai area budidaya perikanan tambak.
- b. Kegiatan Industri Non Kawasan Industri; pengembangan sekitar kawasan PPI Karangsong sebagai sentra industri kecil (kegiatan industri non kawasan industri) dan pengolahan/pengalengan ikan laut.
- c. Kawasan Pariwisata; pengembangan sekitar Kawasan PPI Karangsong sebagai kawasan wisata bahari, yakni pengembangan objek wisata Pulau Biawak.
- d. Transportasi Laut; pengembangan transportasi laut yang mempengaruhi perkembangan PPI Karangsong, yakni :
 - Pengembangan prasarana Pelabuhan Laut Interinsuler Eretan, sebagai pelabuhan niaga antar wilayah/inter regional melalui moda laut.
 - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Eretan dan Karangsong serta Dadap untuk peningkatan kegiatan dan produksi perikanan laut.

3.1.2. Tata Ruang Kota Indramayu

Kebijaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Indramayu yang berkaitan erat dengan Kawasan PPI Karangsong diantaranya sebagai berikut:

- a. Kawasan PPI Karangsong berada dalam kebijaksanaan pengembangan Bagian

Wilayah Kota (BWK) II Indramayu dengan fungsi sebagai:

- Kegiatan perikanan dan tambak
 - Permukiman nelayan
 - Lahan cadangan pengembangan kota
- b. Kebijakan rencana pemanfaatan lahan diperuntukan bagi kawasan permukiman nelayan, kawasan tambak dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Arahan pemanfaatan lahan untuk Kawasan PPI Karangsong berdasarkan kebijakan RUTRK Indramayu tahun 2003 yang telah dibuka (dibudidayakan), dapat dilihat pada Tabel III.1 dan peta arahan pemanfaatan lahan dapat dilihat pada Gambar 3.2

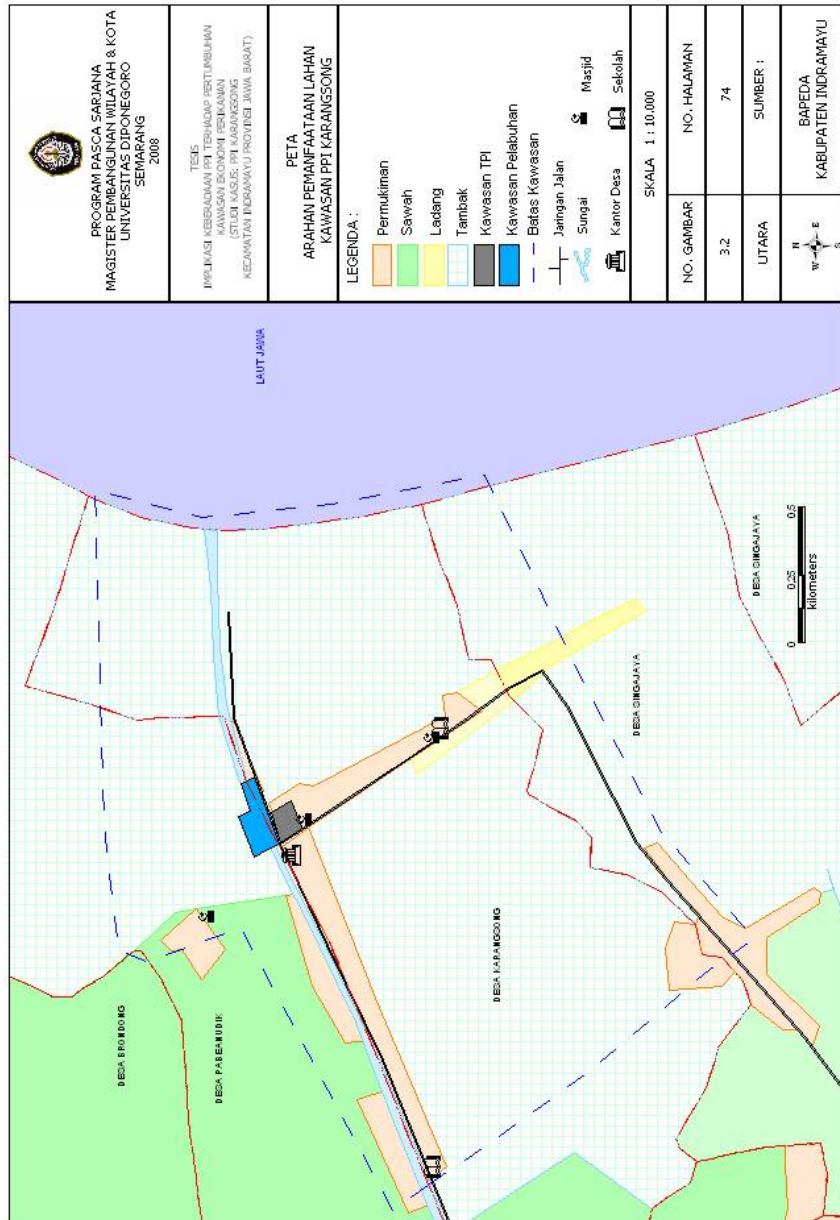
TABEL III.1
PENGUNAAN LAHAN KAWASAN PPI KARANGSONG

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Permukiman/Pekarangan	7,50
2	Fasilitas TPI	2,25
3	Tambak	133,60
4	Lainnya	49,05
	Jumlah	192,40

Sumber : BPS Kabupaten Indramayu, 2004

3.2. Struktur Tata Ruang Kawasan PPI Karangsong

Kondisi eksisting Kawasan PPI Karangsong memanfaatkan aliran Sungai Prajagumiwang sebagai alur pelayaran dari laut menuju ke pelabuhan. Fasilitas pelabuhan dan tempat pelelangan ikan terletak sekitar ± 1 km dari garis pantai. Berdasarkan rencana struktur tata ruang Kawasan PPI Karangsong arahan pengembangannya terbagi dalam dalam 4 zona, yaitu:



A). Zona I

Zona I diarahkan untuk pengembangan fasilitas pokok, berupa gerbang masuk dan alur pelayaran dan pelindung pantai.

B). Zona II

Zona II diarahkan untuk pengembangan fasilitas pokok dan fasilitas fungsional, berupa;

- Pengembangan fasilitas pokok, diantaranya; alur pelayaran, kolam/dermaga labuh tambat dan pelindung pantai.
- Pengembangan fasilitas fungsional, diantaranya; industri galangan kapal dan *home* industri kapal.

C). Zona III

Zonal III diarahkan untuk pengembangan berbagai fasilitas diantaranya fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok berkaitan dengan zona untuk fasilitas laut, sedangkan fasilitas fungsional dan penunjang berkaitan dengan zona fasilitas darat. Untuk mengetahui beberapa elemen yang termasuk dalam fasilitas tersebut, antara lain;

1. Fasilitas fungsional ini terdiri dari;

- Kepabeanan
- Kegiatan pendaratan ikan, meliputi; tempat pelelangan ikan, tempat sortir dan industri pengolahan, tempat pengepakan dan distribusi, tempat penjemuran, kantor administrasi, bangunan pelengkap TPI (toilet, mck, air bersih untuk pencucian ikan), tempat parkir, *shelter* nelayan, sarana pompa BBM dan bangunan utilitas

- Terminal bongkar muat
- Industri pengolahan dan pergudangan
- Bengkel perbaikan (*docking*), suku cadang, pemeliharaan dan pemeriksaan mesin.

2. Fasilitas penunjang ini, meliputi; sarana peribadatan (masjid), perdagangan umum, balai pengobatan, gedung sekolah, balai pertemuan, KUD dan tempat parkir serta perumahan nelayan.

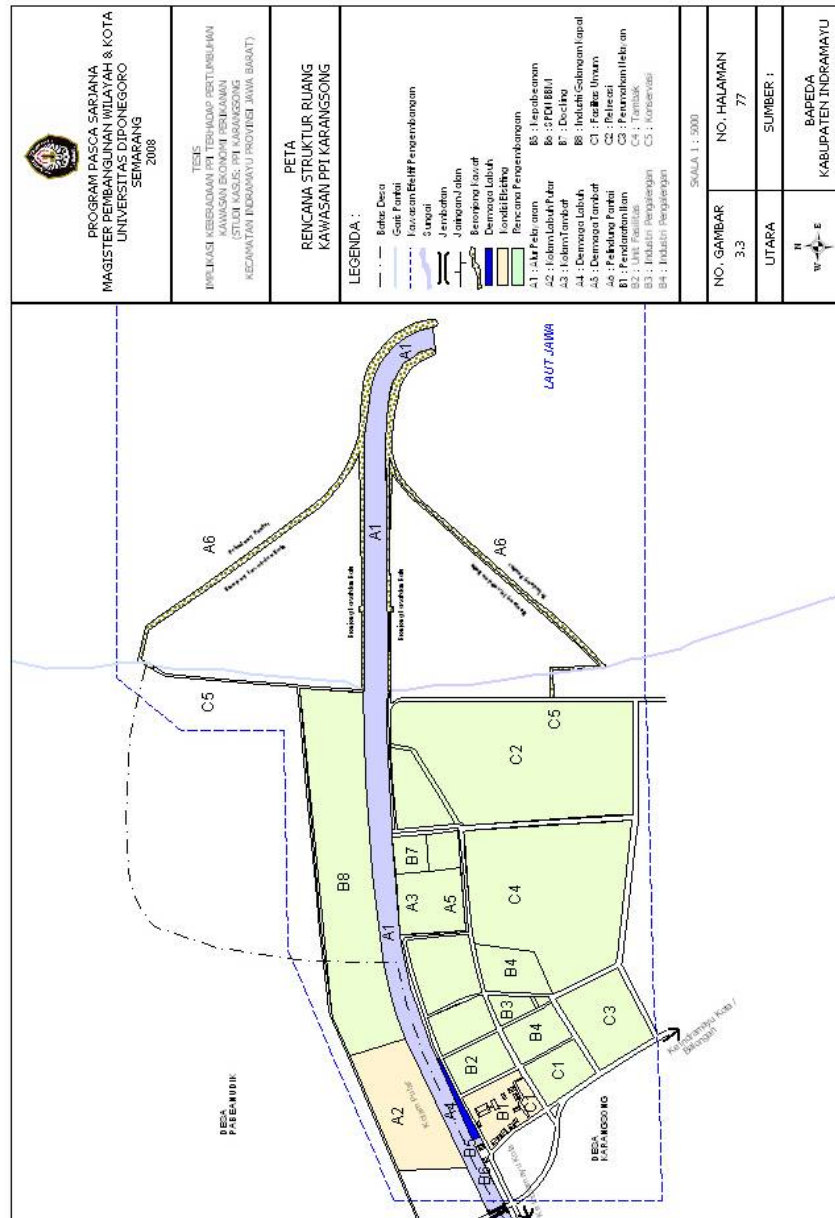
D) Zona IV

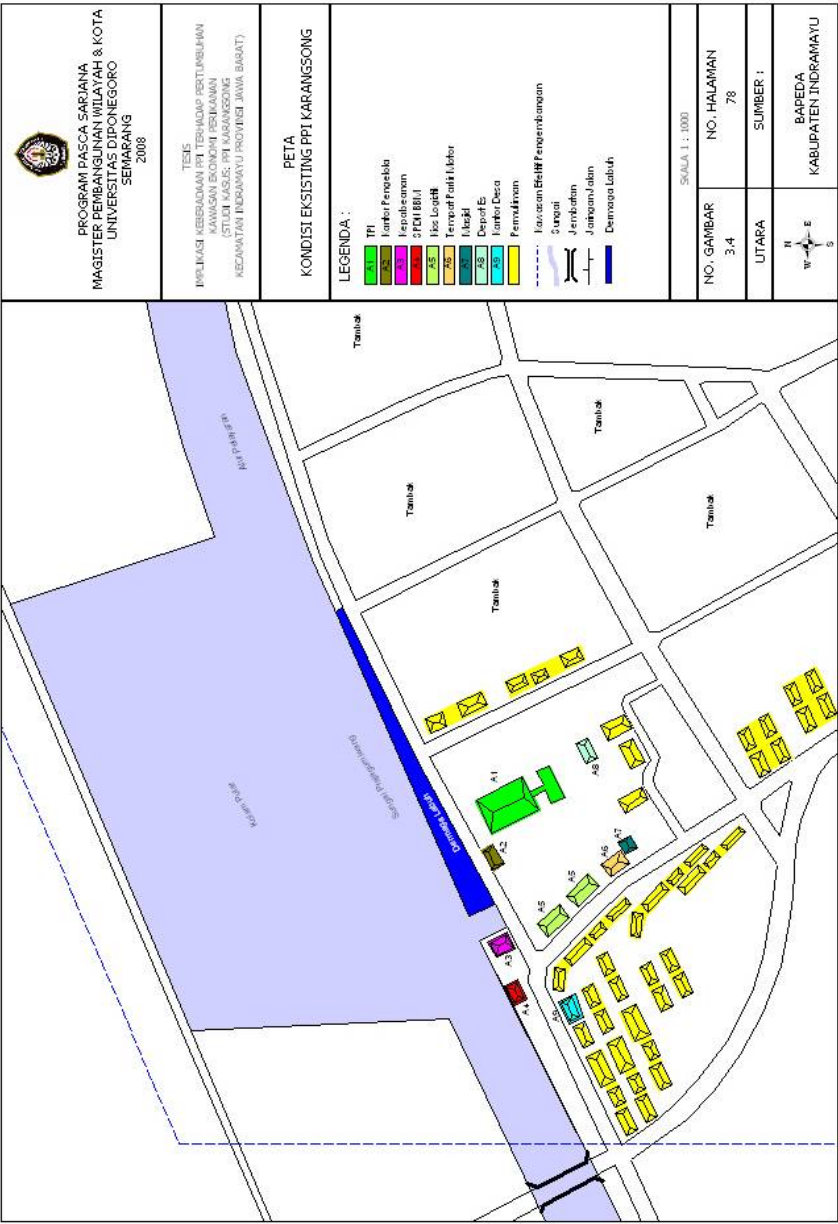
Zona IV diarahkan untuk memperhatikan aspek lingkungan terutama keadaan tanaman *mangrove* (pohan bakau) dan ekosistem pantai, dalam pengembangan Kawasan PPI Karangsong perlu diupayakan areal konservasi berupa ruang sempadan pantai pada radius 100 meter dari garis pantai yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan jenis vegetasi berupa tanaman *mangrove* (pohan bakau).

Untuk mengetahui peta struktur tata ruang Kawasan PPI Karangsong dan kondisi eksisting PPI Karangsong dapat di lihat pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.

3.3. Kondisi Fisik Kawasan PPI Karangsong

Secara geografis Kawasan PPI Karangsong terletak pada koordinat $06^{\circ}18'45''$ dan $06^{\circ}19'45''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}21'30''$ dan $108^{\circ}22'30''$ Bujur Timur. Kawasan PPI Karangsong berada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, yang berjarak $\pm 4,5$ km dari pusat ibu kota Kabupaten Indramayu. Lokasi PPI Karangsong berada di sekitar pesisir Laut Jawa yang letaknya berada masuk di bagian dalam dari bibir pantai.



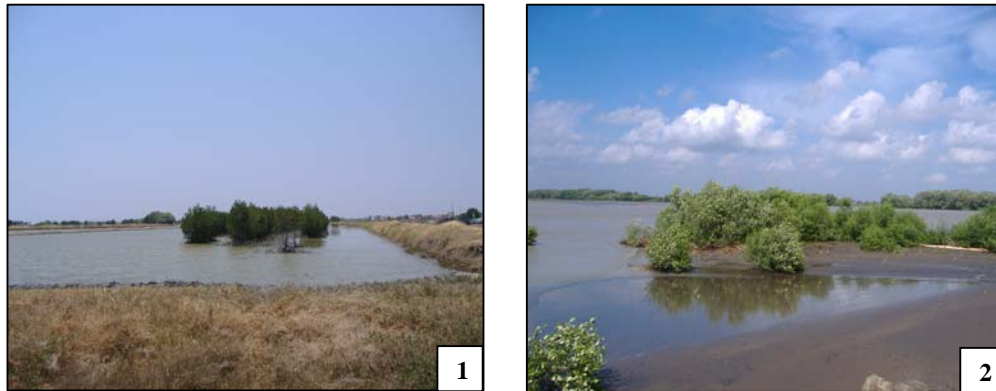


Keberadaan PPI Karangsong tidak lepas dari adanya peranan Sungai Prajagumiwang yang berfungsi sebagai alur pelayaran keluar masuk kapal atau perahu ke pelabuhan. Kondisi saat ini, Sungai Prajagumiwang sering mengalami pendangkalan yang diakibatkan lumpur atau material endapan yang terbawa dari Sungai Prajagumiwang. Berdasarkan hasil pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan (PPGL) Bandung, garis pantai (*coastline*) Kawasan Karangsong mengalami *akresi* (maju ke laut) mencapai 1 meter hingga 40 meter per tahun sebagai akibat pertumbuhan delta Cimanuk. Material berupa pasir dan lumpur mengalir ke pesisir delta Cimanuk dan kawasan pesisir di sekitarnya membentuk gosong-gosong pasir dan menutupi sedimen permukaan perairan Indramayu. Adanya pertumbuhan Delta Cimanuk telah membentuk kawasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan biota-biota laut yang sangat berharga (Darlan, 2007).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar penggunaan lahan kawasan PPI Karangsong berupa lahan tambak ikan, yang dibudidayakan masyarakat setempat untuk jenis ikan air payau berupa ikan bandeng dan udang windu. Di sepanjang garis pantai Karangsong ditumbuhi tanaman *mangrove* (pohon bakau) yang tumbuh dengan sendirinya maupun yang di tanam oleh masyarakat sekitar, bahkan masyarakat setempat juga menanam *mangrove* di lahan tambaknya. Keberadaan tanaman *mangrove* di sepanjang bibir pantai Karangsong dapat mengeleminir terjadinya abrasi berupa pengikisan daerah pantai terhadap gerusan ombak. Selain itu tanaman *mangrove* dapat menjadi tempat bagi biota laut untuk mencari sumber makanan. Kondisi ini tergolong sudah dapat membantu mencegah pada kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh

kepedulian masyarakat setempat dalam mengelola lahan tambak di sekitar pinggir pantai Karangsong.

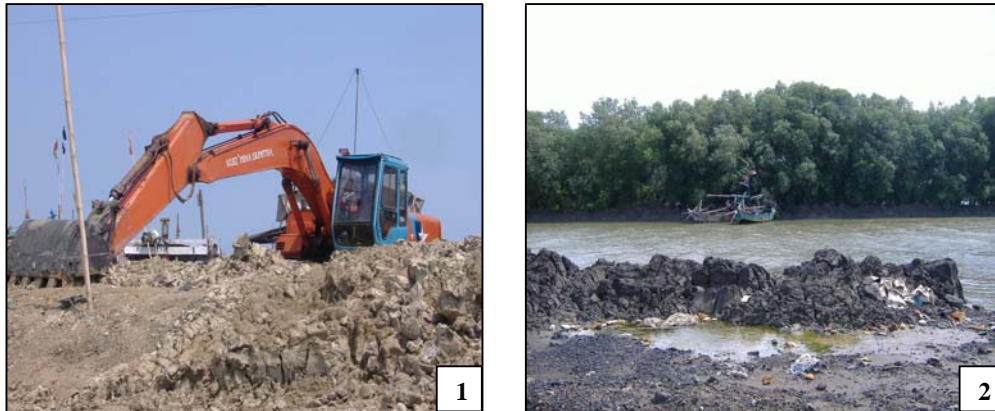
Untuk mengetahui Penggunaan lahan tambak di sekitar Kawasan PPI Karangsong dapat di lihat pada Gambar 3.5 berikut ini.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 3.5
PENGUNAAN LAHAN TAMBAK
(1) LAHAN TAMBAK (2) TUMBUHAN MANGROVE SEPANJANG
PANTAI KARANGSONG

Pendangkalan Sungai Prajaguming yang diakibatkan oleh sedimentasi material lumpur maupun pasir, saat ini dilakukan upaya secara rutin dengan melakukan pengerukan menggunakan alat berat (*backhu*) di sepanjang jalur pelayaran kapal yang mengalami pendangkalan. Pengerukan endapan lumpur di Sungai Prajagumiwang diupayakan oleh pihak pengelola PPI Karangsong, dalam hal ini oleh Koperasi Mina Sumitra. Dengan adanya upaya pengerukan secara rutin, dapat mengeliminir permasalahan bagi kapal motor yang akan melintasi jalur pelayaran pada Sungai Prajagumiwang Untuk mengetahui kondisi pengerukan pendangkalan Sungai Prajagumiwang dapat di lihat pada Gambar 3.6.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 3.6
PENDANGKALAN SUNGAI PRAJAGUMIWANG
(1) Pengerukan Lumpur dengan Alat Berat
(2) Tumpukan Material Lumpur Hasil Pengerukan

Selain lahan tambak, penggunaan lahan lainnya yang ada di sekitar Kawasan PPI Karangsong adalah permukiman nelayan. Sebagian besar lahan permukiman berada di sekitar lahan tambak dan di sepanjang pinggir Sungai Prajagumiwang, hal ini berkaitan dengan menunjang aktivitas masyarakat nelayan Karangsong yang dapat memberikan kemudahan bagi para nelayan pencari ikan untuk membuat perahu maupun membawa perahu dengan menyandarkan armadanya dekat dengan sekitar tempat tinggalnya. Ada juga perumahan yang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai akibat adanya relokasi permukiman nelayan Kali Adem Jakarta Utara yang dulunya sebagian besar merupakan nelayan pendatang dari Wilayah Kabupaten Indramayu. Untuk mengetahui kondisi lahan permukiman sekitar Kawasan PPI Karangsong dapat di lihat pada Gambar 3.7.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 3.7
PENGUNAAN LAHAN PERMUKIMAN
(1) PERMUKIMAN SEKITAR TPI KARANGSONG, (2) PERMUKIMAN
SEKITAR PINGGIR SUNGAI PRAJAGUMIWANG, (3) PINTA MASUK
PERUMAHAN NELAYAN KARANGSONG (4) PERUMAHAN NELAYAN
KARANGSONG

3.4. Kondisi Kelautan

Hasil kajian kelautan atau *oceanografi* kedalaman laut pantai Karangsong berdasarkan data *bathimetri* tahun 2003 pada bentang pantai sepanjang 2.000 m garis pantai dan ke arah laut sampai dengan kedalaman 4,50 meter, dapat diketahui kedalaman laut pantai Karangsong sedalam ± 2 meter rata-rata berjarak 900 meter dari garis pantai, seperti terlihat pada Tabel III.2.

TABEL III.2
KEDALAMAN LAUT DAN JARAK PANTAI

No	Kedalaman Laut (m)	Jarak dari Garis Pantai (m)	Kemiringan (%)
1	0,00	480,00	0,003
2	-1,00	620,00	0,003
3	-2,00	900,00	0,003
4	-3,00	1.240,00	0,003
5	-4,00	1.620,00	0,003
6	-5,00	2.000,00	0,003

Sumber : Puslitbang Balai Rawa dan Pantai Kimpraswil, 2003

Berdasarkan hasil pengamatan pasang surut yang dilakukan oleh Balai Rawa dan Pantai Propinsi Jawa Barat tahun 2003, kondisi pasang surut pantai Karangsong dalam 24 jam terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi pasang sekitar 0,76 m. Untuk lebih jelas lihat Tabel III. 3.

Arah dan kecepatan angin sangat menentukan dalam pengembangan kegiatan pelabuhan dan pelayaran. Keadaan angin Pantai Karangsang dominan dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 3 - 5 meter/detik, sedangkan yang terkecil dari arah selatan. Untuk lebih jelas lihat Tabel III.4.

TABEL III.3
KARAKTERISTIK TINGGI AIR MUKA

Kondisi Pasang Surut	Elevasi
HWL	0.84
MSL	0.12
LWL	0.00

Sumber : Puslitbang Balai Rawa dan Pantai Kimpraswil, 2003

*Keterangan : HWL : Maksimum tinggi muka air
MSL : Rata-rata
LWL : Minimum tinggi mukai air*

TABEL III.4
PROSENTASE FREKUENSI KEJADIAN ANGIN

Arah	Kecepatan Angin (m/detik)							Jumlah
	Calm	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11	> 11	
	10,02							10,02
Utara		3,02	6,06	1,05	0,11	-	0,03	10,02
Timur Laut		3,58	12,15	4,09	0,57	0,05	0,03	10,27
Timur		0,54	2,21	1,62	0,30	0,03	-	20,47
Tenggara		1,94	6,44	2,29	0,22	0,03	-	4,70
Selatan		1,32	2,32	0,67	0,03	0,03	-	10,92
Barat Daya		1,64	5,36	5,17	2,48	1,21	0,19	4,37
Barat		0,92	2,56	1,99	1,45	0,46	0,13	16,05
Barat Laut		6,19	6,76	1,99	0,59	0,11	0,08	7,51
Total	10,2	19,15	43,85	18,88	5,74	1,91	0,46	15,72
Kumulatif	10,2	29,17	73,01	91,89	97,36	99,54	100,00	100,00

Sumber : Puslitbang Balai Rawa dan Pantai Kimpraswil, 2003

Berdasarkan data dari Puslitbang Rawa dan Pantai Jawa Barat, karakter arus pasang surut di kawasan pantai Karangsong, lokasi jeti dan di sekitar dermaga Sungai Prajagumiwang, arus dominan yang terjadi bergerak ke arah barat dan utara. Kecepatan arus berkisar antara 0,22 m/detik sampai dengan 0,27 m/detik, sedangkan kecepatan arus didepan pelabuhan pada saat *neap fide* dan *spring tide*, arus bergerak keluar masuk. Kecepatan arus berkisar antara 0,19 m/detik sampai dengan 0,26 m/detik, Kecepatan arus pasang surut akan mencapai maksimum pada saat permukaan laut berada pada posisi duduk tengah (*mean sea level*) dan semakin melemah pada waktu mendekati pasang tertinggi maupun surut terendah.

3.5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan PPI Karangsong dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi-kondisi dari aspek kependudukan dan sosial ekonomi.

3.5.1. Matapencaharian Penduduk

Penduduk Kabupaten Indramayu yang bermatapencaharian sebagai nelayan pada tahun 2004 sebanyak 26.518 orang, dominasi jumlah nelayan ini tersebar di Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Kandanghaur, dimana di wilayah ini terdapat fasilitas PPI yang besar yakni PPI Eretan, PPI Karangsong dan PPI Dadap. Komposisi nelayan yang ada di Kabupaten Indramayu terdiri dari nelayan tetap, sambilan dan pendatang. Perkembangan nelayan selama periode tahun 2000-2004 rata-rata sebesar 2,38%, dimana tingkat perkembangan nelayan pendatang cukup mendominasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.5.

TABEL III.5
JUMLAH NELAYAN PENANGKAP IKAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Status Nelayan	Jumlah Nelayan					Tingkat Perkembangan				Rata-rata
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	
							2001	2002	2003	2004	
1	Tetap	18.430	18.679	18.679	18.811	19.294	0,64 %	0,71 %	0,71 %	2,57 %	1,16 %
2	Sambilan	5.247	5.630	5.630	5.703	5.701	4,17 %	3,00 %	1,30 %	-0,04 %	2,11 %
3	Pendatang	1.318	1.589	1.589	1.505	1.523	11,99 %	7,66 %	-5,29 %	1,20 %	3,89 %
	Jumlah	24.995	25.898	25.898	26.019	26.518	5,60 %	3,79 %	-1,09 %	1,24 %	2,38 %

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2005

Jumlah nelayan menurut status nelayan di Kecamatan Indramayu berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu terdiri dari nelayan pemilik dan buruh nelayan. Sedangkan jumlah pedagang pengepul (bandar/juragan) menurut jenis ikan terdiri dari pedagang ikan Es esan (ikan beku), pedagang ikan asin, pedagang ikan pindang dan terasi.

Menurut data tahun 2006, jumlah status nelayan di Kecamatan Indramayu yang paling banyak adalah buruh nelayan sebanyak 4.469 orang sedangkan status nelayan pemilik sebanyak 756 orang. Nelayan pemilik tersebut merupakan pemilik kapal/perahu baik yang berukuran besar maupun kecil. Adapun untuk lebih jelasnya jumlah nelayan menurut status dan pedagang ikan dapat dilihat pada Tabel III.6

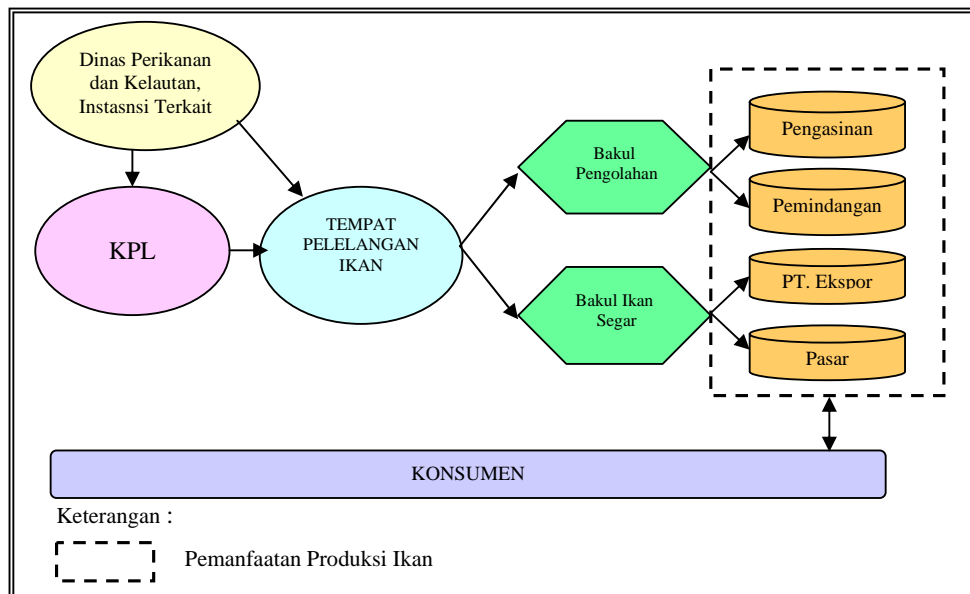
TABEL III.6
JUMLAH NELAYAN MENURUT STATUS DAN PEDAGANG
DI KECAMATAN INDRAMAYU

	Status		
	Pemilik	Buruh	Bakul/Pedagang Pengepul
Jumlah	756	4.469	106

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2006

Jumlah nelayan yang merupakan anggota tetap Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra sebanyak 337 nelayan. Umumnya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan ini masih bersifat tradisional, dalam arti kelengkapan alat tangkap armada tidak dilengkapi dengan fasilitas *fishing ground* sehingga produktivitasnya belum mencapai optimal, Namun demikian, pembinaan nelayan oleh KPL Mina Sumitra maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu umumnya sudah cukup baik terutama mengenai pelayanan dan pengaturan tata niaga pelelangan.

Adapun sistem tata niaga dan pelayanan hasil tangkapan nelayan di PPI Karangsong seperti terlihat pada Gambar 3.8 sudah menunjukkan pola pengaturan tata niaga yang terarah.



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2006

GAMBAR 3.8
SISTEM TATA NIAGA, PEMBINAAN, PELAYANAN DAN PEMASARAN
IKAN TANGKAPAN NELAYAN PPI KARANGSONG

3.5.2. Aspek Perekonomian

PDRB Kecamatan Indramayu tahun 2005 sebesar Rp. 724.270,68 didominasi oleh sektor pertanian sebesar Rp. 315.555,37 dan disusul sektor perdagangan sebesar Rp. 244.995,42. Nilai PDRB sub-sektor perikanan tahun 2002-2005 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan perolehan dari sub-sektor perikanan selalu mengalami perkembangan. Sub sektor ini mencakup kegiatan perikanan laut, perikanan darat dan pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan). Pada tahun 2002 nilai PDRB sub-sektor perikanan sebesar Rp. 275.199,97 dan tahun 2005 sebesar Rp. 283.753,95. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.7 PDRB Kecamatan Indramayu tahun 2002-2005.

TABEL III. 7
PDRB KECAMATAN INDRAMAYU ATAS HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2002-2005 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

No.	LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;	307.141,42	305.670,69	309.853,39	315.555,37
	a. Tanaman Bahan Makanan	24.658,75	24.521,12	25.675,99	25.941,16
	b. Tanaman Perkebunan	516,55	390,83	391,40	485,76
	c. Peternakan	6.309,73	4.855,97	4.893,69	4.908,66
	d. Kehutanan	456,42	461,94	463,63	465,84
	e. Perikanan	275.199,97	275.440,83	278.428,68	283.753,95
2.	Pertambangan dan Penggalian (tanpa migas)	207,68	209,53	209,70	209,92
3.	Industri Pengolahan (tanpa migas)	17.578,72	17.752,82	17.840,17	17.955,43
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.700,37	6.356,23	6.661,29	6.895,93
5.	Bangunan	12.552,80	13.521,65	13.974,53	14.478,28
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	168.446,71	208.900,37	226.270,82	244.995,42
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	53.360,74	58.060,63	59.535,42	60.662,48
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa	18.090,07	18.874,15	19.401,15	20.050,54
9.	Jasa-jasa	37.987,77	40.453,74	41.804,37	43.467,32
JUMLAH		622.066,28	669.799,82	695.550,83	724.270,68

Sumber : BPS Kabupaten Indramayu, 2006

3.6 Kegiatan Produksi Perikanan dan Operasional Pendaratan Ikan

3.6.1 Kegiatan Perikanan Tangkap

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan Karangsong dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor permodalan, musim tangkapan, daerah tangkapan nelayan dan jenis armada yang digunakan. Armada kapal nelayan yang beroperasi pada wilayah kerja KPL Mina Sumitra pada tahun 2006 tercatat 616 unit terdiri dari kapal motor kapasitas lebih dari 15 Gross Ton (GT) sebanyak 188 unit dan kapal motor kapasitas 5-15 GT sebanyak 148 unit, serta kapal motor tempel kapasitas 1-2 GT sebanyak 280 unit. Untuk mengetahui bentuk ukuran jenis kapal motor berdasarkan kemampuan kapasitas muat dapat di lihat pada Gambar 3.9.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 3.9
JENIS UKURAN KAPAL MOTOR NELAYAN KARANGSONG
(1) UKURAN 1-2 GT, (2) UKURAN 5-15 GT, (3) UKURAN > 15 GT

Pola dan jadwal kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dapat dibedakan tergantung dari jenis armada, alat tangkap yang digunakan dan daerah tangkapan. Kemampuan kapal motor kapasitas 5 GT hingga lebih dari 15 GT dapat mencapai daerah tangkapan sampai ke perairan Laut Jawa, Kalimantan dan Sumatera dengan waktu pelayaran mencapai 1 sampai 2 bulan dan untuk kapal motor tempel kapasitas 1-2 GT dapat mencapai perairan Indramayu, Cirebon dan Ciasem (Subang) dengan waktu pelayaran 1, hingga 2 hari. Frekuensi rata-rata kapal nelayan yang terkoordinir oleh KPL Mina Sumitra yang berlabuh dan mendaratkan ikan di PPI Karangsong sebanyak 161 kapal terdiri dari berbagai jenis kapasitas muat. Untuk jelasnya dapat dilihat Tabel III.8.

TABEL III.8
POLA, JADUAL TANGKAP DAN LABUH NELAYAN DI
PPI KARANGSONG

No.	Jenis Armada	Kapasitas (GT)	Jumlah (Unit)	Alat Tangkap	Jadual (Hari)		Frekuensi Kapal/Hari (Unit)	Wilayah Operasional Tangkapan
					Berlayar	Labuh		
1	Kapal Motor	28 – 30	71	Jaring Nylon	25	4	3	Perairan Jawa, Sumatra, Kalimantan
2	Kapal Motor	20 – 27	117	Jaring Nylon	30	5	4	
3	Kapal Motor	10 – 15	137	Jaring Rampus	15	3	9	
4	Kapal Motor	5 – 10	7	Jaring Insang	30	5	2	
5	Kapal Motor Tempel	1 – 2	164	Jaring Udang	1	1	82	Perairan Indramayu, Cirebon, Ciasem (Subang)
6	Kapal Motor Tempel	1 – 2	84	Jaring Rajungan	1	1	42	
7	Kapal Motor Tempel	1 – 2	25	Otok	1	1	13	
8	Kapal Motor Tempel	1 – 2	11	Arad	1	1	6	
Jumlah			616				161	

Sumber : KPL Mina Sumitra, 2006

Jumlah armada kapal yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Indramayu pada tahun 2004 tercatat sebanyak 4.161 unit terdiri dari berbagai jenis kapasitas, apabila dengan asumsi 50 % dari jumlah armada kapal nelayan Kabupaten Indramayu menggunakan fasilitas PPI Karangsong, maka diperkirakan frekuensi kapal berlabuh sekitar 122 unit. Dengan demikian, frekuensi kegiatan labuh dan berlayar kapal yang terjadi di PPI Karangsong seluruhnya sebanyak 122 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.9

TABEL III.9
JUMLAH ARMADA, JADUAL TANGKAP DAN LABUH KAPAL
NELAYAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Jenis Armada	Kapasitas (GT)	Jumlah (Unit)	Okupansi PPI (50%) Karangsong	Jadual (Hari)		Frekuensi Kapal/Hari (Unit)
					Berlayar	Labuh	
1	Kapal Motor	> 30	283	142	25	4	6
2	Kapal Motor	10 – 30	788	394	30	5	13
3	Kapal Motor/Tempel	< 10	3.090	1.545	15	3	103
Jumlah			4.161	2.081			122

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2004

3.6.2. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Produksi ikan laut hasil tangkapan nelayan Kabupaten Indramayu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2006, produksi terbesar diperoleh pada tahun 2004 dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 41,38 %. Dalam kurun waktu 12 tahun selalu terjadi kenaikan dan penurunan produksi. Angka penurunan cukup besar terjadi pada periode tahun 1999-2000 (-14,55 %) dan periode tahun 2002-2003 (-13,05%).

Dari total produksi kabupaten tersebut, yang didaratkan di PPI Karangsong rata-rata per tahun pada periode tahun 2000 - 2006 sekitar 13,44 %, dengan perkembangan jumlah ikan yang didaratkan cukup stabil. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah produksi hasil tangkapan seluruh nelayan Kabupaten Indramayu dan jumlah produksi yang di daratkan PPI Karangsong dapat dilihat pada Tabel III.10 dan Tabel III.11.

TABEL III.10
PRODUKSI, NILAI PRODUKSI DAN PERKEMBANGAN HASIL
TANGKAP IKAN LAUT KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Produksi	Perkembangan	
				Produksi	Nilai Produksi
1	1995	13.853.177	Rp. 14.250.869.635		
2	1996	19.359.280	Rp. 19.978.663.960	39,75 %	40,19 %
3	1997	20.039.080	Rp. 22.039.858.900	3,51 %	10,32 %
4	1998	20.745.958	Rp. 25.589.816.940	3,53 %	16,11 %
5	1999	17.728.114	Rp. 22.250.041.900	-14,55 %	-13,05 %
6	2000	16.658.169	Rp. 26.138.537.575	-6,04 %	17,48 %
7	2001	18.882.183	Rp. 30.513.099.100	13,35 %	16,74 %
8	2002	18.877.380	Rp. 77.751.925.800	-0,03 %	154,81 %
9	2003	17.443.687	Rp. 67.438.998.800	-13,26 %	-13,26 %
10	2004	24.420.324	Rp. 95.648.428.670	41,83 %	41,83 %
11	2005	21.324.242	Rp. 116.071.232.600	-12,69 %	21,35 %
12	2006	25.205.291	Rp. 134.380.384.100	18,20 %	15,77 %
Rata-rata				6,69 %	28,03 %

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2007

TABEL III.11
PRODUKSI, NILAI PRODUKSI DAN PERKEMBANGAN IKAN YANG
DIDARATKAN DI PPI KARANGSONG

No.	Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Produksi	Perkembangan	
				Produksi	Nilai Produksi
1	2000	5.108.283	Rp. 29.266.249.100		
2	2001	5.189.590	Rp. 35.025.690.000	1,59 %	19,68 %
3	2002	5.729.397	Rp. 37.679.271.500	10,40 %	7,58 %
4	2003	6.634.415	Rp. 39.010.865.100	15,80 %	3,53 %
5	2004	7.827.053	Rp. 51.088.371.600	17,98 %	30,96 %
6	2005	9.562.367	Rp. 71.675.831.200	22,17 %	40,30 %
7	2006	10.775.665	Rp. 82.689.578.500	12,68 %	15,37 %
Rata-rata				13,44 %	19,57 %

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2007

Jenis ikan hasil tangkapan sangat menentukan terhadap nilai jual ikan. Komoditas ekspor hasil tangkapan nelayan Kabupaten Indramayu terdiri dari jenis ikan udang, kakap merah, kakap putih, udang jerbung, sirip hiu, tulang hiu dan udang windu. Jenis komoditas ekspor yang mengalami peningkatan adalah sirip hiu.

Hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPI Karangsong terdiri dari jenis ikan besar dan ikan kecil, diantara jenis ikan tersebut terdapat komoditas ekspor. Kontinuitas hasil tangkapan nelayan setiap bulannya cukup stabil. Menurut data informasi dari Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Indramayu (2005), jumlah hasil tangkapan yang didaratkan dan di lelang di PPI Karangsong setiap bulannya cukup stabil, yang diperkirakan setiap harinya sekitar 21,74 ton. Untuk mengetahui produksi komoditas ekspor hasil tangkapan nelayan Kabupaten Indramayu dapat di lihat pada Tabel III.12 dan untuk jenis tangkapan ikan yang didaratkan di PPI Karangsong dapat di lihat pada Tabel III.13.

TABEL III.12
PRODUKSI KOMODITAS EKSPOR TANGKAPAN NELAYAN
KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)					Perkembangan
		2000	2001	2002	2003	2004	
1	Udang	2.628,50	2.001,00	2.580,70	2.659,70	2.529,00	0,81 %
2	Kakap Merah	951,80	1.165,10	2.025,90	2.102,70	2.028,70	24,14 %
3	Kakap Putih	1.148,20	1.202,20	1.409,40	1.512,90	2.302,50	20,37 %
4	Udang Jerbung	3,41	3,60	4,20	3,95	4,20	5,65 %
5	Sirip Hiu	127,20	229,70	689,00	703,30	643,30	68,52 %
6	Cumi-cumi	725,00	683,00	703,00	945,00	1.056,00	10,83 %
7	Teri Nasi	5.059,20	3.337,00	3.075,50	3.169,30	2.981,80	-11,19 %
8	Tulang Hiu	23,81	24,05	24,05	25,95	52,60	27,98 %
9	Udang Windu	12.168,72	10.040,48	10.040,48	12.489,20	12.917,70	2,40 %
Jumlah / Rata-rata		22.835,84	18.686,13	22.550,30	23.612,00	24.515,80	16,61 %

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2005

Nilai produksi ikan hasil tangkapan nelayan Kabupaten Indramayu pada tahun 2006 mencapai sebesar Rp. 134.380.384.100 perkembangan nilai produksi ini selalu terjadi peningkatan rata-rata pertahunnya selama periode tahun 1995 - 2006 sebesar 15,77 %, sedangkan perkembangan produksi selama periode tersebut sebesar 18,20 %.

Nilai produksi ikan hasil tangkapan yang dilelangkan di PPI Karangsong pada tahun 2006 mencapai nilai Rp. 82.689.578.500. Bila dibandingkan dengan nilai produksi pada tingkat kabupaten di atas, maka kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari separuhnya dari seluruh kegiatan transaksi perikanan hasil tangkapan di Kabupaten Indramayu terjadi di PPI Karangsong, yakni sebesar 61,53 %.

Perkembangan dan besarnya nilai produksi ikan hasil tangkapan seperti pada Tabel III.11 tersebut selalu mengalami perubahan, dimana harga satuan dapat ditentukan oleh, sarana alat tangkap yang digunakan, jumlah tangkapan, banyaknya permintaan (bakul) dan faktor-faktor lain tergantung situasi pelelangan. Beberapa jenis ikan yang didaratkan di PPI Karangsong diantaranya terdapat komoditas ekspor seperti kakap merah, kakap putih dan cumi-cumi. Jenis ikan yang mempunyai nilai produksi tertinggi adalah tongkol.

TABEL III.13
JENIS IKAN HASIL TANGKAPAN LAUT YANG DIDARATKAN DI PPI KARANGSONG

No	Jenis Ikan	Hasil Tangkapan per Bulan (Ton)												Total Tahunan		Nilai Produksi (Rp.)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah	Rata-rata	
1	Layang	0,08	0,053	0,03	0,01	0,06	0,04	0,02	0,04	0,1	0,1	0,2	0,4	1,18	0,15	6.636.500
2	Bawal Hitam	20,39	53,65	41,60	29,64	27,16	30,91	25,48	83,25	26,62	49,6	22,1	17,9	428,28	53,54	4.625.460.500
3	Kembung	3,12	3,62	92,76	19,68	2,95	35,71	4,25	3,38	25,0	57,0	9,1	4,7	261,20	32,65	1.209.500.800
4	Selar	0,80	0,95	0,65	10,16	3,29	3,47	10,35	9,98	1,9	2,0	2,1	5,1	50,67	6,33	232.308.000
5	Tembang	0,03	0,06	0,02	0,01	0,07	0,04	0,07	0,05	0,1	0,2	0,2	0,2	1,02	0,13	2.698.000
6	Kuniran	0,10	0,16	0,01	0,01	0,02	0,05	0,05	0,01	0,0	0,0	0,0	-	0,44	0,06	310.800
7	Tongkol	263,56	201,75	145,73	273,16	221,31	254,76	134,94	190,53	469,1	423,7	271,4	242,5	3.092,41		17.762.949.900
8	Talang-talang	0,05	0,04	0,07	0,03	0,06	0,14	0,04	0,57	0,3	0,5	0,2	0,2	2,17	0,27	9.561.000
9	Lemuru	0,05	0,10	0,02	0,01	0,04	0,06	0,07	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,76	0,09	1.792.000
10	Klayaran	4,54	15,32	8,72	14,40	15,88	18,39	6,55	11,40	9,3	20,8	10,1	9,1	144,45	18,06	604.035.500
11	Tenggiri	41,54	74,57	55,47	43,53	35,45	38,21	70,82	94,86	62,4	56,1	46,9	44,6	664,46	83,06	6.450.404.400
12	Cumi-cumi	0,12	0,25	0,12	0,93	1,03	1,88	2,68	0,1	1,2	0,0	1,2	-	10,16	1,27	127.043.500
13	Alamkao	0,89	3,76	2,14	4,81	2,97	3,51	3,90	5,75	5,7	5,7	2,8	2,5	44,48	5,56	182.561.500
14	Gatet	0,04	0,22	0,22	0,03	0,05	0,25	0,25	0,52	0,0	0,1	0,0	-	1,66	0,21	6.636.000
15	Manyung	88,44	120,75	90,97	72,31	61,55	66,79	64,91	90,62	115,1	106,8	143,3	90,1	1.111,66	138,96	6.177.786.000
16	Remang	11,62	52,07	31,76	33,52	27,99	31,84	31,02	39,66	18,3	55,8	38,1	144,4	516,03	64,50	3.407.983.700
17	Cucut	66,63	74,98	57,89	60,46	42,03	48,82	54,85	60,55	20,4	35,8	47,8	30,5	600,77	75,10	3.538.344.500
18	Pari	3,13	10,06	7,53	2,65	3,05	5,95	1,83	5,11	5,1	5,3	5,2	3,6	58,53	7,32	205.503.000
19	Kakap Putih	0,05	0,06	0,06	0,17	0,17	0,19	0,10	0,25	2,2	1,3	0,3	0,1	4,90	0,61	63.156.500
20	Blidah	0,80	6,59	3,15	2,28	3,66	6,19	2,25	4,40	4,7	6,2	3,6	3,0	46,80	5,85	212.852.000
21	Kakap Merah	51,50	73,48	58,49	20,96	18,77	21,20	22,45	30,04	30,0	23,7	47,4	19,1	417,10	52,14	5.186.628.000
22	Krempul	0,22	3,32	0,01	0,16	0,60	1,37	1,03	2,04	1,0	1,2	0,1	2,5	13,53	1,69	87.107.500
23	Ikan Campur	17,74	25,26	31,03	47,41	32,45	31,75	15,88	15,10	33,0	52,0	29,3	23,5	354,40	44,30	987.111.400
	Jumlah	575,42	721,05	628,44	636,30	500,59	601,51	452,99	650,9	830,5	905,1	680,4	643,9	7.827,053	978,38	51.088.371.600

Sumber : KPL Mina Sumitra Kecamatan Indramayu, 2005

Dengan semakin meningkatnya jumlah armada perikanan yang akan mendaratkan hasil produksi di PPI Karangsong maka kegiatan bakul dan pengolah ikan akan semakin meningkat, karena jumlah produksi hasil tangkapan selalu mengalami penambahan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari KPL Mina Sumitra bahwa hasil produksi yang didaratkan di PPI Karangsong di dominasi oleh ikan jenis tongkol, pemasaran hasil produksinya berupa jenis ikan segar maupun ikan olahan dipasarkan oleh bakul ikan untuk beberapa wilayah, diantaranya:

- ↳ 20 % didistribusikan untuk Wilayah Indramayu dan sekitarnya.
- ↳ 80 % didistribusikan keluar Wilayah Indramayu, diantaranya ke Jakarta, Bandung, Subang, Cirebon Kuningan, dan Majalengka

Kualitas ikan di PPI Karangsong cukup baik karena dapat selesai dalam satu hari dengan hasil tangkapan terbesar berupa ikan tongkol.

3.6.3. Fasilitas dan Operasional PPI Karangsong

Hasil pengamatan di lapangan, fasilitas PPI Karangsong terdiri dari:

- a. Fasilitas pokok berkaitan dengan zona fasilitas laut, diantaranya;
 - ↳ Dermaga labuh sepanjang ± 100 m berfungsi sebagai tempat mendaratkan ikan.
 - ↳ Pada saat pemetaan di lapangan, kolam putar (manuver kapal) baru selesai dibangun dan sudah mulai difungsikan.
 - ↳ Alur pelayaran dan jetty sepanjang ± 1 km dilengkapi dengan rambu pelayaran.

- ↳ Tempat labuh tambat yang berfungsi untuk memarkirkan kapal motor menunggu giliran untuk mendaratkan ikan di dermaga labuh.
 - ↳ Perlindungan pantai yang ditanami tanaman *mangrove* (pohon bakau)
- b. Fasilitas fungsional yang berkaitan dengan zona fasilitas darat, meliputi:
- ↳ Tempat pelelangan ikan
 - ↳ Pagar keliling terbuat dari pasangan *conbblok* dan pagar besi BRC
 - ↳ Jaringan listrik
 - ↳ Genset
 - ↳ Depot es
 - ↳ Tempat penanganan ikan berfungsi untuk proses pengepakan ikan
 - ↳ Sarana air pengolahan
 - ↳ Sarana Pompa BBM
 - ↳ Sambungan Telepon
 - ↳ Kios Logistik
 - ↳ Sarana ibadah (masjid)
 - ↳ Tempat parkir

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh pihak Bapeda Kabupaten Indramayu Tahun 2007, terhadap penilaian kondisi fasilitas PPI Karangsang baik fasilitas yang sudah ada maupun fasilitas yang belum ada, berkaitan dengan berlangsungnya aktivitas PPI Karangsang saat ini, secara rinci dapat di lihat pada Tabel III.14.

TABEL III.14
KONDISI FASILITAS PPI KARANGSONG

No.	Fasilitas	Element PPI	Keterangan/ Penilaian
1.	Pokok	Tempat labuh	Memadai
		Dermaga labuh	Cukup memadai
		Kolam labuh/putar	(Baru selesai dibangun dan sudah digunakan)
		Alur pelayaran / aliran sungai	Memadai (perlu perhatian khusus karena adanya sedimentasi)
2	Fungsional	Tempat pelelangan ikan	Memadai
		Stasiun pengisian solar	memadai
		Gudang Pendinginan ikan	Belum ada
		Fasilitas Navigasi	Memadai
		Fasilitas pengolahan dan penanganan ikan	Memadai
		Fasilitas pengolahan limbah	Belum ada
		Lahan parkir	Memadai
		Perdagangan umum	Memadai
		Tempat ibadah (masjid)	Memadai
		Bengkel perawatan	Belum memadai
		Generator listrik	Sudah ada
		Penerangan pelabuhan	Memadai
		Armada penangkapan ikan	Sangat memadai
		Kondisi alat tangkap	Sangat memadai
		Aksesibilitas transportasi	Memadai
		Air bersih	Memadai
		Sanitasi lingkungan	Kurang baik

Sumber: Bapeda Kabupaten Indramayu, 2007

3.6.4. Potensi dan Kendala Kegiatan Perikanan

Tinjauan aspek yang sudah diidentifikasi pada pembahasan sebelumnya, terdapat potensi dan kendala pengembangan kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsong..

Potensi tersebut diindikasikan sebagai berikut:

1. Adanya sarana alat tangkap berupa armada kapal motor dan perlengkapan alat tangkap lainnya dengan jumlah yang sangat memadai menunjukkan kemampuan dalam upaya melakukan penangkapan ikan di lautan lepas.
2. Adanya fasilitas PPI Karangsong yang terus dikembangkan, menjadi potensi yang baik dalam pengembangan kegiatan perikanan dengan terus melakukan upaya agar transaksi berlangsung di TPI Karangsong.
3. Adanya peran KPL Mina Sumitra sebagai pengelola PPI Karangsong, tergolong sudah memadai dalam upaya pengelolaan PPI Karangsong dan memfasilitasi penjualan ikan melalui proses pelelangan.
4. Adanya budaya di sekitar masyarakat PPI Karangsong, bahwa profesi nelayan

berlangsung secara turun temurun, hal ini menjadi potensi pengembangan kegiatan perikanan.

Adapun yang menjadi kendala diindikasikan sebagai berikut;

1. Mahalnya operasional kegiatan penangkapan ikan semenjak meningkatnya harga solar dipasaran, mengakibatkan sebagian nelayan Karangsong menggunakan minyak tanah, namun seiring dengan adanya pembatasan minyak tanah oleh pemerintah, maka penjualan minyak tanah dipasaran juga mengalami kelangkaan dan sulit untuk mencarinya.
2. Adanya kerjasama permodalan antara nelayan pencari ikan dan pemilik modal (juragan) cenderung merugikan pendapatan nelayan dalam sistem bagi hasil.
3. Adanya transaksi penjualan ikan di luar TPI Karangsong yang pada akhirnya akan mengurangi pemasukan bagi TPI dan pemerintah.
4. Kondisi fasilitas jalan lingkungan sekitar pelabuhan dan TPI Karangsong mengalami kerusakan dan sebagian berlubang pada jalan tanah berbatu, seperti pada Gambar 3.10.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 3.10
FASILITAS JALAN LINGKUNGAN KAWASAN PPI KARANGSONG
(1) JALAN PINTU MASUK KE TPI , (2) JALAN SEKITAR PELABUHAN

BAB IV

ANALISIS KEGIATAN USAHA PERIKANAN DI KAWASAN PPI KARANGSONG

4.1. Kegiatan Usaha Perikanan di Kawasan PPI Karangsong

Kegiatan usaha perikanan merupakan wujud aktivitas perekonomian yang membentuk suatu sistem bisnis perikanan yang berlangsung dalam Kawasan PPI Karangsong. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kegiatan perikanan sebagai sistem bisnis perikanan yaitu *“.....perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”*.

Bila dipahami lebih lanjut pengertian kegiatan perikanan terdiri dari be-beberapa tahapan, yakni tahap pra-produksi, produksi, sampai dengan pemasaran (pasca produksi). Masing-masing tahapan tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam sistem bisnis perikanan.

Terkait sebagai sistem bisnis perikanan, keberadaan PPI Karangsong menciptakan beberapa sub sistem yakni sebagai sub sektor agribisnis hulu diantaranya nelayan Karangsong melakukan penangkapan ikan di laut (produksi) yang selanjutnya memunculkan sub sektor jasa penunjang berupa industri pembuatan sarana alat tangkap perahu/kapal motor, kebutuhan keperluan logistik pelayaran nelayan antara lain; kebutuhan BBM solar dan minyak tanah, es, serta keperluan bahan makanan selama nelayan melaut (pra produksi). Kemudian terkait dalam sub

sektor hilir merupakan pemasaran hasil tangkapan ikan dan terdapat industri pengolahan ikan untuk di proses menjadi beberapa produk jenis olahan ikan (pasca produksi).

Rangkaian kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsong diidentifikasi menurut pelaku usaha dan jenis kegiatan yang terkait dalam sistem bisnis per-ikanan.

4.1.1. Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan

Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, pelaku usaha yang terkait dalam sistem bisnis kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsong diidentifikasi sebagai berikut:

4.1.1.1. Nelayan

Berdasarkan statusnya, nelayan pencari ikan di Kawasan PPI Karangsong diklasifikasikan menjadi 3, yakni pertama nelayan pemilik kapal/perahu (juragan), kedua nelayan pencari ikan/nelayan penggarap dan ketiga nelayan buruh. Berdasarkan data Tahun 2006, jumlah nelayan menurut status di Kecamatan Indramayu sebanyak 756 nelayan pemilik dan 4.469 nelayan buruh. Nelayan pemilik merupakan nelayan yang memiliki armada kapal yang dapat dibedakan menurut jenis kapalnya selanjutnya nelayan pencari ikan merupakan nelayan penggarap yang menggunakan sarana alat tangkap (perahu/kapal motor) dengan cara menyewa sarana alat tangkap (perahu/kapal motor) kepada pemilik kapal motor untuk mencari ikan, selanjutnya nelayan buruh pada umumnya merupakan pekerja atau anak buah kapal (ABK) dalam mencari/manangkap ikan yang bekerja pada kapal-kapal juragan atau bekerja pada nelayan penggarap, juga terdapat buruh yang bekerja di sekitar

pelabuhan dan pelelangan ikan sebagai pengangkut bongkar muat hasil tangkapan ikan dan keperluan logistik pelayaran.

Dalam studi ini untuk mengklasifikasi status nelayan dilakukan pada pendekatan penggunaan jenis armada perahu/kapal motor yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan di laut, hal ini untuk mengidentifikasi kemampuan permodalan dan perolehan hasil tangkapan ikan serta pekerja (nelayan) yang bekerja pada jenis armada yang digunakan.

A. Kapal Motor Ukuran 1-2 GT

Merupakan jenis kapal motor tempel yang berukuran kecil dengan kemampuan berat angkut 1-2 *Gross Ton* (GT). Armada kapal nelayan dengan kapasitas 1-2 GT yang beroperasi pada wilayah kerja KPL Mina Sumitra pada tahun 2006 sebanyak 280 unit, dalam melakukan pelayaran, dapat mengangkut jumlah awak kapal motor 1 sampai 4 ABK dengan waktu pelayaran 1 hari hingga 2 hari. Wilayah tangkapan ikan untuk jenis kapal motor tempel sekitar perairan Laut Indramayu, Subang dan Cirebon.

B. Kapal Motor Ukuran 5-15 GT

Merupakan jenis kapal motor yang berukuran sedang dengan kemampuan berat angkut 5-15 *Gross Ton* (GT). Armada kapal nelayan dengan kapasitas 5-15 GT yang beroperasi pada wilayah kerja KPL Mina Sumitra pada tahun 2006 sebanyak 148 unit, dalam melakukan pelayaran mampu mengangkut 5 sampai 7 ABK dengan waktu pelayaran 15 hari hingga 1 bulan.

C. Kapal Motor Ukuran lebih dari 15 GT

Merupakan jenis kapal motor yang berukuran besar dengan kemampuan berat angkut lebih dari 15 *Gross Ton* (GT). Jumlah armada kapal nelayan yang tercatat pada wilayah kerja KPL Mina Sumitra tahun 2006 sebanyak 188 unit, dalam melakukan pelayaran dapat mengangkut jumlah awak kapal motor antara 8 sampai 10 ABK dengan waktu pelayaran 1 bulan dan bahkan ada yang mencapai hingga 2 bulan.

Wilayah pelayaran yang menjadi daerah tangkapan para nelayan pencari ikan dengan menggunakan armada yang berukuran sedang hingga besar mampu mencapai perairan Sumatera, Kalimantan dan bahkan mampu mencapai perbatasan perairan Filipina.

Para nelayan dalam mempersiapkan pengisian kebutuhan logistik untuk keperluan pelayaran di bantu oleh beberapa pekerja buruh angkut yang akan membawa beberapa kebutuhan yang diperlukan, seperti dalam membongkar dan mengangkut es dari depot es dengan menggunakan kendaraan truk pengangkut es untuk di kirim dan dimasukan ke dalam kapal motor yang berlabuh di pinggir dermaga.

Domisili masyarakat nelayan yang ada di Kawasan PPI Karangsang berasal dari Desa Karangsang, Kelurahan Paoman dan Desa Pabeanudik serta berasal dari desa sekitarnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Indramayu, bahkan terdapat nelayan pendatang yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Indramayu seperti halnya dari Wilayah Cirebon dan Subang yang singgah untuk menjual ikan di TPI Karangsang maupun untuk mengisi keperluan logistik pelayaran.

4.1.1.2. Pembuat Perahu/Kapal Motor Nelayan

Hasil pemetaan di lapangan industri pembuatan dan perbaikan perahu berada di sepanjang pinggir Sungai Prajagumiwang yang berada dekat sekitar lokasi PPI Karangsong. Proses pembuatan kapal motor dilakukan oleh pembuat perahu berdasarkan pesanan dari para juragan (pemilik modal) atau nelayan untuk dibuatkan menurut ukuran atau jenis permintaan yang diinginkan (di pesan). Pemesanan pembuatan kapal motor ini, tergantung keinginan juragan apakah hanya kapal motornya saja atau lengkap dengan alat tangkap lainnya (jaring).

Jumlah pekerja dalam pembuatan perahu atau kapal motor tergantung pada proses pembuatan ukuran kapal motor, untuk jenis kapal motor kecil (1-2 GT) biasanya dikerjakan oleh 5 sampai 7 orang pekerja, sedangkan untuk jenis kapal motor yang mempunyai ukuran lebih besar biasanya dikerjakan oleh 10 sampai 20 orang pekerja.

4.1.1.3. Bakul ikan

Bakul ikan adalah pengepul ikan yang membeli hasil tangkapan para nelayan yang diperoleh dari proses pelalangan ikan terdiri dari bakul ikan untuk pemasaran lokal dan bakul ikan pendatang yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan operasionalnya, bakul ikan yang tercatat pada Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu yang mengikuti pelelangan ikan di PPI Karangsong setiap bulannya berubah-ubah jumlahnya, seperti pada Tabel IV.1.

TABEL IV.1
JUMLAH BAKUL IKAN YANG BEROPERASI
DI PPI KARANGSONG TAHUN 2007

Status	Bulan
--------	-------

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
Bakul Setempat	32	31	28	39	39	27	29	32	31	32	31	32
Bakul Pendetang	37	37	32	26	26	33	31	31	37	38	38	37

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu, 2007

Status bakul ikan lokal (setempat) pada umumnya dari keluarga nelayan yang didominasi oleh ibu-ibu, sementara anggota keluarga lainnya (suami dan anak) menjadi nelayan penangkap ikan ataupun pekerjaan lainnya yang berasal dari Desa Karangsong, Desa Pabeanudik dan desa-desa lain disekitarnya. Adapun bakul pendatang, pada umumnya berasal dari luar Wilayah Indramayu, seperti dari Cirebon dan Subang.

Pemasaran lokal merupakan tujuan pemasaran untuk sekitar Indramayu yang dilakukan oleh bakul setempat (lokal) dengan tujuan wilayah pemasaran meliputi; Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang dan Kecamatan Jatibarang, adapun bakul ikan untuk pemasaran luar biasanya dilakukan oleh bakul pendatang maupun bakul lokal dengan tujuan wilayah pemasaran di luar Wilayah Indramayu seperti Cirebon, Majalengka, Bandung dan Jakarta.

4.1.1.4. Koperasi

Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan PPI Karangsong dan pihak yang memfasilitasi transaksi hasil laut antara nelayan dengan bakul ikan. KPL Mina Sumitra sebagai lembaga hukum, berfungsi memberikan pinjaman modal bagi para nelayan anggota koperasi dan memberikan pelayanan perbekalan logistik nelayan, diantaranya BBM solar, es dan suku cadang mesin.

Bagi para nelayan dan bakul ikan yang menjadi keanggotaan koperasi, dapat memperoleh pinjaman modal dalam mendukung usahanya, walaupun demikian modal pinjaman yang diberikan KPL Mina Sumitra jumlahnya terbatas, menurut informasi dari pengelola koperasi Mina Sumitra bahwa besarnya pinjaman bagi anggota koperasi nelayan dibatasi jumlahnya berkisar Rp 5.000.000 dengan bunga pinjaman 3 %, simpanan wajib sebesar 3 % serta simpanan pokok Rp 100.000, sedangkan jumlah anggota tetap Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra yang tercatat sebanyak 337 nelayan.

Dalam proses lelang tersebut terdapat pihak-pihak yang bertugas dalam menyelenggarakan pelelangan ikan yang terdiri dari: (1) juru karcis; (2) juru blad; (3) juru rekap; (4) juru kendali; (5) kasir terima dan (6) kasir bayar, saat ini karyawan KPL Mina Sumitra sebanyak 22 orang.

4.1.1.5. Perdagangan Umum

Perdagangan umum merupakan penjual kebutuhan bahan pokok makanan dan minuman serta keperluan yang berhubungan dengan kebutuhan pemenuhan masyarakat umum maupun masyarakat nelayan dalam hal penyediaan logistik pelayaran (makanan dan minuman), penyediaan sarana alat tangkap (jaring) dan suku cadang mesin kapal motor yang berada di dalam maupun di luar lokasi PPI Karangsong.

Lokasi perdagangan umum yang berada di sekitar lokasi PPI Karangsong umumnya menjual kebutuhan sembako (makanan dan minuman), penyediaan alat tangkap (jaring, bandul dan tali jaring serta pancing). Sedangkan perlengkapan nelayan yang tidak diperoleh di sekitar lokasi PPI Karangsong misalnya jaring yang

mempunyai ukuran yang besar biasanya nelayan memesan dari luar Wilayah Indramayu seperti dari Wilayah Tegal.

4.1.1.6. Pengolah ikan

Pengolah ikan merupakan pembuat atau pengolah ikan untuk di buat produk olahan ikan yang dikelola oleh masyarakat sekitar lokasi PPI Karangsong. Bahan baku (ikan atau lainnya) diperoleh dari membeli ikan melalui proses pelelangan di TPI Karangsong ataupun untuk jenis olahan lainnya (seperti tulang ikan hiu dan kulit ikan) yang akan di proses lebih lanjut oleh pengolah ikan, diperoleh dari bakul pengepul yang berasal dari Wilayah Indramayu maupun ada yang di-datangkan dari luar Wilayah Indramayu seperti Cirebon dan Tegal.

Kondisi industri pengolahan ikan yang ada di sekitar Kawasan PPI Karangsong keberadaanya masih bersifat industri olahan rumah tangga dan proses yang dilakukan masih bersifat sederhana seperti dengan cara perebusan dan peng-asapan serta penjemuran dengan sinar matahari.

Jumlah pekerja dalam mengolah ikan jumlahnya bervariasi, seperti pengolah ikan gesek (ikan kering) dan pengolah ikan jambal roti mampu menyerap tenaga kerja 5 sampai 15 pekerja, sedangkan pengolah sirip hiu da tulang hiu mampu menyerap 15 sampai 20 pekerja, kemudian pengolah gelembung ikan (*hipio*) mampu menyerap tenaga kerja 5 sampai 10 pekerja.

4.1.1.7 Pembeli Perantara dan Pembeli Akhir

Pembeli atau pedagang perantara merupakan pembeli ikan atau yang di suplai dari bakul ikan sebagai pedagang pengecer untuk kebutuhan pasar konsumsi yang berada di pasar lokal maupun pasar di luar Wilayah Indramayu. Sedangkan Pembeli akhir merupakan pembeli akhir yang tujuannya adalah untuk dikonsumsi dalam bentuk ikan segar maupun dalam bentuk ikan hasil olahan.

Terkait dengan lokasi, pedagang pengecer lokal keberadaannya tersebar di beberapa tempat/pasar kecamatan di Wilayah Indramayu dan pedagang pengecer yang berada di luar Wilayah Indramayu, hal ini tergantung wilayah pemasaran bakul ikan dalam mendistribusikan ikannya.

4.1.1.8. Pemerintah

Pemerintah sebagai penyedia dan pembina dalam memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, pembangunan sarana PPI dan TPI Karangsong di bangun atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Pada saat dilakukan pemetaan di lapangan kondisi pembangunan infrastruktur pendukung masih terus dikembangkan. Peranan pemerintah dalam penyelenggaraan TPI adalah untuk memberikan usaha pelayanan jasa pelelangan ikan dan pembinaan kepada para nelayan ikan melalui pemberdayaan Koperasi Mina Sumitra.

Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur PPI Karangsong adalah untuk memudahkan para nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapan ikan dan memasarkan hasil lautnya. Sebagai wujud penyelenggaraan PPI dan TPI saat ini diatur

berdasarkan peraturan perundangan dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di Indonesia., diantaranya:

- Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan yang didalamnya mengatur bagaimana cakupan penyelenggaraan pelabuhan perikanan di Indonesia;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 5 Tahun 2005.

4.1.2. Jenis Kegiatan Usaha Perikanan

Kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsang merupakan usaha kegiatan yang saling terkait antara hulu dan hilir yang berlangsung di darat dan di laut. Terkait kegiatan perairan merupakan kegiatan nelayan pencari ikan yang melakukan pelayaran untuk mencari dan menangkap ikan di sekitar perairan pantai maupun di laut lepas, selajutnya hasil tangkapan ikan yang di peroleh nelayan kemudian didaratkan di PPI Karangsang untuk dilakukan penjualan melalui TPI Karangsang. Setelah selesai melakukan penjualan melalui proses pelelangan ikan, nelayan melakukan labuh tambat untuk kembali mempersiapkan mengisi kebutuhan

logistik dan memeriksa serta memperbaiki peralatan tangkap untuk persiapan kembali melakukan pelayaran. Kegiatan tersebut akan terus berlangsung selama nelayan melakukan penangkapan ikan.

Kegiatan di darat berkaitan dengan hasil produksi yang dihasilkan para nelayan pencari ikan melalui proses pelelangan ikan. Dalam proses lelang ini terjadi transaksi antara nelayan dan bakul ikan yang difasilitasi oleh KPL Mina Sumitra sebagai pihak pengelola unit bisnis TPI Karangsong. Dari hasil lelang ikan selanjutnya dilakukan pemasaran oleh para bakul ikan untuk dipasarkan dalam wilayah (lokal) maupun luar Wilayah Indramayu. Pemanfaatan produk ikan laut oleh masyarakat pada umumnya dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam bentuk ikan segar maupun untuk produk olahan ikan.

Terkait usaha penangkapan ikan yang berlangsung di PPI Karangsong tidak lepas adanya kegiatan yang mendukung produksi ikan. Kegiatan pendukung ini antara lain sarana transportasi dalam memasarkan produk ikan maupun mengangkut keperluan kebutuhan logistik pelayaran, sarana perbaikan dan pemeriksaan kapal (*docking*) serta pembuatan kapal.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut di atas, jenis-jenis usaha yang terkait dalam kegiatan penangkapan ikan di Kawasan PPI Karangsong akan diidentifikasi menurut tahapan dalam rangkaian sistem bisnis perikanan yang meliputi tahapan pra produksi, produksi dan pasca produksi.

4.1.2.1. Tahapan Pra Produksi Kegiatan Perikanan

Tahapan aktivitas pra produksi dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan tahapan-tahapan persiapan awal nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, yang dimulai dari diperlukannya sarana alat tangkap berupa perahu/kapal motor dan jaring/pancing, kemudian keperluan kebutuhan logistik selama pelayaran berlangsung.

Hasil pemetaan di lapangan, keterkaitan dalam tahapan produksi kegiatan penangkapan ikan terdapat beberapa pelaku usaha dalam proses pra produksi, diantaranya (1) pembuat sarana alat tangkap, (2) nelayan dan (3) KPL Mina Sumitra (4) perdagangan umum.

A). Industri Pembuatan Kapal Motor

Bahan material yang digunakan dalam pembuatan kapal motor sebagian besar menggunakan kayu jati, mengingat jenis kayunya memiliki kekuatan dan dapat berlangsung lama (awet). Proses lamanya pembuatan kapal motor tergantung pada ukuran dan jenis kapal, untuk ukuran kecil dengan jenis kapal motor tempel (kapasitas 1 – 2 GT) biasanya dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1–2 bulan, sedang untuk kapal motor yang mempunyai ukuran sedang (kapasitas 5 – 15 GT) dan besar (kapasitas 15 – 30 GT) dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2–5 bulan. Proses pengerjaannya dikerjakan oleh pekerja yang memang memiliki keahlian dalam bidangnya.

Untuk proses perbaikan kapal motor biasanya dilakukan setiap 1 sampai 2 tahun apabila kondisi kayunya sudah mengalami pelapukan. Jenis perbaikan dan pemeliharaan kapal motor dapat dibedakan berdasarkan tingkat kerusakannya, untuk kerusakan yang kecil biasanya dilakukan dengan pemeriksaan mesin dan badan

kapal motor, yang biasanya dikerjakan dengan mengecat kayu kapal, sedangkan untuk perbaikan yang kondisinya benar-benar rusak dilakukan dengan penggantian kayu dan bahkan perombakan total.

Proses pembuatan kapal motor umumnya berdasarkan hasil pesanan oleh para juragan kapal (sebutan bagi pemilik modal) untuk dibuatkan pesanannya. Setelah ada kesepakatan antara juragan dan pekerja, kemudian proses pembuatan dapat dimulai. Biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah kapal motor berukuran kecil (kapasitas 1-2 GT) yang lengkap dengan mesin dan peralatan tangkap sekitar Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta. Sedangkan untuk ukuran kapal motor yang berukuran sedang dan besar kapasitas (5-30 GT) dapat mencapai biaya pembuatan sekitar Rp 500 juta sampai Rp 1 milyar. Adapun peralatan tangkap yang digunakan dalam kelengkapan kapal motor seperti jaring nylon yang berukuran besar diperoleh dari Wilayah Tegal harganya sekitar Rp 500 juta. Untuk mengetahui keberadaan industri pembuatan sarana alat tangkap di sekitar PPI Karangsong dapat di lihat pada Gambar 4.1.

B). Keperluan Logistik Pelayaran

Kebutuhan logistik pelayaran bagi nelayan Karangsong diperlukan dalam kegiatan menangkap ikan di laut. Hasil wawancara yang diperoleh dari para nelayan di lapangan, bahwa beberapa kebutuhan logistik yang diperlukan dalam keperluan melaut diantaranya; bahan bakar minyak berupa solar dan minyak tanah, es, kebutuhan makanan dan minuman yang terdiri dari beras dan mie instan, rokok, gula, kopi dan teh.



GAMBAR 4.1
SARANA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL MOTOR
(1) BAHAN KAYU JATI SEBAGAI PEMBUATAN KAPAL MOTOR
(2) PEMBUATAN KAPAL MOTOR (3) PEMELIHARAAN KAPAL MOTOR
(4) KAPAL MOTOR YANG SUDAH JADI

Berdasarkan hasil angket (kuesioner terlampir), keperluan logistik ini disesuaikan dengan banyaknya jumlah ABK dan ukuran kapal motor. Banyaknya logistik yang di bawa nelayan mempengaruhi pada waktu tempuh pelayaran dan jangkauan wilayah bagi nelayan dalam melakukan tangkapan ikan di laut.

Keberadaan dan ketersediaan usaha yang berlangsung dalam mendukung logistik pelayaran yang berada di lokasi PPI Karangsong meliputi:

1). SPDN (Stasiun Pengisian Darat Nelayan)

SPDN yang ada di lokasi PPI Karangsong di bangun atas kerjasama Pertamina dan Departemen Perikanan dan Kelautan yang pengelolaannya dilakukan oleh KPL Mina Sumitra. Hasil wawancara yang diperoleh dari pengelola SPDN, bahwa SPDN

Karangsong dalam mensuplai kebutuhan solar sebanyak 21.000 liter dan habis setiap 2 hari untuk perbekalan bahan bakar nelayan. Sehingga KPL Mina Sumitra kadang-kadang kehabisan solar, hal ini menyebabkan nelayan mencari bahan bakarnya di luar SPDN (mencari solar di SPBU umum) sesuai dengan kebutuhan.

Proses untuk pengisian bahan bakar minyak solar, dilakukan dari pengisian di SPDN yang dimasukkan dalam drum maupun drigen plastik, selanjutnya diangkut menggunakan kendaraan *pick-up* maupun becak yang dibantu oleh buruh angkut untuk di kirim ke kapal motor nelayan. Sambil menunggu keperluan logistik, para nelayan biasanya melakukan perbaikan alat tangkap seperti jaring nylon dan jaring rampus untuk diperbaiki dan dilakukan pemeriksaan mesin kapal motor untuk diperiksa dan diperbaiki bila terjadi kerusakan setelah melakukan pelayaran. Berbeda halnya untuk nelayan yang menggunakan jenis mesin kapal motor tempel, sebagian ada yang menggunakan minyak tanah yang dicampur dengan oli bekas. Hal ini sengaja dilakukan untuk menyiasati mahalnya harga solar seperti saat ini.

Kebutuhan bahan bakar minyak yang digunakan para nelayan tergantung dari ukuran jenis kapal motor, untuk jenis kapal motor tempel yang berukuran kecil ada yang menggunakan minyak solar dan minyak tanah. Untuk memperoleh minyak tanah, para nelayan membeli dengan kisaran harga antara Rp 3000 hingga Rp 3500.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minyak untuk armada kapal motor tempel ukuran 1–2 GT antara Rp 263.050 hingga Rp 610.063 dan untuk jenis kapal motor yang berukuran 5–15 GT sekitar Rp 2.580.000 hingga Rp 4.192.500 serta yang armada yang mempunyai ukuran lebih dari 15 GT sekitar Rp 7.111.538 hingga Rp 12.817.308.

2). Kios Logistik dan Perdagangan Umum

Keberadaan kios logistik di lokasi TPI Karangsong saat ini di kelola oleh KPL Mina Sumitra. Kios logistik menjual kebutuhan suku cadang mesin bagi kapal nelayan yang mengalami kerusakan mesin. Selain menyediakan kebutuhan keperluan suku cadang mesin kapal motor, juga menjual kebutuhan pokok rumah tangga nelayan, juga terdapat usaha perdagangan umum yang dikelola oleh masyarakat umum dalam menjual kebutuhan masyarakat nelayan setempat seperti kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya dan menyediakan perlengkapan alat tangkap lainnya misalnya jaring, bandul jaring dan pancing.

Kebutuhan makanan selama melakukan pelayaran, para nelayan menyiapkan beberapa bahan makanan seperti halnya beras dan mie instan, rokok, gula, kopi, teh dan lain-lain. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan makanan bervariasi. Rata-rata kebutuhan makan untuk kapal motor tempel berukuran 1–2 GT, sekitar Rp 164.375 hingga Rp 266.250 sementara untuk kapal motor berukuran 5–15 GT sekitar Rp 762.500 hingga Rp 982.500 dan untuk kapal motor yang berukuran lebih dari 15 GT sekitar Rp 2.351.923 hingga Rp 2.988.462.

3). Es

Kebutuhan es bagi nelayan dan bakul ikan sangat diperlukan untuk mengawetkan ikan selama pelayaran. Pabrik es yang mensuplai kebutuhan nelayan di Karangsong berada di Desa Pabeanudik yang pengelolaanya dilakukan pihak KPL Mina Sumitra. Untuk memenuhi kekurangannya, es balok juga didatangkan dari luar wilayah kawasan Karangsong yakni di suplay dari pabrik es di Kecamatan

Jatibarang. Keberadaan sarana penyimpanan es yang ada di lokasi TPI Karangsong terdapat depot es yang menyimpan balok-balok es.

Harga jual es yang dikelola pihak KPL Mina Sumitra yang di jual kepada nelayan berkisar Rp 12.000 per balok es. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan es untuk jenis kapal motor tempel ukuran 1 – 2 GT sekitar Rp 60.200 hingga Rp 85.200 sementara kapal motor yang berukuran 5 – 15 GT sekitar Rp 1.050.000 hingga Rp 1.335.000 serta kapal motor yang berukuran lebih dari 15 GT sekitar Rp 5.321.538 hingga Rp 6.623.077. Keberadaan keperluan penyediaan logistik di sekitar PPI Karangsong dapat di lihat pada Gambar 4.2.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 4.2
KEPERLUAN LOGISTIK PELAYARAN
(1) SPDN BBM NELAYAN (2) DEPOT ES (3) KIOS LOGISTIK
(4) PERDAGANGAN UMUM

4.1.2.2. Tahapan Produksi Kegiatan Perikanan

Tahapan aktivitas produksi dalam kegiatan penangkapan ikan diantaranya nelayan menangkap ikan di laut, setelah diperoleh hasil tangkapan ikan selanjutnya didaratkan di pelabuhan pendaratan ikan untuk dilakukan penjualan melalui mekanisme pelelangan di tempat pelelangan ikan, kemudian setelah selesai dari

proses pelelangan dilakukan pengepakan untuk persiapan pemasaran ikan oleh para bakul ikan.

Hasil pemetaan di lapangan, keterkaitan dalam tahapan produksi kegiatan penangkapan ikan terdapat beberapa pelaku usaha, diantaranya (1) nelayan, (2) bakul ikan dan (3) pihak pengelola pelelangan dalam hal ini KPL Mina Sumitra.

A). Pendaratan Ikan

Hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPI Karangsong setiap harinya sekitar 6 - 10 kapal motor berukuran besar bahkan pada saat tertentu (musim tangkap ikan) bisa mencapai lebih dari 10 kapal motor ukuran besar yang mendaratkan hasil tangkapannya, selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut di bongkar oleh anak buah kapal yang di bantu pekerja angkut untuk penyortiran berdasarkan jenis ikan yang selanjutnya untuk dibersihkan, kemudian dimasukan dalam kotak-kotak ikan untuk di angkut ke tempat penimbangan ikan.

Setelah seluruh ikan di timbang selanjutnya nelayan atau juragan akan memperoleh karcis untuk mengikuti pelelangan. Seluruh hasil lelang kemudian dicatat oleh petugas pencatat selanjutnya dihitung berapa hasil yang diperoleh. Setelah selesai dari proses pelelangan ikan, nelayan atau juragan akan menerima hasil pembayaran dari kasir bayar yang ada di loket pembayaran.

B). Pelelangan Ikan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dijelaskan bahwa”*hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di TPP*”. Hal ini menjadikan sistem bisnis penangkapan ikan laut dalam proses penjualannya telah diatur melalui

mekanisme pelelangan ikan dan menjadi sistem penjualan ikan yang dikelola secara formal.

Hasil pemetaan di lapangan, para bakul ikan yang mengikuti proses pelelangan ikan di TPI Karangsong terlebih dahulu menyerahkan uang jaminan ke pengelola dan penyelenggara pelelangan ikan. Proses selanjutnya yaitu menyelenggarakan pelelangan yang di dalamnya terdapat proses yang dilakukan oleh beberapa petugas diantaranya; (1) juru karcis, bertugas mengeluarkan karcis kepada nelayan setelah ikan ditimbang; (2) juru lelang, bertugas memeriksa karcis dari nelayan yang hasil tangkapannya akan dilelangkan dan memeriksa tanda peserta lelang bagi bakul ikan untuk mengikuti proses pelalangan; (3) juru blad, bertugas mencatat semua transaksi dan catatan setiap transaksi yang akan di-berikan kepada juru rekap; (4) juru rekap, bertugas merekap dan membuat rekap dari setiap transaksi untuk digunakan dalam penyelesaian administrasi melalui kasir; (5) juru kendali, bertugas memberikan informasi peserta lelang dan mengendalikan peserta lelang dengan mengawasi transaksi pada setiap bakul ikan; (6) juru kasir bayar, bertugas melakukan pembayaran hasil lelang; (7) juru kasir terima, bertugas menerima uang jaminan lelang dari peserta lelang yang terdiri dari beberapa bakul ikan dan selanjutnya juru kasir terima mengeluarkan tanda pembayaran/tanda peserta lelang kepada para bakul ikan. Kemudian bakul ikan yang sudah memperoleh tanda pembayaran dilakukan pemeriksaan oleh juru lelang untuk diikutsertakan dalam proses pelelangan.

Nilai transaksi lelang di TPI Karangsong yang bisa diikuti oleh para bakul ikan berdasarkan jumlah jaminan atau jumlah simpanan di KPL Mina Sumitra. Nilai

transaksi lelang para bakul ikan tidak boleh melebihi uang jaminan atau jumlah simpanan bagi bakul ikan yang menjadi anggota KPL Mina Sumitra.

Kesesuaian nilai transaksi lelang dengan uang jaminan atau uang simpanan dikendalikan oleh juru kendali. Juru kendali mengawasi transaksi setiap bakul ikan. Apabila sudah mencapai nilai uang jaminan atau uang simpanan, maka bakul ikan tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang.

Besarnya uang jaminan untuk nilai transaksi dapat diklasifikasikan, diantaranya yaitu pertama, bakul ikan yang menyerahkan uang jaminan dengan nilai transaksi antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta, kedua bakul ikan yang menyerahkan uang jaminan dengan nilai transaksi Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, ketiga bakul ikan yang menyerahkan uang jaminan dengan nilai transaksi 50 juta. Selanjutnya bakul ikan yang memenangkan harga tawaran tertinggi maka dapat memperoleh ikan hasil pelelangan dengan terlebih dahulu menyelesaikan pem-bayarannya, kemudian ikan hasil lelang tersebut dilakukan pengepakan ikan oleh pekerja untuk dimasukkan dalam wadah/kotak ikan, kemudian ikan hasil peng-epakan tersebut disiapkan untuk di angkut ke kendaraan untuk dilakukan pemasaran.

Retribusi pelelangan ikan yang dibebankan dari setiap nilai transaksi yaitu sebesar 5 %, dimana beban nilai retribusi tersebut dibagi 2 (dua) kategori yang meliputi retribusi sebesar 2 % dibebankan nelayan, dan retribusi sebesar 3 % dibebankan bakul ikan. Penyelenggaraan aturan retribusi pelelangan ikan saat ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005, yang didalamnya mengatur penggunaan retribusi sebagai berikut:

- 1). Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebesar 1,60 % yang terdiri dari; Pemprov Jawa Barat sebesar 0,60 % dan Pemkab Indramayu sebesar 1 %.
- 2). Biaya operasional dan pemeliharaan TPI sebesar 0,80 % yang terdiri dari;
 - a). Biaya pembinaan/pengawasan oleh Pemprov Jawa Barat sebesar 0,15 %, b).
 - Biaya pembinaan/pengawasan oleh Pemkab Indramayu sebesar 0,15 %,
 - c). Biaya pembangunan daerah perikanan Jawa Barat sebesar 0,10 %,
 - d). Biaya operasional koperasi mina sebesar 0,15 %,
 - e). Biaya pemeliharaan TPI sebesar 0,25 %.
- 3). Biaya penyelenggaraan dan administrasi pelelangan ikan sebesar 1,65 %.
- 4). Dana-dana nelayan sebesar 0,80 % yang terdiri dari; tabungan nelayan sebesar 0,35 %, asuransi nelayan sebesar 0,15 %, dana paceklik 0,20 %, dan dana sosial (penanggulangan kecelakaan di laut) sebesar 0,10 %.
- 5). Biaya keamanan dan kas desa sebesar 0,15 % yang terdiri dari; biaya keamanan sebesar 0,10 % dan dana bantuan kas desa sebesar 0,05 %.

4.1.2.3. Tahapan Pasca Produksi Kegiatan Perikanan

Hasil pemetaan di lapangan, keterkaitan dalam tahapan pasca produksi kegiatan penangkapan ikan, terdapat pelaku usaha dalam proses pasca produksi (hilir), diantaranya; (1) bakul ikan, (2) pengolah ikan (3) pembeli perantara dan pembeli akhir. Terkait dalam tahapan aktivitas pasca produksi kegiatan perikanan tangkap diantaranya pemasaran hasil tangkapan ikan dan pengolahan ikan hasil tangkapan.

A). Penjualan Hasil Tangkapan Ikan

Penjualan hasil tangkapan ikan nelayan pada umumnya dipasarkan oleh bakul ikan hasil dari proses pelelangan ikan., tapi ada juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya secara langsung kepada bakul, biasanya jenis kerang laut dan rajungan. Pada umumnya bakul ikan dalam menjual ikan ke pedagang pengecer sudah mempunyai pelanggan sendiri, sehingga bakul ikan sifatnya sebagai penyuplai bagi pedagang-pedagang ikan di tingkat pengecer yang berada di pasar-pasar, baik yang berada di sekitar (lokal) maupun di luar Wilayah Indramayu.

B). Industri Pengolahan Ikan

Industri Pengolahan ikan di Desa Karangsong merupakan jenis industri skala industri rumah tangga (*home industry*) dan unit pengolahannya relatif masih sedikit. Untuk mengetahui keberadaan industri pengolahan ikan akan diidentifikasi menurut jenis-jenis pengolahannya antara lain:

1). Ikan Asin, Jambal Roti atau Ikan Panggang

Produk olahan ikan asin (ikan gesek) dan ikan panggang menggunakan bahan dari ikan untuk di proses melalui pengeringan dengan sinar matahari maupun dengan cara di rebus dan di asap. Produk olahan ikan asin ini berupa jenis ikan jambal roti dan ikan gesek. Jumlah produksi ikan jambal roti setiap bulannya dapat mencapai 2 sampai 6 ton/bulan dengan harga jual Rp 30.000/kg. Sedangkan untuk produk ikan gesek jumlah produksinya dapat menghasilkan 2 ton/bulan dengan harga jualnya Rp 25.000/kg. Modal usaha untuk membuat produk olahan jenis ikan jambal sekitar Rp 20 juta. Sedangkan modal usaha untuk produk olahan jenis ikan gesek sekitar Rp 8

juta. Wilayah pemasaran untuk kedua jenis produk olahan ini di jual untuk pasar lokal maupun luar Wilayah Indramayu.

2). Sirip Hiu, Kulit Ikan Hiu dan Tulang Hiu

Produk olahan sirip hiu dan kulit hiu di olah dengan cara proses pengeringan dengan sinar matahari. Ikan hiu atau yang biasa disebut masyarakat Desa Karangsong sebagai ikan cucut dagingnya dimanfaatkan untuk dibuat ikan gesek. Informasi yang diperoleh dari pengolah sirip hiu dan kulit hiu, produk olahannya dimanfaatkan untuk di buat jenis makanan tertentu. Sirip hiu digunakan untuk di buat makanan dan kulit hiu digunakan untuk pembuatan samak sebagai produk berbahan kulit seperti untuk pembuatan sepatu dan tas serta makanan kerupuk.

Jumlah produksi sirip hiu tiap bulannya mencapai 6 kwintal/bulan dengan harga jual Rp 800.000/kg. Modal usaha untuk mengolah sirip hiu dan kulit hiu sekitar Rp 75 juta. Menurut informasi yang diperoleh dilapangan, tulang hiu digunakan untuk bahan kosmetik. Produksi olahan jenis tulang hiu tiap bulannya mencapai 20 kwintal/bulan dengan harga jual Rp 50.000/kg. Modal usaha untuk mengolah tulang hiu sekitar Rp 35 juta. Wilayah pemasaran untuk jenis olahan sirip hiu, tulang hiu dan kulit hiu di kirim dan dipasarkan ke Jakarta untuk di ekspor dengan negara tujuan Negara Jepang dan Singapura.

3). Gelembung Perut Ikan (*Hipio*)

Jenis olahan gelembung perut ikan merupakan jenis olahan yang di ambil dari dalam perut ikan yang berbentuk tabung berwarna transparan, dimanfaatkan untuk di buat jenis makanan tertentu. Jumlah produksi yang dihasilkan setiap bulannya mencapai 9 kwintal/bulan dengan harga jual Rp 600.000/kg. Modal usaha untuk

mengolah gelembung perut ikan sekitar Rp 185 juta. Wilayah pemasaran untuk jenis olahan gelembung perut ikan dipasarkan untuk ekspor dengan negara tujuan Negara Singapura.



Sumber: Hasil Survei 2007

GAMBAR 4.3
INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN
(1) PENGOLAHAN GELEMBUNG IKAN (2) PENGOLAHAN IKAN
PANGGANG (3) PENGOLAHAN SIRIP HIU (4) PENGOLAHAN TULANG
HIU DAN KULIT HIU/PARI

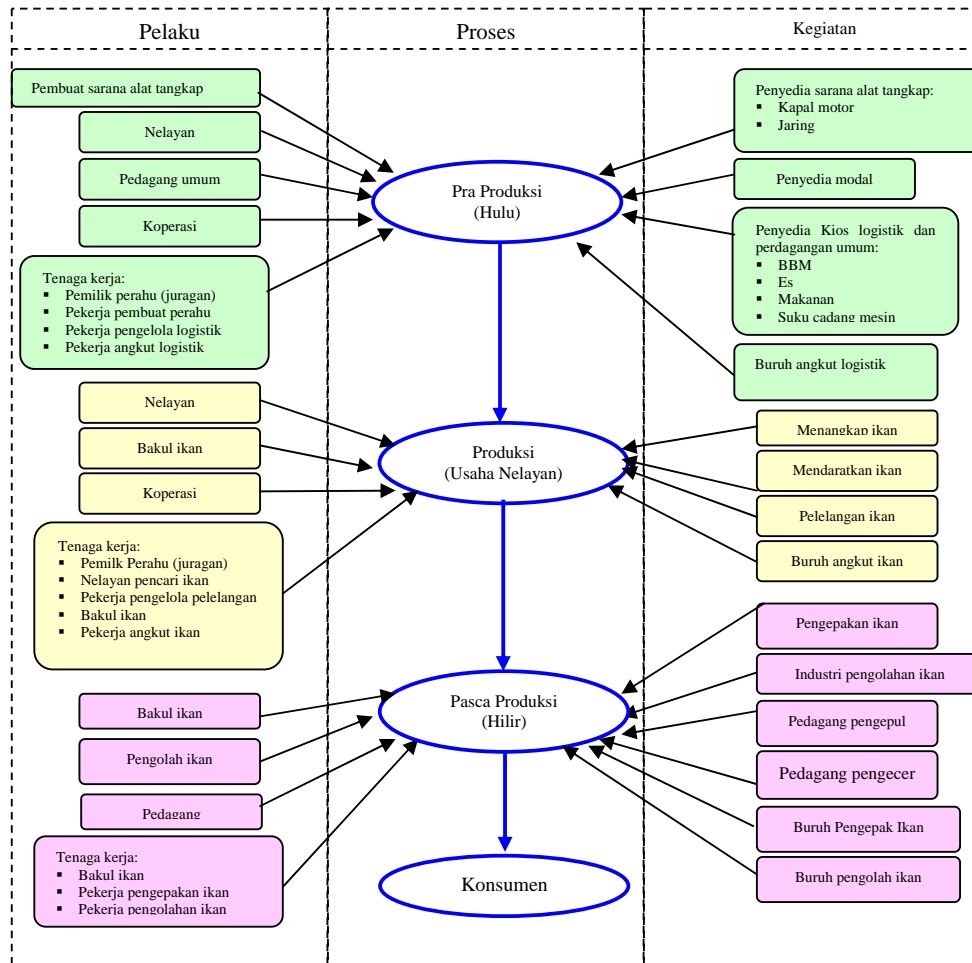
Secara rinci jumlah produksi dan nilai produksi industri olahan ikan yang dikelola oleh masyarakat sekitar PPI Karangsong tersaji pada pada Tabel IV.2.

TABEL IV.2
JUMLAH DAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI OLAHAN IKAN

No.	Jenis Olahan	Modal (Rp)	Jumlah Produksi	Harga (Rp)/Kg	Nilai Produksi (Rp)
1.	Ikan asin/gesek	8.000.000	2 ton/bulan	25.000	50.000.000
2.	Ikan jambal roti/panggang	20.000.000	2 – 6 ton/bulan	30.000	60.000.000 – 180.000.000
3.	Sirip hiu dan kulit hiu	75.000.000	6 kwintal/bulan	800.000	480.000.000
4.	Tulang hiu	35.000.000	20 kwintal/bulan	50.000	100.000.000
5.	Gelembung ikan	185.000.000	9 kwintal/bulan	600.000	540.000.000

Sumber: Data Inventarisasi Unit Pengolahan Skala Kecil, 2007

Jenis kegiatan yang berlangsung di Kawasan PPI Karangsong sebagai suatu aktivitas ekonomi yang terkait antara kegiatan hulu dan kegiatan hilir membentuk rangkaian kegiatan yang secara skematis dapat di lihat pada Gambar 4.4.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei Lapangan, 2007

GAMBAR 4.4

RANGKAIAN KEGIATAN PERIKANAN

4.2. Analisis Keterkaitan Rantai Nilai Kegiatan Perikanan

Menurut Tallec dan Bockel (2005:9) analisis rantai nilai komoditas di-gunakan untuk menunjukkan keseluruhan para pelaku ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang relevan oleh para pelaku ekonomi tersebut yang memberikan pengaruh secara langsung dalam menentukan suatu produk akhir. Sementara menurut Kuncoro (2006:46), analisis rantai nilai memperlihatkan organisasi sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai.

Rangkaian sistem bisnis kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsong seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan bahwa kegiatan perikanan tangkap telah menciptakan nilai pada masing-masing pelaku usaha yang terlibat dalam menentukan suatu produk yakni ikan.

4.2.1. Rantai Nilai Pada Tahap Pra Produksi Kegiatan Perikanan

Rantai nilai pada tahap pra produksi merupakan penciptaan nilai pendapatan yang diperoleh pembuat sarana alat tangkap dan penyedia kebutuhan logistik persiapan pelayaran nelayan.

A. Pembuat Sarana Alat Tangkap (Perahu/Kapal Motor)

Terkait dalam pemenuhan keperluan penangkapan ikan, nelayan memerlukan sarana alat tangkap berupa perahu/kapal motor dan peralatan tangkap lainnya (jaring). Pembuatan sarana alat tangkap biasanya hasil pesanan nelayan pemilik (juragan/pemilik modal). Biaya yang dikeluarkan untuk membuat kapal motor yang berukuran kecil bisa mencapai biaya Rp 50 juta sampai Rp 200 juta, sementara untuk kapal motor yang berukuran lebih besar dapat mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar. Biaya yang dikeluarkan nelayan (pemilik modal) untuk membuat kapal motor merupakan sebagai pemasukkan nilai pendapatan bagi pembuat sarana alat tangkap.

Sarana pembuatan dan perbaikan kapal motor nelayan di Desa Karangsong keberadaanya di sepanjang pinggir Sungai Prajagumiwang dengan memanfaatkan lahan sepanjang pinggir bahu sungai. Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, bahwa proses pembuatan dan perbaikan kapal nelayan di Desa Karangsong sudah berlangsung sejak lama, mengingat masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai

nelayan dan wilayahnya berada di pesisir pantai, menjadikan sebagian masyarakatnya memiliki keahlian dalam membuat kapal nelayan. Jenis kapal motor yang dapat di buat memiliki berbagai macam ukuran mulai dari kapal motor berukuran kecil, sedang hingga ukuran besar.

B. Penyedia Kebutuhan logistik Pelayaran

Penyediaan logistik pelayaran yang meliputi kebutuhan bahan bakar minyak solor dan es yang dikelola oleh KPL Mina Sumitra, sedangkan keperluan lainnya seperti bahan makanan diusahakan oleh usaha perdagangan umum maupun ada juga yang disediakan oleh kios logistik yang dikelola oleh KPL Mina Sumitra.

Biaya dalam aktivitas pemenuhan logistik diklasifikasikan menurut jenis armada/ukuran kapal motor dalam melakukan pelayaran. Berdasarkan hasil angket (kuesioner terlampir) rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan logistik pelayaran menurut jenis kapal motor dapat di lihat pada Tabel IV.3.

TABEL IV.3
RATA-RATA BIAYA KEBUTUHAN LOGISTIK PELAYARAN
MENURUT JENIS KAPAL MOTOR YANG BEROPERASI
DI PPI KARANGSONG TAHUN 2007

Jenis Kapal Motor	Bahan Bakar		Es		Bahan Makanan	
	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1-2 GT	610.063	263.050	85.200	60.200	266.250	163..375
5-15 GT	4.192.500	2.580.000	1.335.000	1.050.000	982.500	762.500
> 15 GT	12.817.308	7.111.538	6.623.077	5.321.538	2.988.462	2.351.923

Sumber: Diolah dari Hasil Survei Lapangan, 2007

4.2.1.1. Pendapatan Pembuat Sarana Alat Tangkap (Perahu/Kapal Motor)

Pendapatan yang diperoleh pada pelaku usaha dalam pembuatan sarana alat tangkap (perahu atau kapal motor nelayan) dilakukan dengan pendekatan dari hasil informasi yang diperoleh dari pekerja pembuat perahu. Pendapatan pekerja pembuat perahu diperoleh dari hasil ongkos pekerjaan yang dibayar oleh pemilik modal (juragan). Besarnya ongkos pekerja bervariasi yakni untuk pekerja utama (tukang 1) sebesar Rp 50.000 per hari sedangkan pekerja pendukung (tukang 2) sebesar Rp 40.000 per hari.

Proses pembayaran ongkos pekerja berdasarkan hasil kesepakatan antara juragan dengan pekerja pembuat perahu, pembayarannya ada yang sistem mingguan atau bulanan. Jika mengestimasi pendapatan pekerja pembuat perahu selama 1 bulan (30 hari), maka pendapatan yang diperoleh pekerja utama sekitar Rp 1.500.000 dan pekerja pendukung sekitar Rp 1.200.000, sedangkan lamanya pekerjaan tergantung dari jenis ukuran kapal yang dibuatnya, untuk jenis kapal motor ukuran kecil dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1–2 bulan, sedang untuk kapal motor yang mempunyai ukuran sedang hingga besar dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2–5 bulan.

4.2.1.2. Pendapatan Penyedia Kebutuhan Logistik Pelayaran

Pendapatan yang diperoleh dari penyedia kebutuhan logistik pelayaran merupakan pendapatan yang diperoleh dari ongkos produksi yang dikeluarkan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan logistik pelayaran. Pada umumnya kebutuhan logistik pelayaran yang utama dikelola oleh pihak KPL Mina Sumitra dalam menyediakan BBM solar dan kebutuhan es, sedangkan kebutuhan lainnya (bahan

makanan untuk keperluan melaut), nelayan memperolehnya dari perdagangan umum di sekitar lokasi PPI Karangsong.

Biaya yang dikeluarkan nelayan dalam memenuhi kebutuhan logistik pelayaran merupakan pemasukkan nilai pendapatan bagi penyedia kebutuhan logistik pelayaran. Sebagai estimasi perolehan pendapatan bagi penyedia kebutuhan logistik pelayaran, salah satunya mengambil sampel pada penyedia BBM solar untuk nelayan yang dikelola oleh pihak KPL Mina Sumitra. Perolehan pendapatan KPL Mina Sumitra dari bisnis penyediaan BBM solar, dilakukan pendekatan estimasi dari hasil kapasitas penjualan BBM solar sebanyak 21.000 liter (21 ton) yang habis setiap 2 hari, jika asumsi perolehan pendapatan setiap liter solar sekitar Rp 300, maka pendapatan yang diperoleh dari penjualan solar sebanyak 21.000 liter adalah Rp 6.300.000.

4.2.2. Rantai Nilai Pada Tahap Produksi Kegiatan Perikanan

Rantai nilai pada tahap produksi merupakan penciptaan nilai pendapatan yang diperoleh pengelola pelelangan ikan (koperasi dan pemerintah) dan para nelayan.

4.2.2.1. Pendapatan Pengelola Pelelangan (Koperasi dan Pemerintah)

Berdasarkan data nilai produksi tangkapan ikan selama 5 tahun yang didaratkan di PPI Karangsong selalu mengalami peningkatan nilai produksi, hal ini berpengaruh pada peningkatan nilai pendapatan bagi pengelola pelelangan ikan (koperasi dan pemerintah). Apabila mengacu pada besaran retribusi sebesar 5 % yang diterima bagi pengelola pelelangan ikan, maka nilai pendapatan bagi pengelola

mengalami peningkatan. Penerimaan nilai pendapatan yang diperoleh pemerintah dan koperasi dapat di lihat pada Tabel IV.4 dan Tabel IV.5

TABEL IV.4
NILAI PENDAPATAN PEMERINTAH HASIL RETRIBUSI TANGKAPAN
IKAN DI PPI KARANGSONG

Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Pemprov Jawa Barat (0,60%) (Rp)	Pemkab Indramayu (1%) (Rp)	Biaya Keamanan dan Kas Desa (0,15%) (Rp)
2002	37.679.271.500	226.075.629	376.792.715	56.518.907
2003	39.010.865.100	234.065.191	390.108.651	58.516.298
2004	51.088.371.600	306.530.230	510.883.716	76.632.557
2005	71.675.831.200	430.054.987	716.758.312	107.513.747
2006	82.689.578.500	496.137.471	826.895.785	124.034.367

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari Tabel IV.4 terdapat biaya keamanan dan kas desa sebesar 0,15 % yang dialokasikan untuk biaya keamanan sebesar 0,10 % dan dana bantuan kas Pemerintah Desa Karangsong sebesar 0,05 %. Apabila dikonversi dari nilai persentase tersebut, pendapatan untuk alokasi keamanan Pemerintah Desa Karangsong pada Tahun 2006 (0,10) sebesar Rp 82.689.579 dan pendapatan untuk alokasi dana bantuan kas desa (0,05) sebesar Rp 41.344.789.

TABEL IV.5
NILAI PENDAPATAN KOPERASI MINA SUMITRA DAN DANA
NELAYAN HASIL RETRIBUSI TANGKAPAN IKAN
DI PPI KARANGSONG

Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Operasional TPI (0,80%) (Rp)	Penyelenggaraan (1,65%) (Rp)	Dana-dana Nelayan (0,80%) (Rp)
2002	37.679.271.500	301.434.172	621.707.980	301.434.172
2003	39.010.865.100	312.089.921	643.679.274	312.089.921
2004	51.088.371.600	408.706.973	842.958.131	408.706.973
2005	71.675.831.200	573.406.650	1.182.651.215	573.406.650
2006	82.689.578.500	661.516.628	1.364.378.045	661.516.628

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari Tabel IV.4 nilai pendapatan hasil retribusi tersebut terdapat pendapatan nelayan yang akan dikembalikan kembali kepada nelayan Karangsong, khususnya nelayan yang tercatat melakukan transaksi pelelangan di PPI Karangsong, karena pada saat menjual ikan tersebut nelayan dikenakan retribusi 2 % dari nilai transaksi penjualan ikan. Dana-dana nelayan sebesar 0,80 % terdapat alokasi untuk tabungan nelayan (0,35 %), asuransi nelayan (0,15 %), dana paceklik (0,20 %) dan dana sosial berupa penanggulangan kecelakaan di laut (0,10 %).

Dana yang akan dikembalikan kembali ke nelayan tersebut, biasanya pengelola (KPL Mina Sumitra) memberikannya pada saat nelayan Karangsong kesulitan dalam melaut yang disebabkan karena faktor cuaca (musim '*baratan*') yang disebut masyarakat nelayan Karangsong sebagai musim paceklik. Apabila dikonversi dari persentase tersebut, untuk dana tabungan nelayan Tahun 2006 (0,35 %) sebesar Rp 289.413.525 dan dana paceklik (0,20 %) sebesar Rp 165.379.157. Kemudian untuk dana asuransi nelayan (0,15 %) sebesar Rp 124.034.368 dan untuk dana sosial dan penanggulangan kecelakaan di laut (0,10 %) sebesar Rp 82.689.576.

4.2.2.2. Pendapatan Nelayan Karangsong

Besarnya jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan Karangsong selalu mengalami perubahan-perubahan, dimana jumlah produksi ikan akan mempengaruhi pendapatan nelayan, selain itu ditentukan oleh beberapa kondisi diantaranya; jumlah hasil tangkapan ikan, sarana alat tangkap/armada yang digunakan, banyaknya permintaan (bakul ikan), sistem bagi hasil pendapatan dan faktor-faktor lain tergantung situasi pelelangan ikan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, dalam

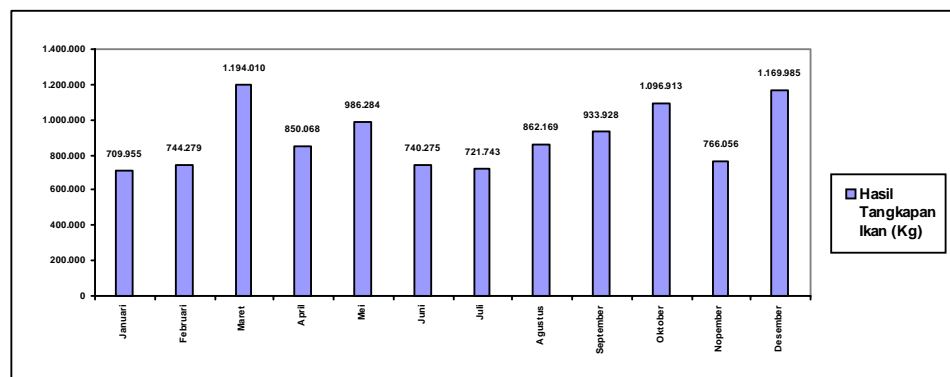
penelitian ini untuk mengindikasikan perolehan nilai pendapatan nelayan Karangsong akan dikaji menurut jumlah hasil tangkapan, penggunaan sarana alat tangkap dan sistem bagi hasil yang akan dijelaskan di bawah ini.

A. Jumlah Hasil Tangkapan

Jumlah tangkapan ikan para nelayan Karangsong terkait dengan perolehan hasil produksi, dipengaruhi oleh kondisi penangkapan ikan, biasanya terjadi pada kondisi '*musim baratan*', istilah bagi para nelayan Karangsong yang biasanya sulit untuk memperoleh hasil tangkapan ikan di laut. Pada musim '*baratan*' ini dapat mempengaruhi nilai pendapatan nelayan yang cenderung menurun oleh karena faktor alam dan cuaca.

Umumnya nelayan yang tidak melaut karena faktor cuaca tersebut biasanya memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki sarana alat tangkap yang rusak berupa perbaikan kapal motor dan perbaikan jaring. Informasi yang diperoleh dari sebagian nelayan Karangsong pada saat kondisi musim '*baratan*' nelayan memperoleh uang dari pengelola PPI Karangsong, yakni pemberian uang yang diperoleh dari pengembalian dana-dana nelayan yang besarnya tergantung dari hasil transaksi pelelangan ikan yang tercatat oleh pengelola pelelangan. Menurut nelayan yang menerima dana nelayan berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Untuk mengetahui kondisi bulan tangkapan dan kondisi musim '*baratan*', dapat di lihat pada Gambar 4.5.



Sumber: Diolah dari Data Produksi Tahun 2006, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2007

GAMBAR 4.5
PRODUKSI TANGKAPAN IKAN NELAYAN KARANGSONG

Hasil tangkapan ikan para nelayan Karangsong pada umumnya didaratkan di PPI Karangsong, ada juga nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di luar PPI Karangsong, diantaranya di PPI Blanakan Wilayah Subang, PPI Gebang Wilayah Cirebon dan bahkan ada juga yang bertransaksi di tengah laut. Menurut informasi yang diperoleh dari nelayan, kondisi tersebut dikarenakan PPI Karangsong tidak memiliki tempat hiburan, sedangkan PPI Blanakan Subang mempunyai tempat hiburan (panggung musik terbuka), ada juga yang disebabkan karena harga ikan yang sedang berfluktuasi sehingga nelayan mencari harga tertinggi di tempat pelelangan diluar PPI Karangsong. Selain itu disebabkan juga karena adanya masalah teknis diantaranya kehabisan bahan bakar minyak setelah melaut sehingga tidak mampu lagi melanjutkan untuk meneruskan perjalanan ke PPI Karangsong dan mendarakan hasil tangkapannya di luar PPI Karangsong. Hal ini menjadikan adanya suatu kebocoran nilai jumlah produksi yang didaratkan di PPI Karangsong.

Secara kuantitas jumlah hasil tangkapan nelayan yang menjual hasilnya di luar PPI Karangsong tidak diperoleh pada saat survei di lapangan, namun secara umum jumlah produksi ikan yang didaratkan di PPI Karangsong cenderung meningkat. Adanya peningkatan produksi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemasaran ikan yang berlangsung di PPI Karangsong berjalan relatif baik. Menurut Mahyuddin

(2001), untuk mengetahui seberapa besar kualitas pemasaran ikan yang berlangsung dapat dilakukan pengukuran Indeks Relatif Nilai Produksi.

Hasil indeks relatif nilai pada Tabel IV.4 dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2006 selalu menunjukkan angka lebih dari 1 ($I > 1$), yang mengindikasikan bahwa produksi perikanan relatif dari PPI Karangsong lebih baik apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari seluruh PPI di Kabupaten Indramayu. Secara rinci dapat di lihat pada Tabel IV.6.

TABEL IV.6
KUALITAS PEMASARAN IKAN PPI KARANGSONG

Tahun	PPI Seluruh Kabupaten Indramayu		PPI Karangsong		Indeks Relatif
	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)	
2000	16.658.169	26.138.537.575	5.108.283	29.266.249.100	3,65
2001	18.882.183	30.513.099.100	5.189.590	35.025.690.000	4,18
2002	18.877.380	77.751.925.800	5.729.397	37.679.271.500	1,60
2003	17.443.687	67.438.998.800	6.634.415	39.010.865.100	1,52
2004	24.420.324	95.648.428.670	7.827.053	51.088.371.600	1,67
2005	21.324.242	116.071.232.600	9.562.367	71.675.831.200	1,38
2006	25.205.291	134.380.384.100	10.775.665	82.689.578.500	1,44

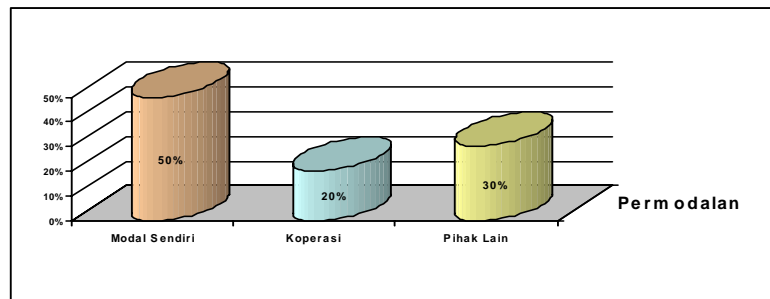
Sumber: Hasil Analisis, Diolah dari Data Produksi dan Nilai Produksi yang Didaratkan di PPI Karangsong, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2007

B. Penggunaan Sarana Alat Tangkap

Nilai pendapatan para nelayan diklasifikasikan menurut penggunaan jenis armada atau ukuran kapal motor. Hal ini untuk mengindikasikan perbandingan pendapatan pada kondisi kemampuan permodalan dan kemampuan armada/sarana penangkapan ikan pada saat mencari ikan di laut. Pendapatan nelayan pencari ikan di PPI Karangsong yang diklasifikasikan menurut jenis ukuran kapal motor berdasarkan hasil angket (kuesioner terlampir) sebagai berikut:

1). Kapal Motor Tempel Ukuran 1-2 GT

Nelayan yang menggunakan jenis kapal motor tempel berukuran 1-2 GT biasanya ikan yang diperoleh merupakan jenis udang dan rajungan serta beberapa jenis ikan lainnya tergantung berlangsungnya musim ikan. Jenis permodalan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diperoleh dari beberapa sumber, penggunaan modal sendiri merupakan paling banyak yakni 50 % dan modal hasil pinjaman koperasi sebanyak 20 %, sedangkan modal yang diperoleh dari pihak lain (juragan) sebanyak 30 %. Untuk jelasnya dapat di lihat pada Gambar 4.6.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei Lapangan, 2007

GAMBAR 4.6
PERSENTASE PENGGUNAAN MODAL
JENIS KAPAL MOTOR TEMPEL UKURAN 1-2 GT

Rata-rata pendapatan hasil nelayan Karangsong yang menggunakan jenis kapal motor tempel ukuran 1-2 GT secara rinci dapat di lihat pada Tabel IV.7.

TABEL IV.7
PENDAPATAN HASIL NELAYAN DENGAN MENGGUNAKAN
KAPAL MOTOR TEMPEL UKURAN 1-2 GT

A. Biaya		
Jenis Biaya	Rata-rata	
	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1. Bahan bakar	610.063	263.050
2. Es	85.200	60.200
3. Bahan makanan	266.250	164.375
4. Retribusi (2 %)	62.775	46.575
Total Biaya	1.024.288	534.200
B. Pendapatan		
Hasil tangkapan	Rata-rata	
	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1. Nilai hasil tangkapan	3.138.750	2.328.750
Pendapatan	2.114.462	1.794.550

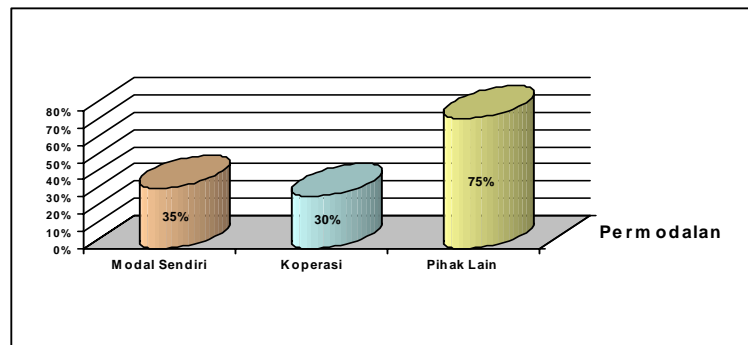
Sumber: Diolah dari Hasil Angket, 2007

2). Kapal Motor Ukuran 5-15 GT

Nelayan yang menggunakan jenis kapal motor berukuran 5-15 GT biasanya menggunakan alat tangkap berupa jaring rampus dan jaring insang. Jumlah awak kapal dalam kegiatan menangkap ikan di laut sekitar 4 sampai 7 ABK.

Jenis permodalan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diperoleh dari beberapa sumber, seperti penggunaan modal gabungan antara modal sendiri dan koperasi dan atau modal lainnya.

Penggunaan modal yang diperoleh dari pihak lain lebih banyak sebesar 75 % dan modal sendiri sebanyak 35 % serta modal dari koperasi sebanyak 30 %. Jelasnya dapat di lihat Gambar 4.7.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei Lapangan, 2007

GAMBAR 4.7
PERSENTASE PENGGUNAAN MODAL
JENIS KAPAL MOTOR UKURAN 5-15 GT

Rata-rata pendapatan nelayan PPI Karangsong yang menggunakan jenis kapal motor ukuran 5-15 GT secara rinci dapat di lihat pada Tabel IV.8.

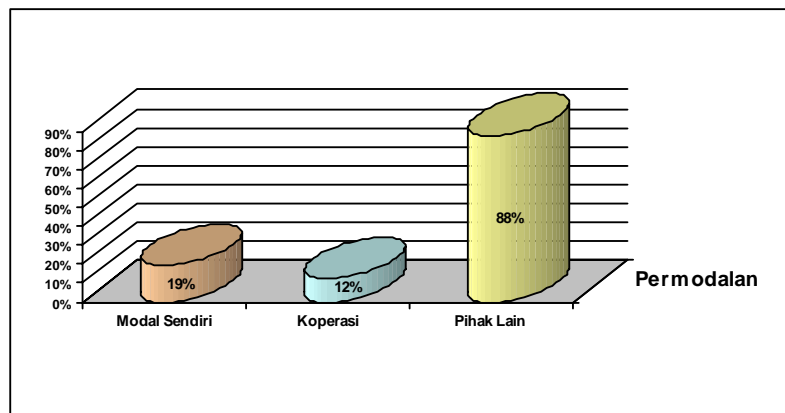
TABEL IV.8
PENDAPATAN HASIL NELAYAN DENGAN MENGGUNAKAN
KAPAL MOTOR UKURAN 5-15 GT

A. Biaya		
Jenis Biaya	Rata-rata	
	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1. Bahan bakar	4.192.500	2.580.000
2. Es	1.335.000	1.050.000
3. Bahan makanan	982.500	762.500
4. Retribusi (2 %)	381.500	285.000
Total Biaya	6.891.500	4.677.500
B. Pendapatan		
Hasil tangkapan	Rata-rata	
	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1. Nilai hasil tangkapan	19.075.000	14.250.000
Pendapatan	12.183.500	9.572.500

Sumber: Diolah dari Hasil Angket, 2007

3). Kapal Motor Ukuran Lebih dari 15 GT

Nelayan yang menggunakan jenis kapal motor berukuran lebih dari 15 GT biasanya menggunakan alat tangkap berupa jaring nylon. Jumlah awak kapal dalam kegiatan menangkap ikan di laut jumlahnya berkisar antara 7 sampai lebih dari 10 ABK. Jenis permodalan yang digunakan yang paling besar menggunakan modal dari pihak lain (88%). Untuk jelasnya dapat di lihat pada Gambar 4.8.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei Lapangan, 2007

GAMBAR 4.8
PERSENTASE PENGGUNAAN MODAL

JENIS KAPAL MOTOR UKURAN LEBIH DARI 15 GT

Rata-rata pendapatan nelayan PPI Karangsong yang menggunakan jenis kapal motor ukuran lebih dari 15 GT secara rinci dapat di lihat pada Tabel IV.9.

TABEL IV.9
PENDAPATAN HASIL NELAYAN DENGAN MENGGUNAKAN
KAPAL MOTOR UKURAN LEBIH DARI 15 GT

A. Biaya		
Jenis Biaya	Rata-rata	
	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1. Bahan bakar	12.817.308	7.111.538
2. Es	6.623.077	5.321.538
3. Bahan makanan	2.988.462	2.351.923
4. Retribusi (2 %)	924.615	611.538
Total Biaya	23.353.462	15.396.537
B. Pendapatan		
Hasil tangkapan	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1. Nilai hasil tangkapan	56.461.538	43.461.538
Pendapatan	33.108.076	28.065.001

Sumber: Diolah dari Hasil Angket, 2007

C. Sistem Bagi Hasil Pendapatan Nelayan Karangsong

Pendapatan para nelayan yang berlangsung di PPI Karangsong ditentukan berdasarkan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal atau pemilik modal dengan buruh nelayan (ABK) dan bukan sistem gaji bulanan. Nilai pendapatan nelayan diperoleh dari hasil nilai tangkapan ikan, setelah dikurangi modal biaya operasional/logistik pelayaran. Modal biaya logistik terlebih dahulu dikembalikan kepada pemilik modal atau juragan, selanjutnya dari sisa hasil tangkapan tersebut, kemudian dilakukan pembagian sistem bagi hasil.

Modal logistik pelayaran diantaranya biaya untuk pembelian bahan bakar, pembelian es dan kebutuhan makanan pada saat melakukan pelayaran, sedangkan biaya untuk perbaikan sarana alat tangkap berupa perbaikan kapal motor dan peralatan tangkap lainnya bukan merupakan bagian dari pengurangan dalam sistem

bagi hasil pendapatan nelayan Karangsong, melainkan biaya perbaikannya di tanggung oleh pemilik kapal motor atau pemilik sarana alat tangkap lainnya.

Sistem bagi hasil pendapatan nelayan yang berlangsung pada nelayan Karangsong pada umumnya menggunakan perbandingan persentase yaitu 40 % : 60 %. Besarnya perbandingan nilai persentase pendapatan ditentukan oleh kepemilikan modal maupun kepemilikan kapal motor atau alat tangkapannya. Permodalan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan di laut diantaranya diperoleh dari modal sendiri maupun modal dari pihak lain.

Bagi para nelayan yang tidak memiliki modal sendiri untuk melakukan usaha penangkapan ikan pada umumnya dilakukan dengan cara meminjam modal kepada pemilik modal atau juragan atau istilah bagi nelayan Karangsong disebut dengan “*opoh*”. Istilah *opoh* merupakan pinjaman modal dan pinjaman sarana alat tangkap berupa kapal motor atau perlengkapan alat tangkapan lainnya (jaring nylon) dari pemilik kapal atau pemilik modal kepada nelayan pencari ikan yang tidak memiliki sarana alat tangkap dan permodalan. Sistem pembayarannya dilakukan setelah dari hasil penjualan tangkapan ikan.

Proses sistem bagi hasil pendapatan nelayan yang menggunakan modal sendiri maupun menggunakan modal pinjaman untuk memperoleh hasil pendapatan nelayan berbeda-beda dalam setiap tahapannya. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1). Modal Sendiri

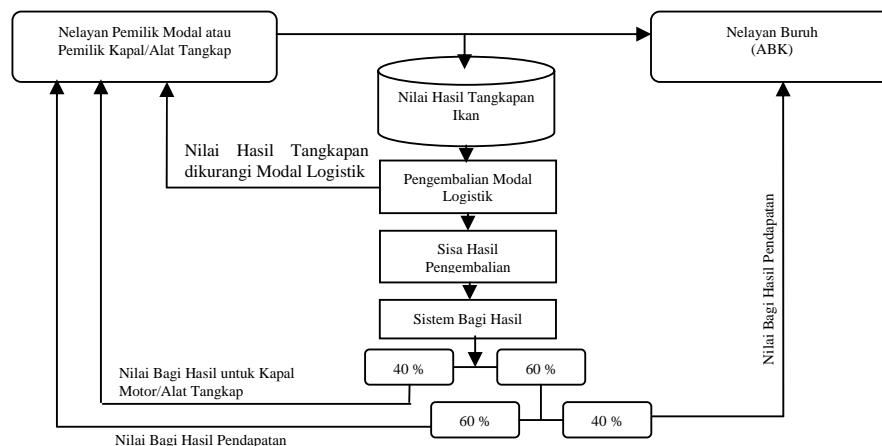
Nelayan yang memiliki modal sendiri merupakan nelayan pemilik kapal/alat tangkap dan memiliki modal pelayaran. Pemilik kapal motor mempekerjakan para

nelayan buruh (ABK) atau memang para nelayan buruh yang sengaja meng-inginkan pekerjaan menangkap ikan pada nelayan pemilik kapal motor. Para awak kapal ini terdiri dari; (1). juru kemudi (nahkoda) bertugas untuk men-jalankan dan mengendalikan kapal motor, (2) juru mesin bertugas untuk menjaga mesin supaya tetap berjalan, (3) juru tangkap merupakan pekerja yang menebar jaring atau alat tangkap lainnya untuk menangkap ikan.

Sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh dilakukan setelah melakukan pengembalian modal keperluan logistik pelayaran yang diperoleh dari hasil nilai tangkapan ikan, caranya hasil nilai tangkapan ikan dikurangi modal logistik, selanjutnya dari sisa pengembalian modal dilakukan sistem bagi hasil yang pertama, yaitu 40 % : 60 %.

Nilai persentase awal sebesar 40 % dari sisa pengembalian modal me-rupakan nilai bagi hasil untuk diberikan kepada nelayan pemilik sebagai jasa kapal motor atau alat tangkap. Sistem bagi hasil yang kedua, dari nilai persentase sebesar 60 % dilakukan pembagian kembali antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan buruh sebesar 60 % : 40 %, selanjutnya pembagian hasil nilai sebesar 60 % diberikan kepada nelayan pemilik dan hasil nilai 40 % diberikan kepada buruh nelayan.

Secara skematis sistem bagi hasil nelayan pemilik kapal dan modal dapat di lihat pada Gambar 4.9.



GAMBAR 4.9
SISTEM BAGI HASIL MENGGUNAKAN MODAL SENDIRI

2). Modal Pinjaman

Nelayan Karangsong yang tidak memiliki permodalan berupa alat tangkap dan modal keperluan logistik dapat melakukan hubungan kerjasama berupa meminjam modal maupun menyewa kapal motor kepada pemilik modal atau juragan yang biasa disebut sistem “*opoh*”. Bentuk pinjaman opoh tersebut antara lain; (1). Pinjaman modal untuk keperluan logistik pelayaran (2). Pinjaman/sewa kapal motor (lengkap dengan alat tangkap) dan (3). Pinjaman atau sewa kapal motor (lengkap dengan alat tangkap) berikut permodalan untuk keperluan logistik pelayaran.

Sistem pinjaman modal yang berlangsung di nelayan Karangsong akan diuraikan sebagai berikut:

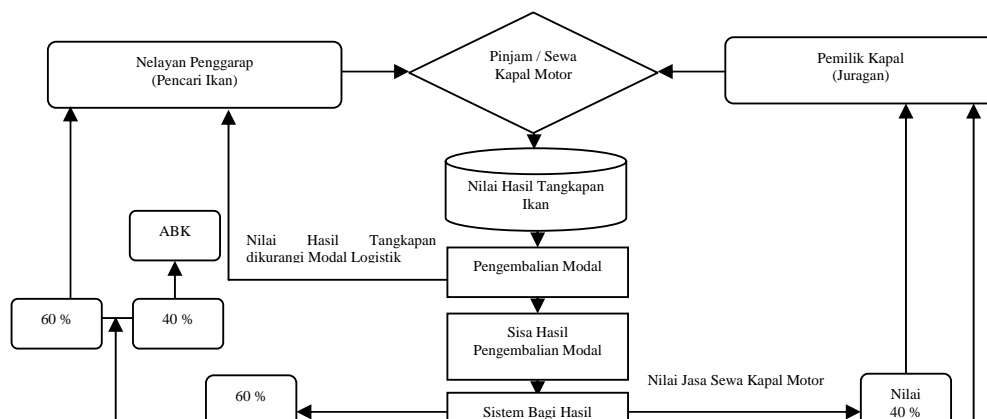
(1). Pinjaman Modal untuk Keperluan logistik Pelayaran

Bagi para nelayan pencari ikan yang memiliki kapal motor namun ter-kendala oleh tidak adanya modal untuk melakukan pelayaran dapat melakukan pinjaman modal dengan pemilik modal (juragan). Sistem pembayaran untuk mengembalikan pinjaman modal dilakukan setelah hasil tangkapan ikan terjual, selanjutnya nelayan pemilik kapal motor melakukan sistem bagi hasil kepada pemilik modal sebesar 60 % : 40 %.

(2). Pinjam atau Sewa Kapal Motor (lengkap dengan alat tangkap)

Bagi para nelayan Karangsong yang tidak memiliki sarana alat tangkap berupa kapal motor dan alat tangkapan lainnya (jaring nylon, jaring rampus) tetapi memiliki permodalan dalam melakukan penangkapan ikan, yang disebut sebagai nelayan penggarap. Untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan penggarap dapat meminjam atau menyewa kapal motor kepada pemilik kapal (juragan kapal). Sistem pembayaran untuk mengembalikan pinjaman kapal motor dilakukan setelah hasil tangkapan ikan terjual, selanjutnya nelayan penggarap melakukan sistem bagi hasil kepada juragan kapal sebesar 60 % : 40 %.

Persentase bagi hasil yang pertama sebesar nilai 40 % dari sisa pengembalian modal diberikan kepada juragan sebagai jasa pengembalian pinjaman kapal motor. Selanjutnya yang kedua, nilai 60 % dari sisa pengembalian modal dilakukan pembagian lagi sebesar 60 % : 40 %, dari nilai persentase sebesar 40 % merupakan bagian yang diberikan untuk juragan kapal sebagai bagi hasil penggunaan jasa alat tangkap/kapal motor. Kemudian yang ketiga, dari nilai persentase sebesar 60 % dilakukan pembagian lagi antara nelayan penggarap dengan nelayan buruh sebesar 60 % : 40 %. Nilai persentase sebesar 60 % merupakan bagian nelayan penggarap dan nilai 40 % diberikan kepada nelayan buruh. Secara skematis sistem bagi hasil nelayan penggarap yang menggunakan pinjaman kapal motor dapat di lihat pada Gambar 4.11.

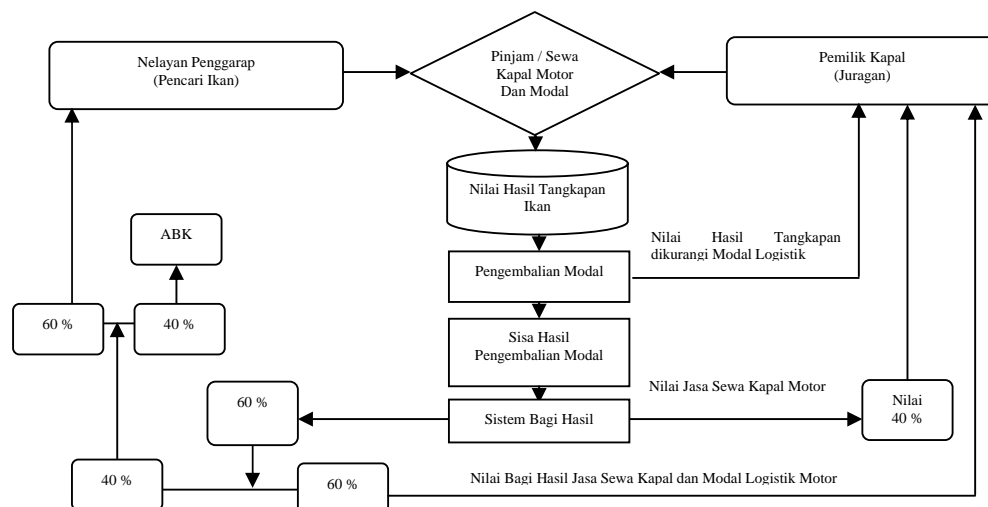


GAMBAR 4.11
SISTEM BAGI HASIL MENGGUNAKAN PINJAMAN KAPAL MOTOR

(3). Pinjam Kapal Motor sekaligus Pinjam Modal Logistik Pelayaran

Nelayan penggarap yang tidak memiliki sarana alat tangkap dan tidak memiliki permodalan dalam melakukan penangkapan ikan, nelayan penggarap dapat menggunakan pinjaman berupa kapal motor (lengkap dengan sarana alat tangkapnya) dan permodalan untuk keperluan logistik kepada pemilik kapal (juragan kapal).

Tahapan dalam proses sistem bagi hasil hampir sama dengan cara nelayan penggarap yang meminjam/menyewa kapal motor, hanya saja persentase proporsi pembagian sistem bagi hasilnya lebih besar. Untuk jelasnya dapat di lihat pada Gambar 4.12.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei Lapangan, 2008

GAMBAR 4.12
SISTEM BAGI HASIL MENGGUNAKAN PINJAMAN KAPAL MOTOR
DAN MODAL LOGISTIK PELAYARAN

4.2.2.3. Perbandingan Pendapatan Antar Status Nelayan

Perbandingan pendapatan antar status nelayan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui keunggulan dan persaingan dalam memperoleh pendapatan nelayan yang mengacu pada penggunaan armada atau jenis kapal motor yang digunakan pada saat menangkap ikan di laut yang mengacu pada penggunaan modal dan sistem bagi hasil yang berlangsung pada nelayan Karangsong.

Perolehan pendapatan nelayan Karangsong yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni diperoleh dari hasil perhitungan nilai pendapatan nelayan tertinggi dan terendah yang diperoleh dari perhitungan nilai hasil tangkapan dikurangi biaya produksi penangkapan ikan (Tabel IV.7, Tabel IV.8 dan Tabel IV.9), kemudian dilakukan dengan mekanisme pembagian sistem bagi hasil yang berlangsung pada nelayan Karangsong (proses perhitungan terlampir).

Masing-masing perbandingan pendapatan nelayan Karangsong menurut klasifikasi tersaji pada Tabel IV.10, Tabel IV.11 dan Tabel IV.12 di bawah ini.

TABEL IV.10
PERBANDINGAN PENDAPATAN MENURUT STATUS NELAYAN
KARANGSONG MENGGUNAKAN KAPAL MOTOR 1-2 GT

No.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu Operasional ▪ Jumlah Awak Kapal 	Status Nelayan	Pendapatan Yang Berasal Dari Modal				
			Modal Sendiri	Pinjaman Koperasi	Pinjam Modal Juragan	Pinjam Sarana Alat Tangkap	Pinjam Sarana Alat Tangkap dan Modal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1-2 Hari ▪ 1-4 ABK 						
	Pendapatan Tertinggi						
1.		Pemilik	1.606.991	1.580.597	845.785	1.353.256	1.606.991
2.		Penggarap	-	-	964.195	456.724	304.483
3.		Buruh	507.471	499.136	304.482	304.482	202.988
		Jumlah	2.114.462	2.079.733	2.114.462	2.114.462	2.114.462

Pendapatan Terendah							
1.		Pemilik	1.363.858	1.351.678	717.820	1.148.512	1.363.858
2.		Penggarap	-	-	818.315	387.623	258.415
3.		Buruh	430.692	426.846	258.415	258.415	172.277
		Jumlah	1.794.550	1.778.524	1.794.550	1.794.550	1.794.550

Sumber: Hasil Analisis, 2008

TABEL IV.11
PERBANDINGAN PENDAPATAN MENURUT STATUS NELAYAN
KARANGSONG MENGGUNAKAN KAPAL MOTOR 5-15 GT

No.	<ul style="list-style-type: none"> Waktu Operasional Jumlah Awak Kapal 	Status Nelayan	Pendapatan Yang Berasal Dari Modal				
			Modal Sendiri	Pinjaman Koperasi	Pinjam Modal Juragan	Pinjam Sarana Alat Tangkap	Pinjam Sarana Alat Tangkap dan Modal
	<ul style="list-style-type: none"> 15-30 Hari 4-7 ABK 						
Pendapatan Tertinggi							
1.		Pemilik	9.259.460	9.102.334	4.873.400	7.797.440	9.259.500
2.		Penggarap	-	-	5.555.676	2.631.636	1.754.400
3.		Buruh	2.924.040	2.874.421	1.754.424	1.754.424	1.169.600
		Jumlah	12.183.500	11.976.755	12.183.500	12.183.500	12.183.500
Pendapatan Terendah							
1.		Pemilik	7.275.100	7.168.453	3.829.000	6.126.400	7.275.100
2.		Penggarap	-	-	4.365.060	2.067.660	1.378.440
3.		Buruh	2.297.400	2.263.722	1.378.440	1.378.440	918.960
		Jumlah	9.572.500	9.432.175	9.572.500	9.572.500	9.572.500

Sumber: Hasil Analisis, 2008

TABEL IV.12
PERBANDINGAN PENDAPATAN MENURUT STATUS NELAYAN
KARANGSONG MENGGUNAKAN KAPAL MOTOR LEBIH DARI 15 GT

No.	<ul style="list-style-type: none"> Waktu Operasional Jumlah Awak Kapal 	Status Nelayan	Pendapatan Yang Berasal Dari Modal				
			Modal Sendiri	Pinjaman Koperasi	Pinjam Modal Juragan	Pinjam Sarana Alat Tangkap	Pinjam Sarana Alat Tangkap dan Modal
	<ul style="list-style-type: none"> 30 Hari 7-10 ABK 						
Pendapatan Tertinggi							
1.		Pemilik	25.162.138	24.629.679	13.243.230	21.189.168	25.162.138
2.		Penggarap	-	-	15.097.283	7.151.345	4.767.563
3.		Buruh	7.945.938	7.777.793	4.767.563	4.767.563	3.178.375
		Jumlah	33.108.076	32.407.472	33.108.076	33.108.076	33.108.076
Pendapatan Terendah							
1.		Pemilik	21.329.401	11.038.360	11.226.000	17.961.600	21.329.401
2.		Penggarap	-	-	12.797.641	6.062.041	4.041.360
3.		Buruh	6.735.600	6.624.745	4.041.360	4.041.360	2.694.240
		Jumlah	28.065.001	17.663.105	28.065.001	28.065.001	28.065.001

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan pendapatan menunjukkan nilai pendapatan tertinggi diperoleh nelayan pemilik (juragan). Adanya nelayan penggarap (pencari ikan) merupakan upaya yang dilakukan secara berkelompok oleh

sebagian nelayan Karangsong untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pemilik modal (juragan) dalam kegiatan menangkap ikan. Nilai pendapatan yang diperoleh nelayan penggarap dan nelayan buruh bervariasi menurut jenis atau model pinjaman kepada juragan. Nelayan penggarap biasanya dipimpin oleh seorang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam aktivitas selama penangkapan ikan berlangsung.

Rata-rata nilai pendapatan yang berasal dari penggunaan modal sendiri pada nelayan buruh yang bekerja pada armada kapal motor tempel (1-2 GT), jika jumlah awak 4 ABK dan waktu pelayaran selama 2 hari, maka pendapatan per hari yang diperoleh seorang nelayan buruh berkisar Rp 53.837 sampai Rp 63.433, jika menggunakan modal pinjaman dari juragan yang dilakukan oleh nelayan penggarap, pendapatan nelayan buruh perhari berkisar Rp 32.302 sampai dengan Rp 38.060.

Kemudian rata-rata nilai pendapatan dari penggunaan modal sendiri pada nelayan buruh yang bekerja pada armada kapal motor berukuran 5-15 GT, jika jumlah awak 5 ABK dan waktu pelayaran selama 15 hari, maka pendapatan perhari yang diperoleh seorang nelayan buruh berkisar Rp 30.632 sampai dengan Rp 38.987, sedangkan jika menggunakan modal pinjaman dari juragan, pendapatannya berkisar Rp 18.379 sampai Rp 23.392.

Selanjutnya rata-rata nilai pendapatan dari penggunaan modal sendiri pada nelayan buruh yang bekerja pada armada kapal motor berukuran lebih dari 15 GT, jika jumlah awak 7 ABK dan waktu pelayaran selama 30 hari, maka pendapatan perhari yang diperoleh seorang nelayan buruh berkisar Rp 32.074 sampai Rp 37.838,

sedangkan jika menggunakan modal pinjaman dari juragan, pendapatan perhari berkisar Rp 19.245 sampai Rp 22.703.

Untuk mengetahui secara rinci nilai pendapatan per hari yang diperoleh nelayan buruh Karangsong dapat di lihat pada Tabel IV.13.

TABEL IV.13
NILAI PENDAPATAN NELAYAN BURUH MENURUT PENGGUNAAN
SARANA ALAT TANGKAP DAN JENIS PERMODALAN

No.	Armada Kapal Motor	Modal Sendiri		Modal Koperasi		Pinjam Modal Juragan		Pinjam Sarana Alat Tangkap dan Permodalan	
		Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)
1.	1-2 GT	63.433	53.837	62.392	53.355	38.060	32.302	25.374	21.535
2.	5-15 GT	38.987	30.632	38.326	30.183	23.392	18.379	15.595	12.253
3.	> 15 GT	37.838	32.074	37.037	31.546	22.703	19.245	15.135	12.830

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Hasil kajian perbandingan nilai pendapatan nelayan Karangsong yang menggunakan sistem bagi hasil pendapatan, menunjukkan bahwa peranan pemodal dalam kegiatan usaha perikanan tangkap sangat mendominasi dalam memperoleh pendapatan yang relatif besar, hal ini menjadi keunggulan persaingan dalam sistem kegiatan perikanan tangkap. Peran pemodal disini diartikan sebagai pemilik sarana alat tangkap dan permodalan logistik pelayaran.

Modal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan pada prinsipnya tidak berkurang bahkan dikembalikan kembali pada saat hasil penjualan tangkapan ikan, selama hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dapat menutupi modal yang digunakan.

Keberadaan pemodal bagi masyarakat nelayan Karangsong, khususnya nelayan yang menjalin kerjasama dalam hal permodalan memang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga terjadi hubungan kerjasama yang baik dalam memperoleh

permodalan, di satu sisi hubungan kerjasama antara nelayan dan pemodal, cenderung merugikan bagi nelayan pencari ikan (nelayan buruh), mengingat dalam pembagian hasil tangkapan lebih menguntungkan bagi pihak pemodal (juragan). Sementara sistem peminjaman permodalan usaha yang diberikan koperasi nelayan saat ini relatif terbatas jumlahnya.

Adanya hubungan kerjasama ini disebabkan karena dalam memenuhi kebutuhan sarana alat tangkap (kapal motor, jaring, dan alat tangkap ikan lainnya) bagi sebagian nelayan Karangsong (nelayan penggarap dan nelayan buruh) dirasakan cukup mahal, kemudian salah satu konsekuensinya nelayan mejalain kerjasama kepada pemilik modal (juragan). Dari hasil kajian tersebut dapat diindikasikan bahwa peranan yang mendominasi dalam menciptakan nilai pen-dapatan nelayan Karangsong diantaranya:

- Hasil nilai tangkapan ikan.
- Sarana alat tangkap berupa kapal motor dan perlengkapan alat tangkap lainnya.
- Modal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan (kebutuhan logistik).
- Sistem bagi hasil

4.2.3. Rantai Nilai Pada Tahap Pasca Produksi Kegiatan Perikanan

Rantai nilai pada tahap pasca produksi merupakan penciptaan nilai pen-dapatan yang diperoleh pedagang pengepul (bakul ikan) dan pedagang pengecer ikan. Pendekatan nilai pendapatan bakul ikan diperoleh dari nilai hasil mengikuti proses pelelangan ikan. Mengingat jenis ikan yang di lelang jenisnya beragam, maka untuk mengindentifikasinya dilakukan pada pendekatan komododitas hasil jenis ikan yang didaratkan di PPI Karangsong yang didominasi oleh jenis ikan tongkol. Harga ikan

tongkol hasil pelelangan ikan per 1 kwintal Rp 2.500.000 yang sebelumnya para bakul ikan terlebih dahulu menyerahkan uang jaminan lelang yang telah di setor ke petugas pengelola pelelangan.

Beberapa biaya yang dikeluarkan bakul ikan untuk memperoleh ikan diantaranya membayar retribusi sebesar 3 % dari setiap transaksi dan jika nilai transaksi harga ikan tongkol Rp 2.500.000 maka yang dibayar adalah Rp 75.000, kemudian ditambah ongkos untuk buruh pengepak ikan sekitar Rp 10.000 dan pembelian es Rp 12.000 serta ongkos transportasi untuk pemasaran wilayah lokal (Indramayu sekitarnya) sekitar Rp 100.000 sedangkan ongkos transportasi untuk distribusi ke luar wilayah Indramayu sekitar Rp 200.000. Sehingga total modal yang dikeluarkan bakul ikan untuk memperoleh 1 kwintal ikan tongkol untuk wilayah pemasaran lokal sebesar Rp 2.697.000 dan untuk pemasaran di luar Wilayah Indramayu sekitar Rp 2.797.000.

Menurut Tarigan (2005:88), distributor harus mendapat untung karena selain menanggung biaya transportasi juga menanggung kerusakan barang selama di perjalanan. Distributor akan membeli dari produsen dan memasarkan ke berbagai wilayah (heksagon) sepanjang biaya transportasi masih lebih rendah dari selisih antara harga beli distributor dengan harga beli pengecer. Bakul ikan sebagai distributor selanjutnya memasarkan kembali kepada beberapa pedagang pengecer maupun ke pengolah ikan yang selanjutnya terakhir akan dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi.

Bakul ikan yang menjual ikan tongkol ke pedagang pengecer lokal per-kwintal sekitar Rp 3.000.000, sedangkan untuk pedagang pengecer diluar Wilayah

Indramayu per 1 kwintal sekitar Rp 3.200.000, selanjutnya pedagang pengecer menjual ikan ke konsumen memiliki selisih harga per kg sekitar Rp 3000.

Secara tabulasi masing-masing nilai tambah dan margin keuntungan pada pelaku usaha diantaranya bakul ikan dan pedagang pengecer dapat di lihat pada Tabel IV.14 untuk pemasaran lokal dan Tabel IV.15 untuk pemasaran luar wilayah Indramayu.

TABEL IV.14
NILAI TAMBAH DAN KEUNTUNGAN PEMASARAN JENIS IKAN
TONGKOL UNTUK PEMASARAN LOKAL
(TUJUAN KECAMATAN INDRAMAYU, SINDANG DAN JATIBARANG)

No.	Pelaku	Harga (per kwintal)	Nilai Tambah	Biaya (per kwintal)	Keuntungan	Margin Keuntungan
1.	Nelayan	Rp 2.500.000		Rp 1.245.000	Rp 1.255.000	100%
2.	Bakul ikan	Rp 3.000.000	Rp 500.000	Rp 2.697.000	Rp 303.000	11,23%
3.	Pedagang pengecer	Rp 3.300.000	Rp 300.000	Rp 3.020.000	Rp 280.000	9,27%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

TABEL IV.15
NILAI TAMBAH DAN KEUNTUNGAN PEMASARAN JENIS IKAN
TONGKOL UNTUK PEMASARAN LUAR WILAYAH INDRAMAYU
(TUJUAN CIREBON, MAJALENGKA, KUNINGAN, BANDUNG, SUBANG
DAN JAKARTA)

No.	Pelaku	Harga (per kwintal)	Nilai Tambah	Biaya (per kwintal)	Keuntungan	Margin Keuntungan
1.	Nelayan	Rp 2.500.000		Rp 1.245.000	Rp 1.255.000	100%
2.	Bakul ikan	Rp 3.200.000	Rp 700.000	Rp 2.797.000	Rp 403.000	14,41%
3.	Pedagang pengecer	Rp 3.500.000	Rp 300.000	Rp 3.220.000	Rp 280.000	8,69%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

4.3. Keterkaitan dan Dampak Pengganda Kegiatan Usaha Perikanan

Rangkaian kegiatan usaha bisnis perikanan mempunyai hubungan ke-terkaitan ke belakang dan ke depan antara pelaku dan usaha kegiatan perikanan. Keterkaitan

ke belakang hubungannya dengan tahapan pra produksi dan produksi sedangkan keterkaitan ke depan hubungannya dengan dengan tahapan pasca produksi yang terjadi di dalam lokasi usaha kegiatan perikanan maupun di luar Kawasan PPI Karangsong.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004:66), analisis keterkaitan menyatakan tingkat ketergantungan antar sektor dan sejauh mana sektor tertentu dipengaruhi dan mempengaruhi sektor lainnya. Kaitan antar sektor dapat diidentifikasi berdasarkan arah penggunaan hasil dan masukkan sebagai kaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*). Sama halnya dengan analisis pengganda, analisis keterkaitan dapat dilakukan terhadap hasil, perubahan pendapatan dan kesempatan kerja.

Berlangsungnya aktivitas PPI Karangsong sebagai kegiatan pelabuhan pendaratan dan pelelangan ikan, menciptakan pelaku dan jenis usaha kegiatan masyarakat nelayan antara lain; masyarakat nelayan yang terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh (ABK), pedagang pengepul ikan (bakul ikan) dan pengolah ikan serta pembuat sarana alat tangkap kemudian jasa penunjang lainnya diantaranya usaha perdagangan dalam memenuhi kebutuhan logistik pelayaran.

Berkaitan dengan adanya hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap tersebut telah menciptakan pendapatan ekonomi dan membuka kesempatan lapangan usaha dalam kegiatan perikanan.

Fenomena yang menggambarkan terjadinya rantai keterkaitan tersebut dapat menciptakan efek pengganda yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas perikanan di Kawasan PPI Karangsong, dimana masing-masing pelaku kegiatan perikanan saling

tergantungan satu sama lainnya. Adanya ketergantungan tersebut tidak lepas oleh adanya faktor permintaan pada hasil produk yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat nelayan yakni produk ikan sebagai salah satu kebutuhan sumber daya protein masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi.

4.3.1. Keterkaitan dan Dampak Pengganda pada Tahap Pra Produksi

Hasil pemetaan di lapangan mengindikasikan keterkaitan dan dampak pengganda yang terjadi pada tahap pra produksi diantaranya pada kegiatan pembuatan industri galangan kapal (pembuatan sarana alat tangkap), perdagangan umum dan Koperasi Mina Sumitra sebagai penyedia logistik pelayaran. Dalam melakukan aktivitasnya, nelayan Karangsong akan selalu berhubungan (terkait) oleh pelaku dan jenis usaha kegiatan tersebut.

Dampak pengganda pada tahap pra produksi kegiatan perikanan diantaranya telah membuka lapangan pekerjaan bagi nelayan Karangsong sebanyak sebanyak 756 nelayan pemilik dan 4.469 nelayan buruh, selanjutnya pada usaha pembuatan sarana alat tangkap telah membuka lapangan pekerjaan dalam pembuatan kapal motor di sekitar PPI Karangsong, yang setiap kelompoknya dapat mempekerjakan 5 hingga 7 pekerja dalam pembuatan kapal motor berukuran kecil sedangkan pada pembuatan kapal motor yang berukuran besar mampu mempekerjakan sebanyak 10 hingga 20 orang pekerja pembuat kapal motor. Kemudian pada pemenuhan kebutuhan logistik pelayaran, telah membuka lapangan usaha penyedia kebutuhan logistik pelayaran, baik yang diusahakan oleh pihak pengelola (KPL Mina Sumitra) maupun oleh masyarakat umum berupa perdagangan umum yang menyediakan beberapa kelengkapan yang terkait dalam memenuhi kebutuhan logistik pelayaran

nelayan, diantaranya keperluan BBM, es, bahan makanan dan sarana alat tangkap (jaring dan pancing). Dalam proses bongkar muat pengiriman logistik pelayaran yang akan dikirim ke perahu nelayan telah memunculkan jasa pengangkut barang (buruh angkut) di sekitar PPI Karangsong.

4.3.2. Keterkaitan dan Dampak Pengganda pada Tahap Produksi

Aktivitas produksi dalam kegiatan perikanan diantaranya pendaratan ikan dan pelelangan ikan. Hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPI Karangsong, sebelumnya dilakukan pembersihan dan penyortiran jenis ikan yang selanjutnya diangkut untuk ditimbang ke tempat pelelangan ikan. Pada proses penyortiran ini, nelayan dibantu oleh pekerja yang mengangkut hasil tangkapannya oleh pekerja atau buruh angkut untuk ditimbang pada pengelola pelelangan.

Dalam proses pelelangan ikan terdapat beberapa petugas pelelangan ikan, yang secara teknis mengatur jalannya proses pelelangan ikan di TPI Karangsong, yakni terdiri dari; (1) juru karcis, bertugas mengeluarkan karcis kepada nelayan setelah ikan ditimbang; (2) juru lelang, bertugas memeriksa karcis dari nelayan yang akan dilelangkan dan memeriksa tanda peserta lelang bagi bakul ikan untuk mengikuti proses pelalangan; (3) juru blad, bertugas mencatat semua transaksi dan catatan setiap transaksi yang akan diberikan kepada juru rekap; (4) juru rekap, bertugas merekap dan membuat rekapan dari dari setiap transaksi untuk di-gunakan dalam penyelesaian administrasi melalui kasir; (5) juru kendali, bertugas memberikan informasi peserta lelang dan mengendalikan peserta lelang dengan mengawasi transaksi pada setiap bakul ikan; (6) juru kasir bayar, bertugas melakukan pembayaran hasil lelang; (7) juru kasir terima, bertugas menerima uang jaminan

lelang dari peserta lelang yang terdiri dari beberapa bakul ikan dan selanjutnya juru kasir terima mengeluarkan tanda pembayaran/tanda peserta lelang kepada para bakul ikan. Kemudian bakul ikan yang sudah memperoleh tanda pembayaran dilakukan pemeriksaan oleh juru lelang untuk diikutsertakan dalam proses pelelangan.

4.3.3. Keterkaitan dan Dampak Pengganda pada Tahap Pasca Produksi

Keterkaitan dalam tahapan pasca produksi kegiatan perikanan diantaranya pemasaran hasil tangkapan ikan dan industri pengolahan ikan. Dalam mendukung aktivitas pemasaran ikan telah memunculkan peluang usaha bagi para bakul ikan untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan, baik yang berasal dari sekitar lokasi (setempat) maupun yang berasal dari luar Wilayah Indramayu. Jumlah rata-rata bakul setempat (lokal) sekitar 32 orang, sedangkan bakul pendatang sekitar 34 orang. Bakul ikan dalam memperoleh ikan segar, diperoleh dari proses pelelangan ikan di TPI Karangsong, selanjutnya dilakukan proses pengepakan ikan yang dibantu pekerja/buruh pengepak ikan untuk dimasukkan dalam kotak-kotak ikan, kemudian setelah selesai proses pengepakan ikan, kotak-kotak ikan siap untuk dipasarkan oleh bakul ikan dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan untuk memperoleh jenis ikan olahan, biasanya bakul ikan langsung mendatangi tempat-tempat pengolah ikan di sekitar PPI Karangsong. Jumlah pekerja dalam mengolah ikan jumlahnya bervariasi, seperti pengolah ikan gesek (ikan kering) dan pengolah ikan jambal roti mampu menyerap tenaga kerja 5 sampai 15 pekerja, sedangkan pengolah sirip hiu dan tulang hiu mampu menyerap 15 sampai 20 pekerja, kemudian pengolah gelembung ikan (*hipio*) mampu menyerap tenaga kerja 5 sampai 10 pekerja.

4.3.4 Hubungan Keterkaitan Kegiatan Perikanan

Hubungan keterkaitan kegiatan perikanan, dilakukan secara deskriptif terhadap kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsang. Adapun batasan yang mengindikasikan hubungan keterkaitan tersebut berdasarkan hasil identifikasi pelaku usaha yang sudah di bahas pada kajian sebelumnya.

Dalam mengkaji hubungan keterkaitan dilakukan dengan memberikan bobot penilaian. Bobot yang digunakan yakni; 3 (kuat), 2 (sedang) dan (1) rendah.

Masing-masing penilaian ini mencerminkan hubungan keterkaitan, diantaranya;

- Bobot 3, artinya mempunyai hubungan keterkaitan (ke belakang dan ke depan) dan pengaruh yang kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perikanan tangkap.
- Bobot 2, artinya mempunyai hubungan keterkaitan (ke belakang dan ke depan) dan pengaruh yang sedang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perikanan tangkap.
- Bobot 1, artinya mempunyai hubungan keterkaitan (ke belakang dan ke depan) dan pengaruh yang rendah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perikanan tangkap.

Penilaian yang menjelaskan hubungan keterkaitan kegiatan perikanan dari kegiatan hulu dan hilir (penjelasannya terlampir) dapat di lihat pada Tabel IV.16 dan Gambar 4.13

TABEL IV.16
MATRIK KETERKAITAN KEGIATAN PERIKANAN

Uraian	Nelayan	Pembuat Perahu	Pemerintah	Koperasi	Perdagangan umum	Bakul ikan	Pengolah ikan	Pembeli perantara dan akhir	Jumlah Skor
--------	---------	----------------	------------	----------	------------------	------------	---------------	-----------------------------	-------------

GAMBAR 4.13
KETERKAITAN PELAKU USAHA KEGIATAN PERIKANAN

Dari hasil matrik tersebut diperoleh jumlah skor pada masing-masing pelaku usaha kegiatan perikanan yang seharusnya memiliki jumlah 21 point (100%). Hal ini mengindikasikan bahwa persentase terbesar dalam hubungan keterkaitan kegiatan perikanan pada kegiatan hulu adalah nelayan sebesar 95 % dan koperasi sebagai pengelola PPI Karangsong sebesar 66,67 %, sedangkan pada tahap yang berlangsung di kegiatan hilir adalah bakul ikan sebesar 80,95 % dan pengolah ikan sebesar 66,67 %.

Hubungan keterkaitan yang kuat pada pelaku usaha, mencerminkan bahwa sistem bisnis perikanan dalam menghasilkan produk ikan sangat terkait oleh keberadaan nelayan yang dapat memberikan dampak pengganda pada beberapa pelaku usaha lainnya. Dampak pengganda ini direpresentasikan dalam penciptaan pendapatan dan membuka lapangan kerja yang mempunyai keterkaitan dalam kegiatan perikanan pada tahap pra produksi (hulu) sampai dengan pasca produksi (hilir).

4.4 Implikasi Keruangan Kegiatan Perikanan

Menurut Daldjoeni (1997:190), hubungan atau interaksi keruangan sebagai kajian geografis yang digunakan untuk menentukan interdependensi antar wilayah yang didalamnya mencakup gerakan barang, orang, uang, gagasan dan sebagainya. Hubungan keruangan dalam sistem bisnis perikanan di PPI Karangsong merupakan hubungan atau interaksi ruang dalam proses pra produksi hingga pasca produksi dalam menciptakan pendapatan. Selanjutnya Daldjoeni (1997:190), menjelaskan bahwa dalam interaksi keruangan terdapat persyaratan diantaranya; pemenuhan untuk saling melengkapi (komplemen), kemudahan pengiriman dan pemenuhan kebutuhan.

Kegiatan perikanan yang terjadi di Kawasan PPI Karangsong saat ini telah menstimulir pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai nilai kegiatan perikanan yaitu tumbuhnya kewirausahaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang didasari oleh adanya pemanfaatan sumber daya pesisir kelautan (alam, manusia, kelembagaan dan modal), yang dapat menciptakan aktivitas pada pelaku usaha dalam keterkaitan kegiatan perikanan, sehingga dapat tercapai peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan perikanan juga memberikan pemasukan pendapatan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui retribusi pelelangan ikan yang dapat dimanfaatkan dalam memperluas program pembangunan daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Sistem bisnis kegiatan perikanan memberikan implikasi keruangan dalam usaha kegiatan penangkapan ikan yakni pada tahap kegiatan hulu (pra produksi dan produksi) tercermin dari adanya jenis usaha penyediaan fasilitas PPI, pembuatan sarana alat tangkap dan penyediaan kebutuhan logistik pelayaran serta penyerapan

tenaga kerja pada pelaku usaha yang terkait dalam kegiatan perikanan diantaranya pembuat perahu, nelayan (nelayan pemilik, nelayan buruh, buruh angkut dan pengelola pelelangan). Selanjutnya pada tahap kegiatan hilir (pasca produksi) tercermin oleh adanya industri pembuatan olahan ikan dan jaringan wilayah pemasaran yang dilakukan oleh bakul ikan dalam mendistribusikan hasil tangkapan ikan nelayan, baik untuk pemasaran lokal dan pemasaran luar Wilayah Indramayu.

Hubungan keruangan dalam kegiatan perikanan membentuk interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Interaksi fisik merupakan hubungan yang dihasilkan oleh adanya sarana PPI dan TPI Karangsong yang menciptakan infrastruktur berupa fasilitas pokok dan fasilitas fungsional serta jaringan transportasi dalam mendukung produksi dan pemasaran hasil produk ikan, selanjutnya interaksi ekonomi merupakan proses pendapatan yang ditimbulkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan (nilai pendapatan) dan permintaan (produk ikan) sehingga membentuk integrasi keruangan dari jaringan pemasaran dalam keterkaitan kegiatan per-ikanan, kemudian interaksi sosial merupakan dampak dari interaksi ekonomi terhadap pola hubungan yang diciptakan oleh pelaku usaha kegiatan perikanan.

4.4.1 Implikasi Keruangan pada Kegiatan Hulu

Implikasi keruangan pada kegiatan hulu merupakan cerminan dari interaksi ekonomi yang berlangsung pada kegiatan pra produksi dan produksi dalam usaha memperoleh nilai pendapatan (pemasukkan) pada pelaku usaha kegiatan per-ikanan, diantaranya pemerintah dan masyarakat nelayan. Pemerintah dalam usaha-nya untuk bersaing memperoleh nilai pendapatan tersebut dilakukan dengan membangun sarana PPI dan TPI Karangsong serta infrastruktur pendukung lain-nya, sehingga

nelayan memperoleh manfaat dan kemudahan dalam mendukung aktivitasnya. Dampak dibangunnya sarana PPI Karangsong tentunya dapat menjadi pemasukkan pendapatan bagi pemerintah daerah, hal ini yang semula nelayan menjual hasil tangkapannya di luar TPI Karangsong, namun setelah dibangunnya sarana dan fasilitas tersebut diharapkan perahu nelayan dapat dengan mudah untuk mendaratkan dan menjual hasil tangkapannya ke TPI Karangsong. Selain untuk memperoleh pendapatan dari hasil retribusi pelelangan ikan, pembangunan sarana PPI dan TPI Karangsong merupakan langkah strategis bagi program pembangunan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam pengembangan wilayah.

Kaitannya dengan implikasi keruangan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan perikanan yang berlangsung pada kegiatan hulu yakni pembangunan sarana PPI dan TPI Karangsong sebagai wujud dari kebijakan lokasi peruntukkan lahan dalam zona pengembangan PPI Karangsong dalam mendukung kegiatan masyarakat nelayan Karangsong, diantaranya pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas fungsional PPI Karangsong. Pembangunan fasilitas pokok meliputi; dermaga labuh, kolam labuh dan alur pelayaran sedangkan fasilitas fungsional meliputi; tempat pelelangan ikan, stasiun pengisian BBM nelayan, lahan parkir, kios logistik dan tempat sarana ibadah (masjid). Masing-masing fasilitas PPI Karangsong dapat dilihat pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15.



Sumber: Hasil Survei, 2006 dan 2007

GAMBAR 4.14
FASILITAS POKOK PPI KARANGSONG
(1) PEMBANGUNAN ALUR PELAYARAN (TAHUN 2006), (2) ALUR
PELAYARAN, (3) KOLAM PUTAR, (4) DERMAGA LABUH



Sumber: Hasil Survei. 2007

GAMBAR 4.15
FASILITAS FUNGSIONAL PPI KARANGSONG
(1) TEMPAT PELELANGAN IKAN, (2) TEMPAT PARKIR, (3) TEMPAT
SARANA IBADAH (MASJID), (4) TEMPAT PENGISIAN BBM NELAYAN

Keberadaan sarana PPI Karangsong berimplikasi pada terbentuknya penempatan zona-zona yang mempunyai fungsi pergerakan oleh fasilitas yang ada di PPI Karangsong. Selain adanya aktivitas PPI Karangsong, terdapat interaksi ekonomi berupa industri pembuatan kapal motor di sekitar PPI Karangsong. Industri pembuatan sarana alat tangkap ini menempati lahan di sepanjang pinggir jalan dan Sungai Prajagumiwang, seperti terlihat pada Gambar 4.16.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 4.16
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL MOTOR NELAYAN

Adanya aktivitas industri pembuatan sarana alat tangkap tersebut ber-implikasi pada penggunaan lahan (ruang) yang menempati ruang disepanjang pinggir jalan dan Sungai Prajagumiwang. Apabila di lihat dari keberadaanya, lokasi industri pembuatan kapal motor ini memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan atau pembuatannya, karena dalam proses awal pengiriman material (bahan baku kayu) yang diangkut oleh kendaraan langsung ditempatkan di pinggir jalan, selanjutnya bahan baku kayu tersebut dilakukan pengerjaan untuk di proses dalam pembuatan kapal motor, kemudian setelah selesai dari proses pembuatan-nya, perahu atau kapal motor yang sudah jadi langsung diturunkan di Sungai Prajagumiwang.

Implikasi selanjutnya merupakan interaksi sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perikanan sebagai dampak dari interaksi ekonomi oleh adanya pelaku usaha kegiatan perikanan berupa lahan permukiman nelayan yang tersebar di sekitar PPI Karangsong. Masyarakat nelayan Karangsong sebagian besar berasal dari Desa Karangsong, Kelurahan Paoman dan Desa Pabeanudik serta berasal dari desa sekitarnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Indramayu. Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, lahan permukiman nelayan Karangsong menempati lahan di sepanjang pinggir Sungai Prajagumiwang. Permukiman nelayan yang menempati pinggir Sungai Prajagumiwang pada umumnya mempunyai fungsi se-bagai tempat

tinggal juga sebagai tempat untuk menambatkan perahu dan pembuatan perahu, seperti terlihat pada Gambar 4.17.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 4.17
PERMUKIMAN NELAYAN DI SEKITAR PINGGIR
SUNGAI PRAJAGUMIWANG

Permukiman nelayan yang berada di sekitar lokasi PPI Karangsong juga terdapat perumahan nelayan yang di bangun pada pertengahan tahun 2003, dengan membangun sebanyak 240 unit tipe rumah sederhana. Pembangunan perumahan nelayan Karangsong dibangun atas kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, sebagai antisipasi adanya pembangunan fasilitas PPI Karangsong dan rencana relokasi masyarakat Kali Adem Jakarta Utara, yang sebagian besar merupakan warga pendatang yang berasal dari Wilayah Indramayu. Untuk mendapatkan perumahan nelayan tersebut, tidak hanya diperuntukkan bagi warga gususan Kali Adem saja, melainkan bagi masyarakat nelayan setempat yang belum memiliki tempat tinggal. Keberadaan perumahan nelayan Karangsong seperti pada Gambar 4.18.



Sumber: Hasil Survei, 2007

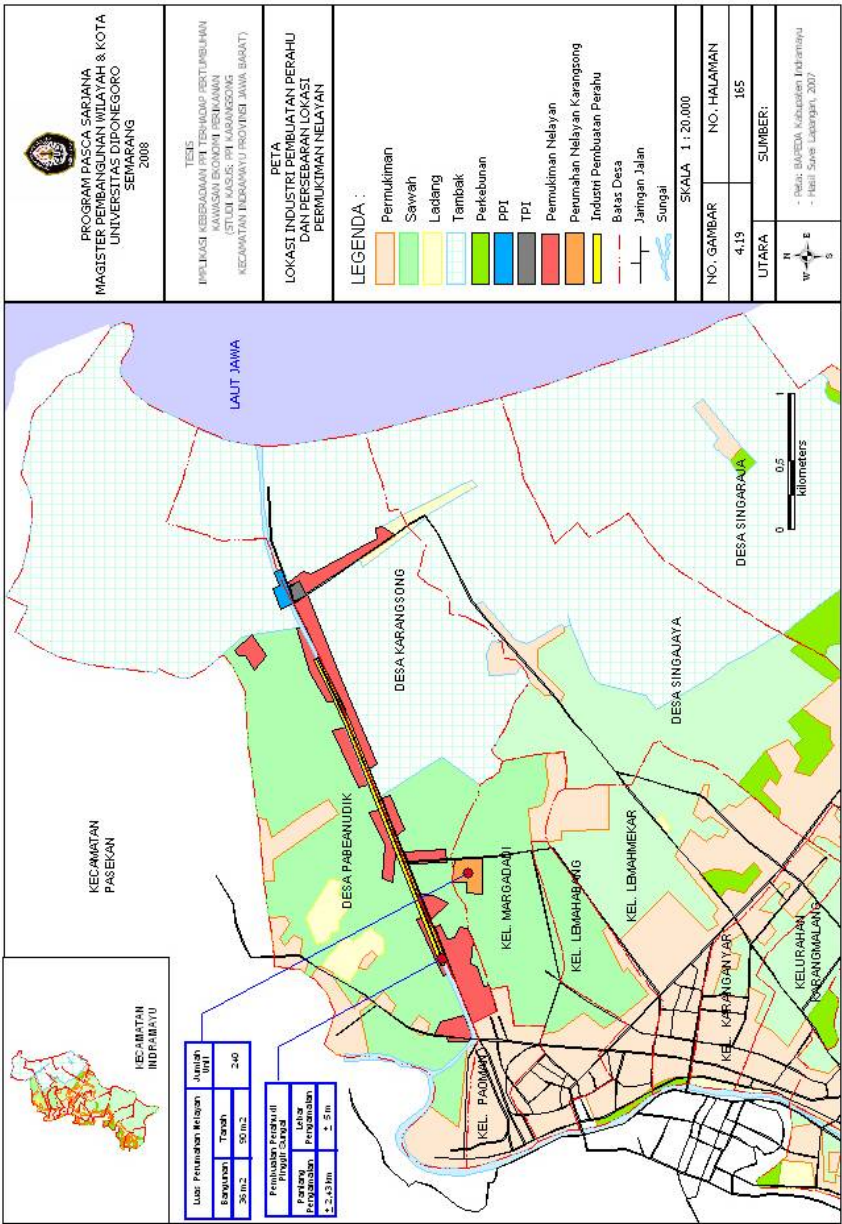
GAMBAR 4.18
PERUMAHAN NELAYAN KARANGSONG

Implikasi keruangan yang ditimbulkan oleh adanya permukiman nelayan berpengaruh pada ruang hunian atau tempat tinggal yang menyesuaikan dengan karakter sosial masyarakat nelayan, seperti hunian yang memiliki tempat untuk penjemuran ikan dan tempat pembuatan dan perbaikan perahu. Lokasi industri pembuatan kapal motor dan persebaran permukiman nelayan Karangsong dapat dilihat pada Gambar 4.19.

4.4.2 Implikasi Keruangan pada Kegiatan Hilir

Implikasi keruangan pada kegiatan hilir merupakan representasi dari aktivitas ekonomi yang berlangsung pada kegiatan pasca produksi dalam usaha memperoleh nilai pendapatan pada pelaku usaha kegiatan perikanan, diantaranya pengolah ikan dan bakul ikan.

Kaitannya dengan aktivitas industri pengolahan ikan, dampak yang ditimbulkan terhadap implikasi keruangan adalah adanya proses dalam pengolahan ikan yang memerlukan lahan untuk penjemuran dengan memanfaatkan sinar matahari. Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, industri olahan ikan yang berlangsung di sekitar PPI Karangsong, dalam proses penjemuran produk hasil olahannya, memanfaatkan lahan di sekitar halaman rumah dan sekitar pinggir jalan, seperti terlihat pada Gambar 4.20 dan untuk mengetahui lokasi persebaran industri pengolahan ikan sekitar PPI Karangsong dapat dilihat pada Gambar 4.21.





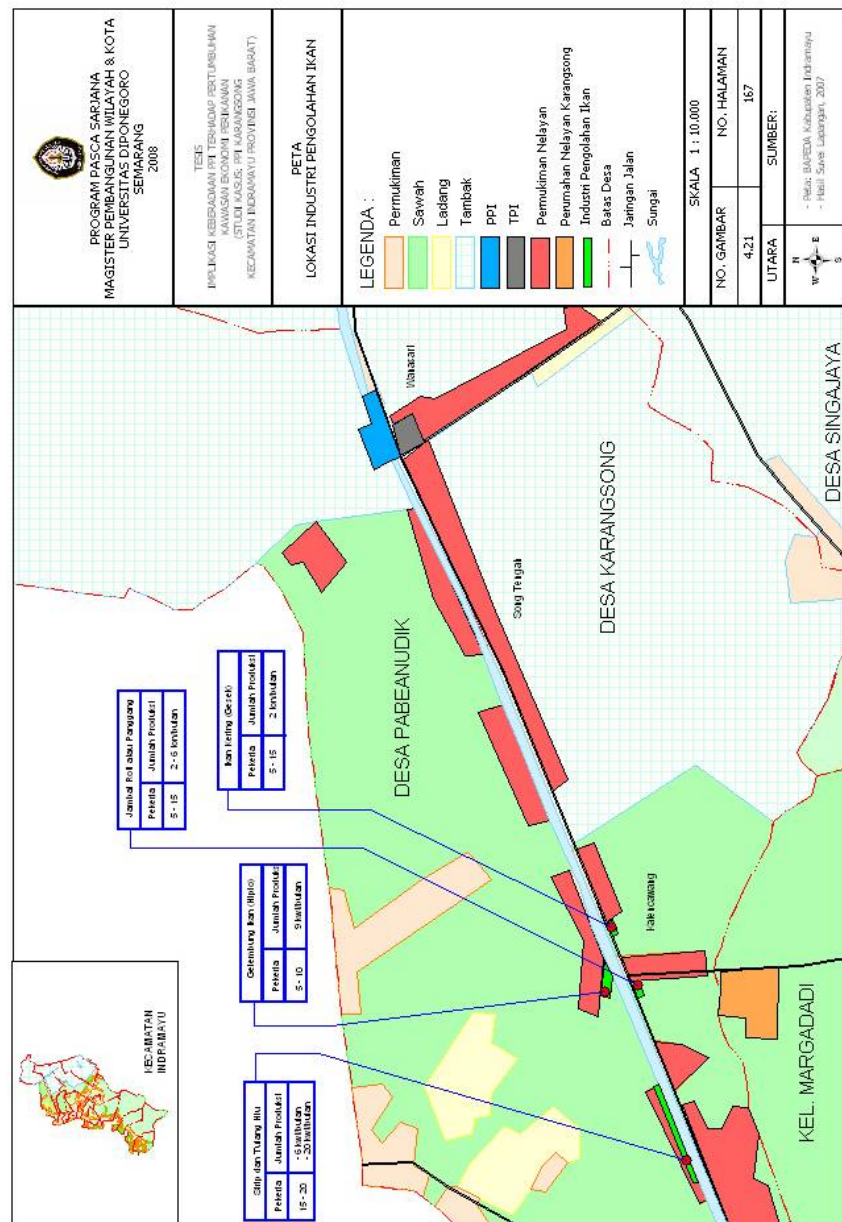
Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 4.20
TEMPAT PENJEMURAN PRODUK OLAHAN IKAN

Selanjutnya implikasi keruangan yang terjadi pada kegiatan pendistribusian ikan yang dilakukan oleh para bakul ikan merupakan cerminan dari interaksi ekonomi yang menghasilkan pergerakan (barang, orang dan uang) yang ditimbulkan dalam proses pemasaran ikan.

Bakul ikan yang memasarkan jenis ikan segar dan ikan hasil olahan untuk pemasaran lokal sekitar wilayah Indramayu sebesar 20 %. Apabila rata-rata produksi ikan sebesar 21,74 ton per hari, maka rata-rata per hari bakul ikan yang memasarkan ikan untuk kebutuhan lokal sekitar 4,35 ton. Jumlah persentase pemasaran tersebut (20 %) diperkirakan karena kondisi Wilayah Kabupaten Indramayu merupakan daerah pesisir pantai dan dari 11 kecamatan, wilayahnya berada di daerah pesisir yang memiliki beberapa sentra pendaratan ikan, baik skala besar maupun kecil, salah

satunya adalah PPI Karangsong yan berada di Kecamatan Indramayu. Wilayah pemasaran lokal meliputi Kecamatan Indramayu, Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Sindang.



Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menunjang kualitas pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan, pada Tahun 2004 telah membangun pasar ikan higienis di Kota Indramayu dan pada saat pemetaan lapangan, kondisi fisik bangunan pasar ikan tersebut baru selesai dibangun, untuk saat ini para pedagang ikan belum dapat memanfaatkan bangunan pasar tersebut karena masih dalam penyelesaian pembangunan terhadap beberapa fasilitas pendukungnya diantaranya pemasangan listrik dan air bersih, sehingga para pedagang ikan untuk sementara menempati los/kios yang menggunakan terpal plastik di depan pasar ikan higienis seperti terlihat pada Gambar 4.22.



Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 4.22
PASAR IKAN HIGIENIS INDRAMAYU

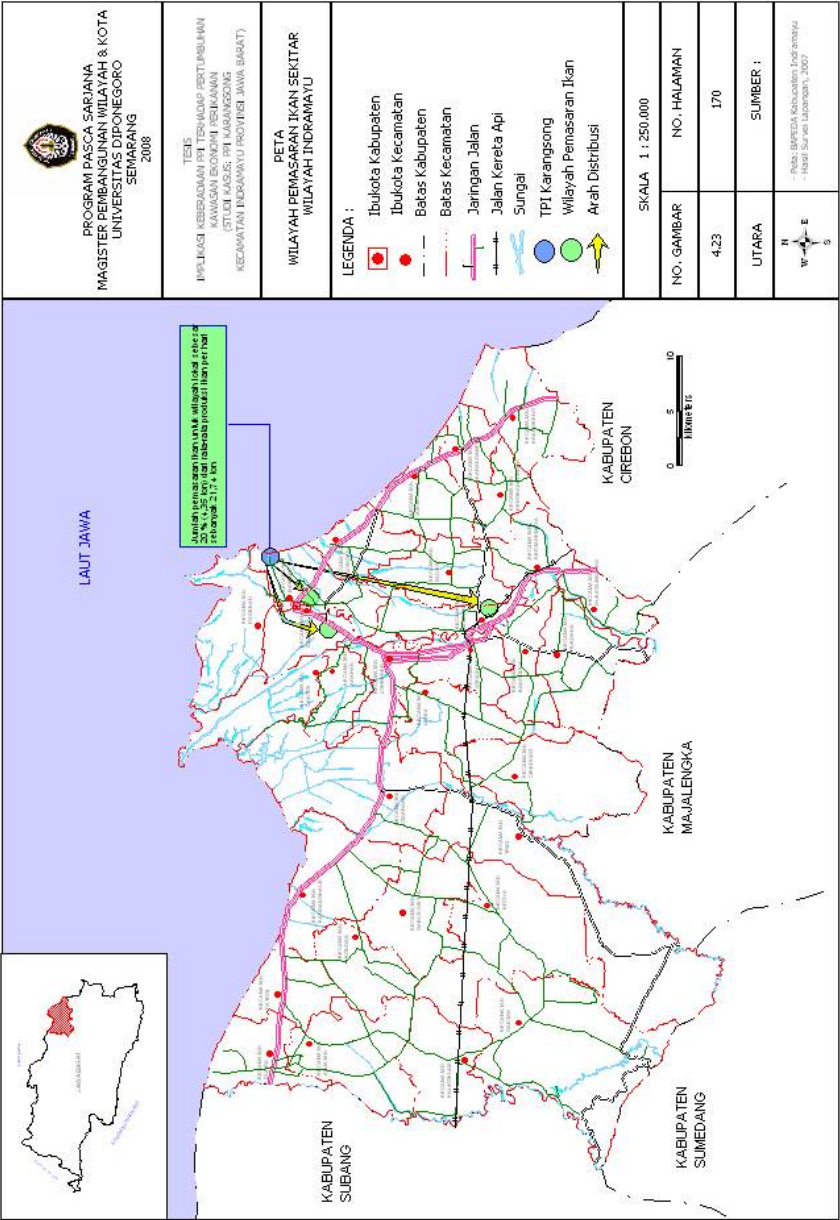
Pemasaran bakul ikan untuk luar Wilayah Indramayu sebesar 80 % merupakan jumlah yang paling besar bila dibandingkan dengan pemasaran untuk

wilayah lokal Indramayu. Rata-rata per hari ikan yang dipasarkan untuk luar Wilayah Indramayu dapat mencapai 17,39 ton yang didistribusikan untuk Wilayah Cirebon, Subang, Kuningan, Majalengka, Bandung dan Jakarta.

Apabila melihat jumlah pemasaran yang besar yang berlangsung di luar wilayah Indramayu dapat diindikasikan oleh beberapa faktor diantaranya pertama, adanya skala ekonomi yang tinggi jika di jual di luar wilayah penghasil ikan, mengingat keuntungan marjinal mencapai 14,41 % sedangkan penjualan di dalam wilayah penghasil keuntungan marjinal sekitar 11,23 %, kedua adanya tingkat kepadatan penduduk dan pendapatan perkapita seperti Bandung dan Jakarta yang menyebabkan tingginya permintaan akan kebutuhan ikan, ketiga adanya kemudahan dalam hal pendistribusian ikan oleh tersedianya jaringan transportasi sehingga memudahkan pemasaran ikan yang dilakukan oleh bakul ikan.

Bila di lihat dari karakteristik yang berlangsung dalam hal pendistribusian ikan, saat ini membentuk interaksi pola keruangan, diantaranya; Pertama, adanya karakteristik antar wilayah yang saling melengkapi sehingga melahirkan permintaan dan penawaran. Kedua, adanya kemudahan dalam hal pengiriman ikan sehingga memudahkan interaksi antar wilayah, mengingat lokasional PPI Karangsong yang strategis berada di jalur wilayah yang mudah berhubungan dengan wilayah lain. Ketiga, tidak adanya pilihan atau alternatif lain dalam hal pemenuhan kebutuhan sehingga perlu berinteraksi dengan wilayah lain.

Untuk mengetahui jaringan distribusi pemasaran ikan untuk wilayah lokal (wilayah pemasaran ikan sekitar Wilayah Indramayu) dan pemasaran di luar Wilayah Indramayu dapat di lihat pada Gambar 4.23 dan Gambar 4.24.



4.5 Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, disusun suatu sintesis berupa rangkuman hasil penelitian yang akan ditunjukkan dalam Tabel IV.17 berikut ini.

TABEL IV.17
RANGKUMAN HASIL PENELITIAN

Aspek Kajian	Hasil Analisis
Kondisi fasilitas PPI Karangsong.	Secara umum kondisi fasilitas PPI Karangsong berupa fasilitas pokok dan fasilitas fungsional sudah memadai dan sudah digunakan oleh para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya, juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan penanganan secara khusus yakni adanya pengendapan lumpur pada alur pelayaran dan kondisi sekarang memang secara berkala sudah dilakukan pengerukkan oleh pihak pengelola PPI. Selain itu, kondisi jalan lingkungan yang menghubungkan sekitar pelabuhan, saat ini rusak dan berlubang serta kondisi jalan tanah berbatu.
Pelaku usaha dan jenis kegiatan usaha perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaku yang terkait dalam kegiatan usaha perikanan diantaranya; nelayan, pembuat perahu/kapal motor, bakul ikan, Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra sebagai pengelola PPI Karangsong, perdagangan umum sebagai penyedia keperluan perlengkapan nelayan, pengloh ikan yang mengolah produk olahan ikan, pembeli perantara yang menjual kepada pembeli akhir dan pembeli akhir digunakan untuk kebutuhan konsumsi ikan serta pemerintah sebagai penyedia sarana fasilitas PPI Karangsong dan pembinaan terhadap koperasi dan nelayan, ▪ Jenis usaha yang muncul berkaitan dengan kegiatan perikanan di lokasi sekitar Kawasan PPI Karangsong meliputi tahapan pra produksi hingga pasca produksi, diantaranya; industri pembuatan dan perbaikan (bengkel) kapal motor atau perahu, usaha penyediaan logistik pelayaran, penjualan hasil tangkapan dan industri olahan ikan.
Analisis keterkaitan rantai nilai kegiatan perikanan.	<p>Kegiatan perikanan telah menciptakan nilai pada beberapa pelaku usaha dalam setiap tahapannya, diantaranya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahapan pra produksi merupakan nilai yang dikeluarkan nelayan dalam melakukan persiapan-persiapan penangkapan ikan dan menjadikan nilai pendapatan bagi penyedia keperluan kebutuhan pelayaran. ▪ Tahapan produksi merupakan nilai pendapatan yang diperoleh pengelola sebesar 5 % dari hasil retribusi pelelangan ikan, yakni koperasi dan pemerintah serta nilai pendapatan nelayan. Berdasarkan hasil studi pendekatan

	<p>terhadap nilai pendapatan nelayan, ditentukan oleh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil nilai tangkapan ikan yang dipengaruhi oleh kondisi musim tangkap ikan dan musim '<i>baratan</i>'. - Sarana alat tangkap dan permodalan untuk melakukan penangkapan ikan (kebutuhan logistik).
--	---

Lanjutan Tabel IV.16

Aspek Kajian	Hasil Analisis
	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem bagi hasil yang berlangsung pada nelayan Karangsong pada umumnya dilakukan dengan mekanisme pembagian pendapatan antara pemilik modal/perahu (juragan) sebesar 60% dan dengan nelayan pencari ikan/nelayan penggrap sebesar 40%. ▪ Tahapan pasca produksi merupakan nilai pendapatan yang diperoleh bakul ikan dan pengolah ikan. Keuntungan marginal yang diperoleh bakul ikan dalam memasarkan ikan ke wilayah lokal sebesar 11, 23%, sedangkan penjualan ke luar Wilayah Indramayu memperoleh keuntungan marginal sebesar 14,41 %.
Keterkaitan dan dampak pengganda kegiatan usaha perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha bisnis perikanan mempunyai rantai hubungan keterkaitan ke belakang dan ke depan antara pelaku usaha kegiatan perikanan tangkap. Keterkaitan yang mendominasi pada kegiatan hulu adalah nelayan (95%) sedangkan pada kegiatan hilir adalah bakul ikan (80,95 %) dan pengolah ikan (66,67%). ▪ Dampak pengganda yang ditimbulkan yaitu tumbuhnya kewirausahaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan serta lapangan usaha yang terkait dalam usaha kegiatan perikanan.
Implikasi keruangan kegiatan perikanan tangkap.	<p>Hubungan keruangan dalam sistem bisnis perikanan di PPI Karangsong telah menciptakan pelaku usaha dalam rantai nilai kegiatan perikanan yang membentuk hubungan interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Interaksi fisik merupakan hubungan yang dihasilkan oleh adanya sarana PPI dan TPI Karangsong yang menciptakan jaringan infrastruktur dan transportasi untuk menunjang produksi dan pemasaran produk ikan, selanjutnya interaksi ekonomi merupakan proses pendapatan yang ditimbulkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan (pendapatan) dan permintaan (produk ikan) sehingga membentuk integrasi keruangan dari jaringan pemasaran dalam keterkaitan rantai nilai kegiatan perikanan tangkap, kemudian interaksi sosial merupakan dampak dari interaksi ekonomi terhadap pola hubungan yang diciptakan oleh pelaku usaha kegiatan perikanan.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari hasil Tabel IV.17 yang menyusun rangkuman hasil penelitian, selanjutnya akan disusun temuan penelitian berdasarkan studi pendekatan antara kondisi empiris

dan teoritis. Temuan hasil penelitian tersebut akan diuraikan pada sub bab pembahasan di bawah ini.

4.5.1 PPI Karangsong Sebagai Fungsi Ekonomi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Kebijakan Pengembangan Kawasan PPI Karangsong sebagai sistem dalam sentra kegiatan perikanan mempunyai peranan fungsi ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten Indramayu. Fungsi ekonomi menurut Rais et.al (2004:44), merupakan kebijakan secara makro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi berdasarkan karakter yang dimiliki setiap kelompok perairan yang dapat diperkirakan sebagai arahan komoditi unggulan, kebutuhan infrastruktur, arahan kelembagaan, arahan jaringan pemasaran produk ataupun perkiraan tingkat kerawanan bencana.

Kegiatan perikanan sebagai sektor unggulan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Djojohadikusumo (1994:3) pertumbuhan yang menyangkut perkembangan dapat di ukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan yang diakibatkan oleh proses produksi dengan menggunakan sejumlah sarana produksi. Selanjutnya Adisasmita (2005:127) menjelaskan sektor unggulan yang dimaksud adalah; (1) sektor yang menghasilkan produksi yang mempunyai kontribusi besar terhadap nilai produksi bruto (PDRB); (2) sektor yang memberikan lapangan kerja yang besar, dengan demikian akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat; (3) sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*); (4) sektor yang berpotensi meningkatkan ekspor

non-migas; (5) sektor yang pada saat sekarang meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil, tetapi sektor tersebut memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan pada masa mendatang.

Pengembangan Kawasan PPI Karangsong sebagai kegiatan perikanan, saat ini menekankan pada potensi-potensi yang ada untuk mencapai sektor unggulan sebagai upaya pembangunan ekonomi lokal. Seperti yang dikemukakan oleh Blakely dalam Nurzaman (2002:7), konsep pembangunan ekonomi lokal ditekan-kkan pada penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal dengan memanfaatkan sumberdaya (alam, manusia, modal) setempat yang merupakan upaya bersama antara masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta untuk mencapai keunggulan kompetitif dari wilayah lokal tersebut. Hal tersebut merupakan implikasi dalam kegiatan perikanan tangkap yakni tumbuhnya jenis lapangan usaha dan membuka lapangan kerja serta pendapatan bagi pelaku usaha kegiatan perikanan tangkap.

Implikasi sektor unggulan dalam usaha kegiatan perikanan lainnya adalah memberikan kontribusi pada pembentukan nilai PDRB Kecamatan Indramayu yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, khususnya pada sub sektor per-ikanan.

4.5.2. Rantai Nilai dan Dampak Pengganda Kegiatan Perikanan

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004:66) tingkat keterkaitan suatu sektor diidentifikasi berdasarkan arah penggunaan hasil dan masukkan sebagai kaitan ke depan dan ke belakang. Sementara dampak pengganda merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah lain di luar batas masyarakat ekonomi regional yang akan berdampak pada kesempatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan perikanan merupakan wujud aktivitas perekonomian yang membentuk suatu sistem bisnis perikanan yang dalam aktivitasnya mempunyai keterkaitan rantai nilai, ke belakang dan ke depan yang saling mendukung dalam usaha kegiatan perikanan tangkap. Meningkatnya jumlah produksi yang didaratkan di PPI Karangsong merupakan usaha meraih keunggulan bersaing dalam nilai pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dan pengelola PPI (KPL Mina Sumitra). Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan tersebut dilakukan dengan cara membangun dan mengelola fasilitas PPI Karangsong sebagai upaya menjaga persaingan nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di luar PPI Karangsong.

Menurut Tallec dan Bockel, (2005:2) Rantai nilai menggambarkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu usaha dan menghubungkannya dengan analisis kemampuan bersaing usaha tersebut. Analisis rantai nilai adalah suatu cara dalam mengidentifikasi aktivitas dalam suatu usaha yang secara langsung berhubungan dengan upaya untuk meraih keunggulan bersaing. Selanjutnya menurut Kaplinsky dan Morris (2000:9), menjelaskan analisis rantai nilai memiliki peranan penting dalam memahami kebutuhan dan lingkup persaingan yang sistematis. Hal lain yang membuat analisis rantai nilai menjadi penting adalah rantai nilai membantu dalam memahami keunggulan dan kelemahan sebuah perusahaan atau negara atau wilayah.

Permasalahan dalam rantai nilai kegiatan perikanan adalah adanya persaingan dalam hal sistem bagi hasil yang berlangsung pada nelayan Karangsong hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan permodalan bagi sebagian nelayan Karangsong sehingga menjalin kerjasama antara nelayan dengan pemilik modal

(juragan) yang berdampak pada nilai pendapatan, dimana dalam memperoleh hasil nilai pendapatan nelayan dari sistem bagi hasil cenderung lebih besar yang diperoleh nelayan pemilik (juragan) dan cenderung merugikan bagi nelayan pencari ikan. Hal ini perlu membutuhkan perhatian dan dukungan khusus bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam rangka untuk memberikan solusi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan Karangsong khususnya nelayan pencari ikan (nelayan buruh), sehingga tingkat kesejahteraan hidup nelayan pencari ikan dapat tercapai.

4.5.3. Kegiatan Perikanan Sebagai Pembentuk Struktur Ruang Kawasan PPI Karangsong

Sistem aktivitas perikanan merupakan unsur penyediaan lahan (ruang) dalam kawasan industri perikanan, diantaranya ruang fasilitas pokok dan fungsional serta infrastruktur yang mendukung aktivitas PPI Karangsong sebagai sentra kegiatan perikanan yang saat ini telah didukung oleh pengembangan infrastruktur berupa fasilitas di darat dan di laut.

Menurut Daldjoeni (1997:190), hubungan atau interaksi keruangan sebagai kajian geografis yang digunakan untuk menentukan interdependensi antar wilayah yang didalamnya mencakup gerakan barang, orang, uang, gagasan dan sebagai-nya. Hal ini berimplikasi pada interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Interaksi fisik merupakan hubungan yang dihasilkan oleh adanya sarana PPI dan TPI Karansong yang menciptakan jaringan transportasi untuk menunjang pemasaran produk ikan, selanjutnya interaksi ekonomi merupakan adanya pemenuhan kebutuhan dan permintaan sehingga membentuk integrasi keruangan dari jaringan pemasaran,

kemudian interaksi sosial merupakan dampak dari interaksi ekonomi terhadap pola hubungan yang diciptakan oleh pelaku usaha kegiatan perikanan tangkap.

Pengembangan struktur ruang Kawasan PPI Karangsong sebagai antisipasi dalam tumbuhnya kegiatan perikanan, yakni dengan menyiapkan fungsi zona-zona dalam mendukung kegiatan perikanan pada Kawasan PPI Karangsong. Berdasarkan kondisi eksisting saat ini, Kawasan PPI Karangsong telah memiliki fasilitas pokok berupa tempat labuh, dermaga labuh, kolam labuh dan alur pelayaran. Kemudian fasilitas fungsional diantaranya; tempat pelelangan ikan (TPI), stasiun pengisian solar, lahan parkir, masjid dan kios perdagangan logistik pelayaran.

4.5.4. Kegiatan Perikanan Sebagai Pembentuk Arahkan Kelembagaan

Pembangunan sarana PPI dan TPI Karangsong oleh Pemerintah diperuntukkan untuk kemudahan para nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapan ikan dan memasarkan hasil lautnya. Sebagai wujud penyelenggaraan PPI dan TPI Karangsong sebagai sarana aktivitas perikanan tangkap, saat ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Kelembagaan pengelolaan yang mengelola PPI Karangsong melalui kerjasama Pemerintah (pusat dan daerah) melalui kemitraan dengan pihak Koperasi Mina Sumitra yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

4.5.5. Kegiatan Perikanan Sebagai Pembentuk Jaringan Pemasaran

Hubungan keruangan dalam bisnis perikanan terkait dalam aktivitas hulu sebagai kegiatan penangkapan ikan di laut, sedangkan aktivitas hilir merupakan kegiatan pemasaran hasil tangkapan ikan.

Terkait jaringan pemasaran, sebagian besar (80 %) hasil produk ikan dari PPI Karangsong dipasarkan ke luar Wilayah Indramayu, yakni tujuan Jakarta, Bandung, Cirebon, Majalengka dan Kuningan. Hal ini disebabkan adanya permintaan yang besar terhadap produk hasil ikan laut yang ditunjang oleh adanya kemudahan jaringan transportasi yang menghubungkan kota-kota tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Blair (1995:73) bahwa besarnya wilayah pasar ditentukan oleh tiga faktor sebagai berikut: (a) Skala ekonomi, barang dan jasa yang mempunyai skala ekonomi yang tinggi biasanya mempunyai *market area* yang cukup besar; (b) *demand density* (tingkat kepadatan penduduk dan pendapatan perkapita).

4.5.6. Keberadaan PPI Karangsong Menstimulir Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Perikanan dalam Sistem Bisnis Perikanan

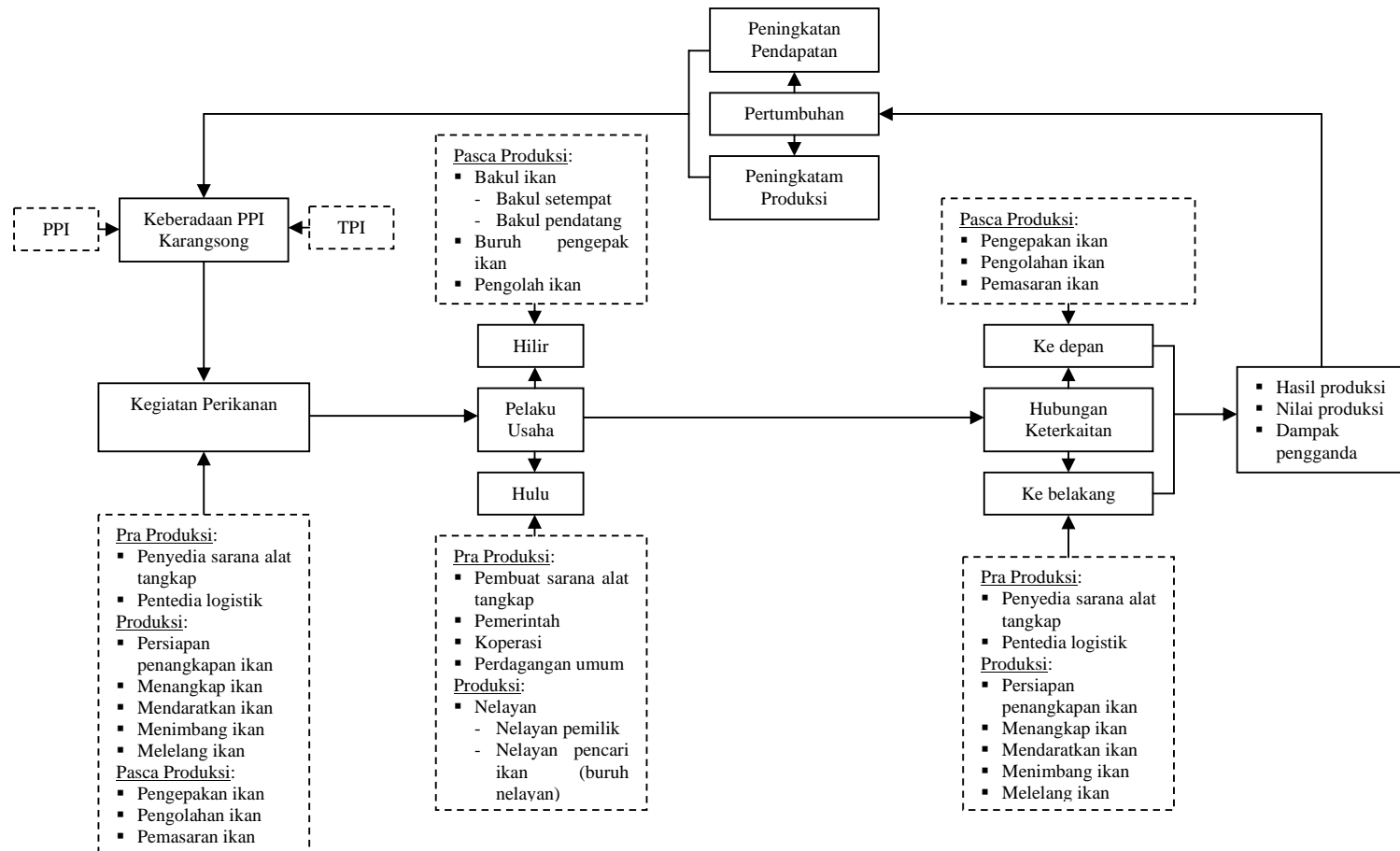
Berdasarkan beberapa hasil kajian dan temuan dalam penelitian ini, bahwa keberadaan PPI Karangsong saat ini telah menstimulir kegiatan perikanan yang mempunyai rantai nilai mulai dari pra produksi hingga sampai pasca produksi yang saling terkait antara pelaku usaha dalam sistem bisnis perikanan yang menciptakan beberapa sub sistem yakni sebagai sub sektor agribisnis kegiatan hulu (nelayan, penyedia sarana alat tangkap, penyedia logistik dan pemerintah serta pengelola pelelangan) dan kegiatan hilir berupa adanya diversifikasi kegiatan dalam pengolahan ikan dan adanya jaringan pemasaran produk ikan.

Menurut Djojohadikusumo (1993:3), proses pertumbuhan ekonomi ber-kaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang menyangkut per-kembangan yang berdimensi tunggal dapat diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Hubungan sarana produksi ini salah satunya ditunjukkan oleh adanya sarana PPI dan TPI Karangsong sebagai aktivitas dalam sistem bisnis perikanan. Sarana PPI Karangsong menciptakan dampak pengganda pada pelaku usaha kegiatan perikanan. Terkait adanya pelaku usaha tersebut terlibat dalam proses yang berlangsung pada tahap pra produksi hingga pasca produksi.

Keterkaitan rantai nilai yang diciptakan dari serangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan produk yakni ikan. Adanya produk ikan didasari oleh adanya pemenuhan nilai (pendapatan) dan kebutuhan permintaan (konsumsi) bagi masyarakat. Kesenambungan keterkaitan rantai nilai menciptakan pendapatan pada masing-masing pelaku usaha kegiatan perikanan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut memberikan dampak pertumbuhan yang berlangsung pada Kawasan PPI Karangsong.

Secara skematis keberadaan PPI Karangsong sebagai sarana kegiatan perikanan yang menstimulir pertumbuhan kawasan ekonomi dalam sistem bisnis perikanan dapat di lihat pada Gambar 4.25 dan dari skema tersebut akan dijelaskan

masing-masing perolehan nilai dalam sistem bisnis perikanan yang tersaji dalam Tabel IV.18.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 4.25
KEBERADAAN PPI KARANGSONG MENSTIMULIR PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI PERIKANAN
DALAM SISTEM BISNIS PERIKANAN

TABEL IV.18
PEROLEHAN NILAI PADA PELAKU USAHA KEGIATAN PERIKANAN

No.	Pelaku Kegiatan Perikanan	Perolehan Nilai (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1.	Nelayan ▪ Armada Kapal Motor 1-2 GT - Tertinggi - Terendah	2.114.462 1.794.550	1-2 hari	Nilai pendapatan nelayan diperoleh dari pendapatan nilai hasil tangkapan dikurangi modal yang diklasifikasi menurut penggunaan sarana armada kapal motor.
	▪ Armada Kapal Motor 5-15 GT - Tertinggi - Terendah	12.183.500 9.572.500	15-30 hari	
	▪ Armada Kapal Motor > 15 GT - Tertinggi - Terendah	33.108.076 28.065.001	30 hari	
	Dana-dana nelayan hasil retribusi (0,8 %)	661.516.628	Per tahun	Perolehan pendapatan nelayan terdapat dana-dana nelayan yang merupakan hasil retribusi pelelangan ikan yang mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2005.
2.	Pembuat Perahu - Pekerja utama (tukang 1) - Pekerja pendukung (tukang 2)	50.000 40.000	Per hari	Waktu pengerjaan pembuatan perahu disesuaikan berdasarkan jenis/ukuran perahu, jangka waktu untuk pengerjaan perahu kecil 1-2 bulan dan perahu besar 2-5 bulan.
3.	Pemerintah - Pemprov Jawa Barat (0,6 %) - Pemkab Indramayu (1 %)	496.137.471 826.895.785	Per tahun	Pemerintah sebagai penyedia sarana PPI memperoleh pendapatan dari hasil retribusi pelelangan ikan yang mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2005.
4.	KPL Mina Sumitra ▪ Unit bisnis pelelangan ikan - Operasional TPI (0,8 %) - Penyelenggaraan TPI (1,65 %)	661.516.628 1.364.378.045	Per tahun	Koperasi sebagai pengelola PPI Karangsong memperoleh pendapatan dari hasil retribusi pelelangan ikan yang mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2005.
	▪ Unit bisnis penyedia logistik pelayaran Penyediaan es untuk: ↳ Kapal motor 1-2 GT - Tertinggi - Terendah	85.200 60.200	Per hari	Melalui unit bisnis penyedia logistik pelayaran, koperasi menyediakan logistik berupa kebutuhan es dan solar untuk nelayan.
	↳ Kapal motor 5-15 GT - Tertinggi - Terendah	1.335.000 1.050.000	Per hari	
	↳ Kapal motor > 15 GT - Tertinggi - Terendah	6.623.077 5.321.538	Per hari	
	Penyediaan solar untuk: ↳ Kapal motor 1-2 GT - Tertinggi - Terendah	610.063 263.050	Per hari	
	↳ Kapal motor 5-15 GT - Tertinggi - Terendah	4.192.500 2.580.000	Per hari	
	↳ Kapal motor > 15 GT - Tertinggi - Terendah	12.817.308 7.111.538	Per hari	

Lanjutan Tabel IV. 18

No.	Pelaku Kegiatan Perikanan	Perolehan Nilai (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
5.	Pedagang umum ▪ Penyedia logistik bahan perbekalan untuk kapal motor 1-2 GT - Tertinggi - Terendah	266.250 164.375	Per hari	Kebutuhan bahan logistik (makanan) selama pelayaran, nelayan memperoleh dari pedagang yang berada di sekitar maupun di luar PPI Karangsong, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi logistik merupakan perolehan nilai bagi pedagang.
	▪ Penyedia logistik bahan perbekalan untuk kapal motor 5-15 GT - Tertinggi - Terendah	982.500 762.500	Per hari	
	▪ Penyedia logistik bahan perbekalan untuk kapal motor >15 GT - Tertinggi - Terendah	2.988.462 924.615	Per hari	
6.	Bakul ikan ▪ Keuntungan marjinal untuk pemasaran lokal (11,23 %)	303.000	Per kwintal per hari	Perolehan nilai pada bakul ikan diperoleh dari selisih hasil, pendapatan dikurangi modal dari penjualan jenis ikan tongkol ke pedagang pengecer.
	▪ Keuntungan marjinal untuk pemasaran luar (14,41 %)	403.000		
7.	Pengolah ikan ▪ Ikan asin (gesek)	50.000.000	Per ton per bulan	Nilai produksi yang dihasilkan industri pengolahan ikan merupakan pemasukan nilai bagi pengolah ikan.
	▪ Ikan jambal roti	60.000.000 – 180.000.000	Per ton per bulan	
	▪ Sirip hiu dan kulit hiu	480.000.000	Per kwintal per bulan	
	▪ Tulang hiu	100.000.000	Per kwintal per bulan	
	▪ Gelembung (hipio)	540.000.000	Per kwintal per bulan	
8.	Pedagang pengecer ▪ Keuntungan marjinal untuk pengecer pemasaran lokal (9,27 %)	280.000	Per kwintal per hari	Perolehan nilai pada pedagang pengecer diperoleh dari selisih hasil pendapatan dikurangi modal, dari penjualan jenis ikan tongkol ke konsumen.
	▪ Keuntungan marjinal untuk pengecer pemasaran luar (8,69 %)	280.000		

Sumber: Hasil Analisis, 2008

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Keberadaan PPI Karangsong saat ini menstimulir pertumbuhan kawasan sekitarnya yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan perikanan sebagai aktivitas dalam sistem bisnis perikanan. Rangkaian keterkaitan kegiatan perikanan mempunyai keterkaitan (ke belakang dan ke depan) yang berlangsung pada kegiatan hulu maupun hilir yang menimbulkan dampak pengganda berupa penyerapan tenaga kerja dan perolehan nilai pendapatan.

Hubungan keruangan dalam kegiatan perikanan membentuk interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Interaksi fisik merupakan hubungan yang dihasilkan oleh adanya sarana PPI dan TPI Karangsong yang menciptakan infrastruktur berupa fasilitas pokok dan fasilitas fungsional serta jaringan transportasi dalam mendukung produksi dan pemasaran hasil produk ikan, selanjutnya interaksi ekonomi merupakan proses pendapatan yang ditimbulkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan (nilai pendapatan) dan permintaan (produk ikan) sehingga membentuk integrasi keruangan dari jaringan pemasaran dalam keterkaitan kegiatan perikanan, kemudian interaksi sosial merupakan dampak dari interaksi ekonomi terhadap pola hubungan yang diciptakan oleh pelaku usaha kegiatan perikanan. Adanya implikasi terhadap keruangan, mengindikasikan pertumbuhan kawasan ekonomi dalam kegiatan sistem bisnis perikanan yang berlangsung akibat adanya PPI Karangsong.

Keterkaitan rantai nilai kegiatan perikanan berimplikasi pada tumbuhnya kewirausahaan yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (lokal) yang didasari oleh adanya pemanfaatan sumber daya pesisir kelautan (alam, manusia, kelembagaan dan permodalan) sebagai nelayan, pengolah ikan, pembuat perahu dan pedagang ikan (bakul ikan).

Perkembangan nilai produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPI Karangsong menunjukkan peningkatan nilai produksi. Manfaat nilai yang di-peroleh pemerintah dalam bisnis perikanan merupakan nilai pendapatan hasil retribusi pelelangan ikan sebesar 1,6 %, sedangkan bagi pihak pengelola pelelang-an ikan (KPL Mina Sumitra) yang mengelola unit bisnis pelelangan ikan, mem-peroleh nilai pendapatan dari kegiatan operasional TPI Karangsong (0,80 %) dan penyelenggaraan TPI Karangsong (1,65 %). Kegiatan perikanan memberikan perolehan nilai bagi bakul ikan dan pedagang pengecer dalam memasarkan produk ikan, yang diperoleh dari keuntungan marjinal dalam rantai nilai kegiatan perikanan. Perolehan nilai bagi bakul ikan yang memasarkan jenis ikan tongkol untuk luar Wilayah Indramayu sebesar 14,41 %, sedangkan untuk pemasaran dalam Wilayah Indramayu sebesar 11,23 %.

Namun permasalahan yang terjadi pada perolehan nilai pendapatan nelayan menunjukkan kelemahan oleh adanya persaingan dalam hal sistem bagi hasil pendapatan nelayan Karangsong. Penyebab kelemahan dalam memperoleh nilai pendapatan nelayan disebabkan adanya keterbatasan permodalan dalam memiliki sarana alat tangkap maupun permodalan dalam melakukan pelayaran, sehingga sebagian nelayan (nelayan pencari ikan/nelayan buruh) menjalin hubungan kerja-

sama dengan pemilik modal (juragan). Adanya hubungan kerjasama antara nelayan pencari ikan dengan pemilik modal memang dirasakan positif, tetapi dalam pembagian hasil pendapatan cenderung merugikan bagi nelayan pencari ikan atau buruh nelayan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan dalam mendorong usaha kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsong perlu menjadi perhatian dan dukungan semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun pihak institusi/lembaga lainnya, mengingat usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan memberikan keterkaitan yang kuat dan memberikan dampak secara langsung dan signifikan dalam menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat sekitar (lokal) dan pemasukan bagi pendapatan daerah. Dukungan dan perhatian ini sebagai langkah atau upaya dalam mengeleminir permasalahan persaingan nilai pendapatan yang berlangsung pada nelayan Karangsong, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan pada umumnya.

Untuk mendorong usaha kegiatan perikanan di Kawasan PPI Karangsong, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi fasilitas PPI Karangsong yang sebagian besar sudah memadai, baik fasilitas utama dan fasilitas pendukung untuk dikembangkan dalam bisnis perikanan di Kawasan PPI Karangsong, serta memelihara berbagai infrastruktur sehingga dapat meraih peluang atas hasil potensi sumber daya kelautan berupa pasokan ikan, mengingat bisnis perikanan memiliki wilayah pasar yang besar.

2. Memanfaatkan kondisi operasional yang sudah ada berupa sarana alat tangkap dan perlengkapan alat tangkap lainnya serta selalu menjaga kekuatan armada penangkap ikan dan perlengkapan alat tangkapan lainnya.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan (Bank) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja KPL Mina Sumitra sebagai pengelola PPI Karangsong sehingga dapat meningkatkan mutu layanan kepada para nelayan. Selain itu, kerjasama dengan perbankan akan dapat mengatasi rendahnya kemampuan permodalan para nelayan yang menjadi kelemahan utama.
4. Mendorong pertumbuhan usaha yang terkait dalam aktivitas yang mendukung kegiatan perikanan seperti usaha perbengkelan, perdagangan perbekalan dan usaha pengolahan ikan.
5. Meningkatkan mutu penanganan ikan untuk memberikan kualitas ikan yang lebih baik
6. Melakukan hubungan kerjasama antara pihak perbankan dengan koperasi (*linkage program*) untuk memberikan permodalan bagi pelaku usaha kegiatan perikanan (nelayan, bakul ikan dan pengolah ikan), hal ini didasari oleh adanya jaminan usaha dari hasil produksi dan kualitas pemasaran yang sangat memadai. Hal ini diharapkan dapat merubah variasi pembagian pendapatan, terkait dalam sistem bagi hasil nelayan Karangsong yang terjadi antara nelayan dan juragan.
7. Melakukan pemeliharaan intensif pada kawasan pesisir pantai Karangsong dan aliran Sungai Prajagumiwang dengan selalu mewaspadaai sedimentasi maupun abrasi serta menjaga sanitasi lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

8. Menjaga tingkat stabilitas harga di TPI Karangsong untuk dapat mengatasi ancaman persaingan dari PPI lain di luar Indramayu dan menghindarkan terjadinya transaksi di lautan.
9. Mengembangkan jasa peminjaman atau penyewaan alat tangkap (armada dan perlengkapan alat tangkap lainnya) yang dikelola pihak koperasi, sehingga diharapkan dapat merubah variasi sistem bagi hasil yang terjadi antara nelayan dan juragan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pendapatan nelayan pencari ikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alkadri, et al (ed.). 1999. *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*. Jakarta: BPPT Press.
- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Blair, John P. 1995. *Local Economic Development – Analysis and Practice*. California: Sage Publications.
- Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development – Theory and Practice*. California: Sage Publications.
- Bingham, Richard D dan Robert Mier. 1993. *Theories of Local Economic Development – Perspective From Across the Disciplines*. California: Sage Publications.
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Daldjoeni, Nathaniel. 1992. *Geografi Baru*. Bandung: Alumni.
- Dermawan, Rizky. 2005. *Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Strategis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Djojodipuro, Marsudi. 1990. *Teori Lokasi*. Jakarta: LPFE-UI
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994 *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan – Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: LP3ES,.

- Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, Akhmad dan Anna, Suzy. 2005. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Glasson John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan oleh: Paul Sitohang. Jakarta: LPFE-UI.
- Kusnadi, 2002 *Konflik Sosial Nelayan – Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: LKiS,.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan – Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo.
- Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah – Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rais, et al (ed). 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis-Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan oleh: Paul Sihotang. Jakarta: LPFE-UI.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik menyusun Tesis*. Bandung: AlfaBeta.
- Riyadi dan Deddy S Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah – Strategi Menggali potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rondinelli, Denis A. dan Ruddell, Kenneth. 1978. *Urbanization and rural Development – A Spatial Policy for Equitable growth*. New York: Preagher Publisher.

- Saragih, Bungaran. 2001. *Agribisnis – Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, .1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sukirno,Sadono. 1976 *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005a. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 1999. *Riset Strategi Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

ARTIKEL

- Hanafi, Mustafa. 2005. Studi Perubahan Garis Pantai Kaitannya dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Indramayu Jawa Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Dewi, Sisca Erni. 2006. Analisis Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara. Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Laapo, Alimudin. 2004. Model Ekonomi Sumber Daya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Perairan Kabupaten Morowali. Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Rahmalia, Evi. 2003. Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa-desa Pesisir Kota Bandar Lampung. Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Rinaldy, Erwin. 2007. Rantai Nilai dan Keruangan Komoditas Jeruk Sambas. Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Lusianti, Heny. 2002. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam untuk Mendukung Pengembangan Kota Pangkal Pinang. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.

- Daud, Lidya, 2000. Studi Potensi Keunggulan Daya Saing Wilayah Batam. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.
- Hidayat, Mohammad Wahyu, 2004. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Tanglok Guna Mendukung Pengembangan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sampang. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.

HASIL PENELITIAN

- Khazali, M. 2002. Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove (Studi Kasus Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Sudaryanto, Budi. 2006. Analisis Efisiensi Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Studi di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

MAKALAH DALAM SEMINAR/LOKAKARYA/PERTEMUAN ILMIAH

- Mahyuddin, Bustami. 2001. *Peranan Pelelangan Ikan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kasus Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu)*, Makalah Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor.
- M, Syaiful. 2003. *Perencanaan Industri Hasil Perikanan di Wilayah Pesisir Propinsi Bengkulu*, Makalah Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor.
- Azis, Kiagus Abdul dkk. 2001. *Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu (PPNP) dalam Mendukung Pembangunan Perikanan*, Makalah Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor.
- Wiranto, Tatag. *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*. Disampaikan pada: Sosialisasi Nasional Program MFCDP, September 2004.
- Rudyanto, Arifin. *Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*. Disampaikan pada: Sosialisasi Nasional Program MFCDP, September 2004.

Susilowati, Indah. *Pengelolaan Perikanan Komersial Berbasis Pendekatan Kolaboratif Dan Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat*. Disampaikan pada: Program Pelatihan Pembangunan Wilayah Pesisir, 15-16 Juni 2005.

Dahuri, Rokhmin. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dipersimpangan Jalan?*. Disampaikan pada: Kuliah Umum, Program Magister Ilmu Lingkungan dan Program Magister Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro Semarang, 19 September 2006.

Priyanto, Sri Mudiastuti. 2003. *Program Penataan Kawasan Nelayan Kawasan Pemukiman Muara Angke Jakarta Utara ke Laut Jawa*, Makalah Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor

TERBITAN TERBATAS

Syarief, Efrizal. 2001. *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bappenas

Ma'rif, Samsul. 2002. *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*, Diktat Kuliah PWK UNDIP Semarang.

Tallec, Fabien dan Louis Bockel. 2005. *Commodity Chain Analysis – Constructing the Commodity Chain Functional Analysis and Flow Charts*. FAO

Kaplinsky, Raphael dan Mike Morris. 2000. *A Handbook for Value Chain Research*. IDRC.

SURAT KABAR/MAJALAH/WEBSITE

Darlan, Yudi. Sabuk Hijau untuk Pesisir Indramayu. Dimuat dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat Juni 2007.

Dahono, Fitrianto. Es, Nelayan dan Potensi yang Terancam (Kasus Nelayan Karangsong). Dimuat dalam Surat Kabar Kompas Agustus 2003.

Website: <http://www.pipp.dkp.go.id> Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP dan PPI, Agustus 2007.

Website: <http://www.bkpm.go.id>. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Profil Singkat Industri Perikanan Tangkap, Nopember 2007.

Website: <http://www.dkp-banten.go.id>. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten: Mewujudkan Kawasan Industri Pengelolaan Perikanan Bojonegoro, 22 Oktober 2007.

Website: <http://www.wikipedia-indonesia.com>. Ensiklopedia bebas Berbahasa Indonesia: Pelabuhan, 15 Agustus 2007.

Website: <http://www.geocities.com>. Sugiyono, Agus. Metodologi Ekonomi Positivisme, Peneliti BPPT, 2007.

BUKU DATA/LAPORAN

Kabupaten Indramayu dalam Angka Tahun 2002 – 2006. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu dan Bapeda Kabupaten Indramayu, 2006

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu Tahun, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu, 1994.

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Indramayu, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu, 2004.

Masterplan Kawasan PPI Karangsong, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu, 2005.

Pengkajian Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Kabupaten Indramayu, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu, 2007.

PERATURAN-PERATURAN

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kelautan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005.

